

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan perencanaan yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam perumusannya, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up. Berdasarkan telaah tersebut, dapat dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki sinergitas perencanaan yang saling berkesinambungan. Kesinambungan perencanaan yang bersinergi sebagaimana tertuang dalam pokok pikiran di atas dibuktikan secara eksplisit berdasarkan definisi umum dokumen perencanaan pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa:

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa:

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2010 s.d. 2015 berakhir pada Tahun 2015. Dengan demikian, untuk menghindari kekosongan dasar perencanaan pada tahun 2016 maka berdasarkan telaah terhadap kesinambungan perencanaan pembangunan

dapat disimpulkan bahwa perumusan RKPD Tahun 2016 harus menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Kabupaten Gresik 2010-2015 sebagai masa transisi, mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta responsif terhadap isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik maupun sumber-sumber lain yang ditempuh meliputi APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN, investasi dan dana CSR perusahaan swasta dan partisipasi masyarakat. Secara substantif, dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 telah memuat berbagai aspirasi yang muncul baik melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up yang diperoleh melalui pelaksanaan forum konsultasi publik yaitu musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari proses pengkajian keadaan desa, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD, hingga musrenbang Kabupaten.

Adapun dalam proses perumusannya, Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 melalui beberapa tahapan yaitu (a) persiapan penyusunan RKPD, (b) penyusunan rancangan awal RKPD, (c) penyusunan rancangan RKPD, (d) pelaksanaan musrenbang RKPD, (e) perumusan rancangan akhir RKPD, dan (f) Penetapan RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2015;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Gresik 2010-2015;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 memiliki kesinambungan perencanaan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kesinambungan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 mengacu terhadap dokumen perencanaan pembangunan di atasnya meliputi;

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik 2011-2015
- g. Integrasi kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global antara lain;

- a. Millenium Development Goal's (MDG's);
- b. Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- c. Isu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Karakteristik Desa;

- d. Pengarustamaan Anak - Gender;
- e. *Pro Poor Planning Budgeting dan Monitoring* atau Penganggaran dan Pengawasan yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin; dan
- f. berbagai isu strategis lainnya.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan di bawahnya dan dokumen penganggaran terkait meliputi :

- a. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Gresik Tahun 2016 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2016;
- b. Menjadi pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- c. Menjadi bahan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2016, untuk memastikan APBD Tahun 2016 telah disusun berlandaskan RKPD Tahun 2016;
- d. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa yaitu RKP Desa Tahun 2016 dan APB Desa Tahun 2016.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyajian RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang: (1) arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, (2) arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan dari RKPD

1.5. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Sedangkan tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara

capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

- b. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2016 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah dengan memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan;
- d. Merumuskan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- e. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016;
- f. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	ix
 Bab I Pendahuluan	 I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I – 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	I – 6
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I - 7
 Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian	
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografis	II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 4
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 4
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 9
2.1.2.3. Fokus Seni dan Budaya	II - 12
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 13
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II - 40
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II – 47
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II – 47
2.1.4.2 Fokus Infrastruktur.....	II – 50
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II - 52
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai	
Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD	II – 105

2.4.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 107
2.4.1.	<i>Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah</i>	II - 107
2.4.2.	<i>Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</i>	II - 110
Bab III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah	III - 2
3.1.	Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik	III - 2
3.1.1.	<i>Arah Kebijakan Ekonomi Daerah</i>	III - 2
3.1.2.	<i>Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015.....</i>	III - 6
3.1.3	<i>Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017.....</i>	III - 15
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 18
3.2.1.	<i>Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan</i>	III - 18
3.2.2.	<i>Arah Kebijakan Pendapatan Daerah</i>	III - 19
3.2.3.	<i>Arah Kebijakan Belanja Daerah</i>	III - 21
3.2.4.	<i>Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah</i>	III - 22
Bab IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV - 1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2.	Prioritas Pembangunan	IV - 1
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	V - 1
Bab VI	Penutup	V - 2
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2014.....	II - 4
Tabel II.2 PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2013 - 2014	II - 6
Tabel II.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik.....	II - 7
Tabel II.4 Pelayanan Dasar Pendidikan	II - 8
Tabel II.5 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011 - 2014	II - 10
Tabel II.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014 ...	II - 10
Tabel II.7 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2014	II - 11
Tabel II.8 Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2011 - 2014.....	II - 14
Tabel II.9 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 - 2014.....	II - 17
Tabel II.10 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011-2014.....	II - 17
Tabel II.11 Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit Tahun 2011-2014.....	II -18
Tabel II.12 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik.....	II -18
Tabel II.13 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gresik.....	II -19
Tabel II.14 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2011-2014.....	II -20
Tabel II.15 Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2011-2014.....	II -20
Tabel II.16 Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014.....	II -20
Tabel II.17 Pelayanan Prasarana Umum Tahun 2011- 2014.....	II – 21
Tabel II.18 Gambaran Umum Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2011-2014.....	II – 21
Tabel II.19 Jumlah Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, dan Ijin Mendirikan Bangunan.....	II – 23
Tabel II.20 Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2011-2014.....	II – 24
Tabel II.21 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2014.....	II – 25
Tabel II.22 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup.....	II - 26
Tabel II.23 Pelayanan Urusan Kependudukan Tahun 2011-2014.....	II – 27
Tabel II.24 Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	II – 28
Tabel II.25 Pelayanan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014.....	II – 30
Tabel II.26 Gambaran Urusan Sosial Kabupaten Gresik.....	II – 31
Tabel II.27 Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011-2014.....	II –31
Tabel II.28 Pelayanan Urusan Koperasi Tahun 2011-2014.....	II - 34

Tabel II.29 Pelayanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2014.....	II –35
Tabel II.30 Pelayanan Urusan Budaya Tahun 2012-2014.....	II –36
Tabel II.31 Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012-2014.....	II –36
Tabel II.32 Gambaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012-2014.....	II –37
Tabel II.33 Gambaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	II –38
Tabel II.34 Gambaran Urusan Ketahanan Pangan.....	II - 41
Tabel II.35 Gambaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II – 42
Tabel II.36 Gambaran Urusan Statistik.....	II – 42
Tabel II.37 Gambaran Urusan Perpustakaan.....	II – 43
Tabel II.38 Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II – 43
Tabel II.39 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB.....	II – 44
Tabel II.40 Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik.....	II - 45
Tabel II.41 Pelayanan Urusan Industri Tahun 2011-2014.....	II – 45
Tabel II.42 Pelayanan Urusan Perdagangan Tahun 2011-2014.....	II – 46
Tabel II.43 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik.....	II – 48
Tabel II.44 Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah.....	II – 50
Tabel II.45 Perkembangan Investasi Kabupaten Gresik.....	II – 52
Tabel II.46 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik.....	II - 55
Tabel II.47 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II – 56
Tabel II.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik.....	II –58
Tabel II.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik.....	II – 60
Tabel II.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.....	II – 66
.	
Tabel II.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik.....	II – 68
.	
Tabel II.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Gresik	II - 69
	II – 69

Tabel II.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	II – 72
Kabupaten Gresik.....	II – 73
Tabel II.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik.....	
Tabel II.55 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup.....	II – 74
Tabel II.56 Urusan Pertahanan Kabupaten Gresik.....	
Tabel II.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil	II – 75
Kabupaten Gresik.....	II – 76
Tabel II.58 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan	II – 78
Dan Perlindungan Anak Kab. Gresik.....	
Tabel II.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga	II – 79
Tabel II.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Gresik.....	
Tabel II.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten	II – 81
Gresik.....	
.	II – 82
Tabel II.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil	II – 84
Menengah Kabupaten Gresik.....	
Tabel II.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten	II – 85
Gresik.....	
.	II – 86
Tabel II.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik.....	
Tabel II.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten	
Gresik.....	II – 87
.	
Tabel II.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	II – 92
Dalam Negeri Kab. Gresik.....	II – 93
Tabel II.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan	II – 94
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,	II – 95
Kepegawaian dan Persandian.....	
Tabel II.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten	II – 95
Gresik.....	II – 96
.	

Tabel II.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat.....	II – 97
Tabel II.70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Gresik.....	II – 100
Tabel II.71 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik.....	
Tabel II.72 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.....	II – 100 II - 101
Tabel II.73 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik.....	II – 102 II – 103
Tabel II.74 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian.....	II – 105
Tabel II.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Gresik	
Tabel II.76 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gresik.....	II – 107 II – 108
Tabel II.77 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik.....	III – 110
Tabel II.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan.....	
Tabel II.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik.....	III– 8
Tabel II.80 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Gresik.....	III – 8
Tabel II.81 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelahaan Pokok – Pokok Pikiran DPRD.....	III – 10 III – 10
Tabel II.82 Isu-isu strategis Pembangunan Tahun 2016.....	III – 11
Tabel II.83 Identifikasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	III – 12
Tabel III.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik.....	
Tabel III.2 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	III – 24
Tabel III.3 Pertumbuhan pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik.....	
Tabel III.4 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Gresik.....	
Tabel III.5 Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Gresik.....	IV – 2
Tabel III.6 Proyeksi Realisasi Investasi Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	IV – 6 IV – 31
Tabel III.7 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 – 2017.....	

Tabel IV.1 Matrik Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016.....	
Tabel IV.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah.....	
Tabel IV.3 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Gresik.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Grafik Distribusi ADHB Kabupaten Gresik tahun 2011 - 2014.....	II - 5
Gambar II.2 Grafik Inflasi Kab. Gresik Tahun 2013 - 2014.....	II – 6
Gambar II.3 Grafik Kemiskinan Kabupaten Gresik.....	II – 8
Gambar II.4 Tingkat Kemiskinan.....	II – 12
Gambar II.5 Peninggalan Sejarah dan Nilai Budaya di Kabupaten Gresik.....	II – 13
Gambar II.6 Grafik presentase Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik.....	II – 49
Gambar II.7 Grafik Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik...	II – 49
Gambar II.8 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik.....	II – 53
Gambar II.9 Grafik Perkembangan Angka Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki dibanding Perempuan.....	II – 54
Gambar II.10 Grafik Perkembangan Jumlah KK di Kabupaten Gresik	II – 54
 Gambar III.2 Grafik Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2014.....	 III – 9
Gambar III.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Jawa Timur dan Nasional 2011 - 2014.....	III – 10
Gambar III.4 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014.....	III – 12
Gambar III.5 Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014	III – 12
Gambar III.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014	III – 15

Gambar III.7 Proyeksi Siklus Bisnis Kabupaten Gresik.....	III – 17
Gambar III.8 Amplitudo Siklus Kabupaten Gresik.....	III – 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I :

1. Dinas Pendidikan	
2. Dinas Kesehatan	
3. RSUD Ibnu Sina	
4. Dinas Pekerjaan Umum	
5. Bappeda	
6. Dinas Perhubungan	
7. Badan Lingkungan Hidup	
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
10. Dinas Sosial	
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
12. Dinas Tenaga Kerja	
13. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
14. Badan Penanaman Modal dan Perizinan	
15. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
16. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ...	
17. Satuan Polisi Pamong Praja	
18. Bagian Umum	

19. Bagian Perlengkapan	
20. Bagian Humas	
21. Bagian Administrasi Pembangunan	
22. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
23. Bagian Administrasi Perekonomian	
24. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	
25. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
26. Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi	
27. Bagian Hukum	
28. Bagian Organisasi dan Tatalaksana	
29. Sekretariat DPRD	
30. Inspektorat	
31. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
32. Badan Kepegawaian Daerah	
33. Kecamatan Gresik	
34. Kecamatan Kebomas	
35. Kecamatan Manyar	
36. Kecamatan Cerme	
37. Kecamatan Benjeng	
38. Kecamatan Balong Panggang	
39. Kecamatan Duduk Sampeyan	
40. Kecamatan Driyorejo	
41. Kecamatan Wringinanom	
42. Kecamatan Kedamean	
43. Kecamatan Menganti	
44. Kecamatan Sidayu	
45. Kecamatan Ujung Pangkah	
46. Kecamatan Panceng	
47. Kecamatan Bungah	
48. Kecamatan Dukun	

49. Kecamatan Sangkapura	
50. Kecamatan Tambak	
51. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	
52. Kantor Ketahanan Pangan	
53. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	
54. Kantor Perpustakaan dan Arsip	
55. Kantor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
56. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan	
57. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

K

abupaten Gresik berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut.

Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.191,25 Km², terdiri dari 993,83 Km² luas wilayah daratan ditambah sekitar 197,42 Km² luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km² yang potensial dalam subsektor perikanan laut dan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km, 69 Km di daratan memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta 71 Km di Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean.

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat wilayah yaitu:

- a. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Utara (meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk Industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
- b. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah; Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas) merupakan kawasan

dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

- c. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Selatan (meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringinanom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non-logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
- d. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non-logam spesifik.

Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

Pola aliran sungai di Kabupten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini mempunyai sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air

dan sumur bor. Pada sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2 – 15 %, serta adanya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Kondisi di atas merupakan lahan kritis dan lahan yang sangat peka terhadap bencana alam.

Melihat kondisi di atas diindikasikan beberapa kawasan mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari gerusan air, terutama air hujan. Daerah-daerah yang terkena bencana erosi sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik, untuk DAS Kali Lamong meliputi Kecamatan Balongpanggang, Cerme, Benjeng, Kedamean, dan Menganti. Untuk DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Dukun, Manyar, Bungah, Sidayu, dan Ujung Pangkah. Sedangkan DAS Kali Surabaya meliputi Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo.

Sebagian kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa memperhatikan sempadan pantai yang semestinya bebas dari bangunan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2014 sebanyak 1.319.314 jiwa yang terdiri dari 664.288 laki-laki dan 655.026 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 1.107 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2014 sebesar 101,41%.

Tabel II.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Wilayah Area (Km ²)	Penduduk Th. 2014		
				L	P	L+P
1	Dukun	26	59,03	34680	34025	68.705

2	Balongpanggang	25	63,88	29430	29560	58.990
3	Panceng	14	62,59	26477	26075	52.552
4	Benjeng	23	61,26	33196	33045	66.241
5	Duduksampeyan	23	74,29	25752	25794	51.546
6	Wringinanom	16	62,62	36355	35818	72.173
7	Ujungpangkah	13	94,82	25636	25430	51.066
8	Kedamean	15	65,96	31453	31113	62.566
9	Sidayu	21	47,13	22052	21705	43.757
10	Manyar	23	95,42	56434	54607	111.041
11	Cerme	25	71,73	39463	39457	78.920
12	Bungah	22	79,49	33926	33501	67.427
13	Menganti	22	68,71	61223	60043	121.266
14	Kebomas	21	30,06	52522	51133	103.655
15	Driyorejo	16	51,30	52252	51371	103.623
16	Gresik	21	5,54	45734	45390	91.124
17	Sangkapura	17	118,72	36941	36749	73.690
18	Tambak	13	78,70	20762	20210	40.972
Jumlah		356	1.191,25	664.28	655.02	1.319.31
				8	6	4

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik Tahun 2015

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran umum kesejahteraan masyarakat Gresik difokuskan pada konteks kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya serta olahraga sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

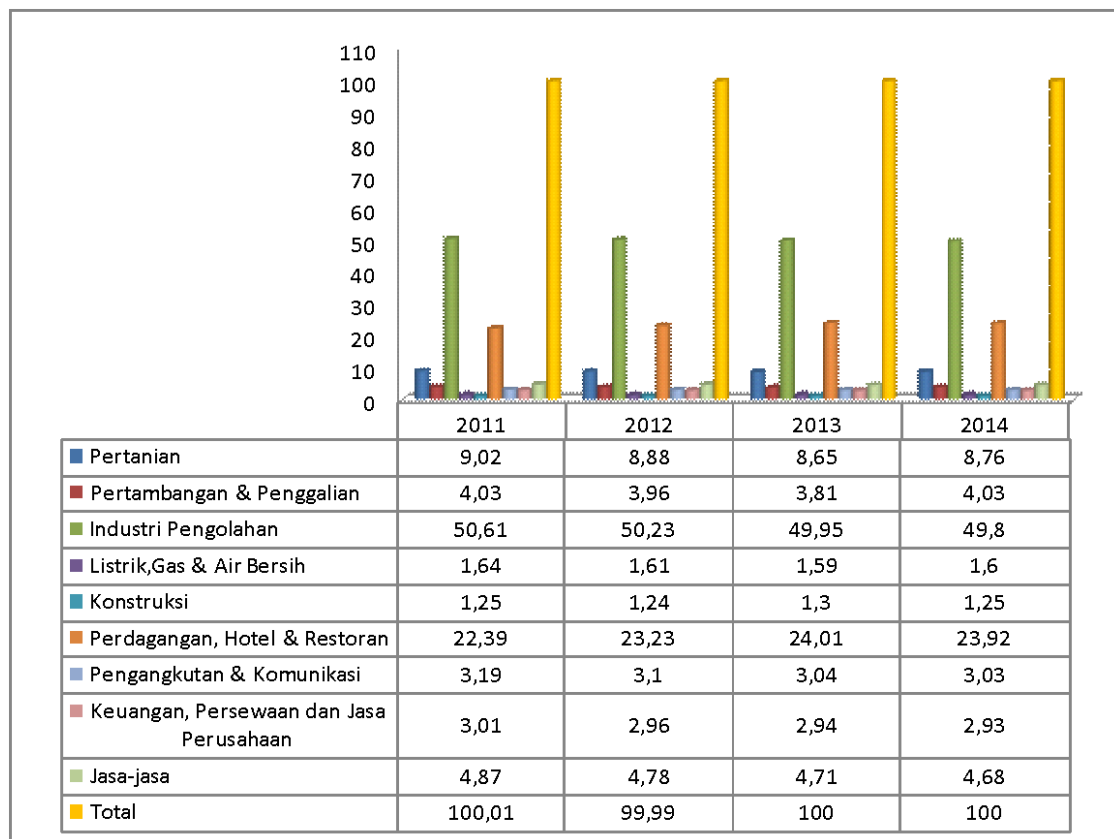
Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah secara umum dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.

(a) Pertumbuhan PDRB

PDRB dibentuk dari sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Adapun jenis

PDRB yang digunakan meliputi PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB); dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (PDRB ADHK 2000);

Gambar II.1
Grafik Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014



S

SSumber Data : LKPJ AMJ Tahun 2010-2015

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa struktur perekonomian Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2014 masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pertanian, berdasarkan distribusi persen ADHB yang kontribusi ketiganya sebesar 82,02% tahun 2011 meningkat hingga mencapai 82,48% tahun 2014. Peningkatan kontribusi ketiga sektor tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:

Selama tahun 2011 s.d. 2014, PDRB Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel II.2
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

NO	U R A I A N	2011	2012	2013	2014
1.	PDRB ADHB (Juta Rp)	44.082.264,5 7	50.185.435,9 9	57.264.224,4 0	65.609.306,7 3
2.	PDRB ADHK 2000 (Juta Rp)	18.081.043,8 9	19.424.161,6 3	20.811.653,4 6	22.274.018,9 1

Sumber data: BPS Kab. Gresik

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp57.264.224.400.000,00, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp65.609.306.730.000,00. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada tahun 2013 sebesar Rp20.811.653.460.000,00, kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp22.274.018.910.000,00.

(b) Pendapatan Perkapita

Peningkatan PDRB menunjukkan peningkatan kesejahteraan Kabupaten Gresik sejalan dengan proses pemulihan kondisi ekonomi Kabupaten Gresik yang diindikasikan melalui kenaikan pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. PDRB ADHB perkapita Tahun 2011 sebesar Rp37.450.000,00 dan pada tahun 2013 sebesar Rp46.670.000,00 sehingga dari Tahun 2011 s.d 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp9.220.000,00, atau rata-rata 11,64% per tahun. Adapun PDRB ADHK Perkapita pada Tahun 2011

sebesar Rp15.270.000,00 dan pada Tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp16.960.000,00, sehingga dari Tahun 2011 s.d 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1.690.000,00, atau rata-rata 5,39% per tahun. PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2014 secara rinci terlihat pada tabel berikut:

Selama tahun 2011 s.d. 2014, Pendapatan Perkapita Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel II.3
Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

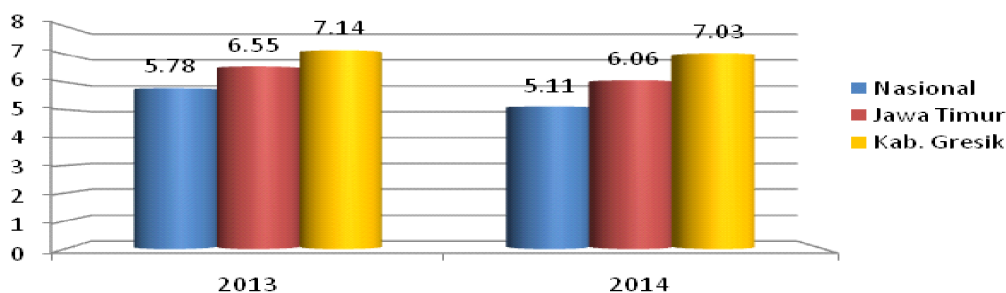
NO	U R A I A N	2011	2012	2013	2014
1.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp)	37.450.000,0 0	41.420.000,0 0	46.670.000,0 0	65.609.306,7 3
2.	PDRB ADHK Per Kapita (Rp)	15.270.000,0 0	16.030.000,0 0	16.960.000,0 0	22.274.018,9 1

Sumber data: BPS Kab. Gresik

(c) **Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sebesar 7,14% dan tahun 2014 sebesar 7,03%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 6,55% dan pada tahun 2014 sebesar 6,06%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur, adapun secara rinci pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Gresik, Jawa Timur dan
Nasional Tahun 2013-2014

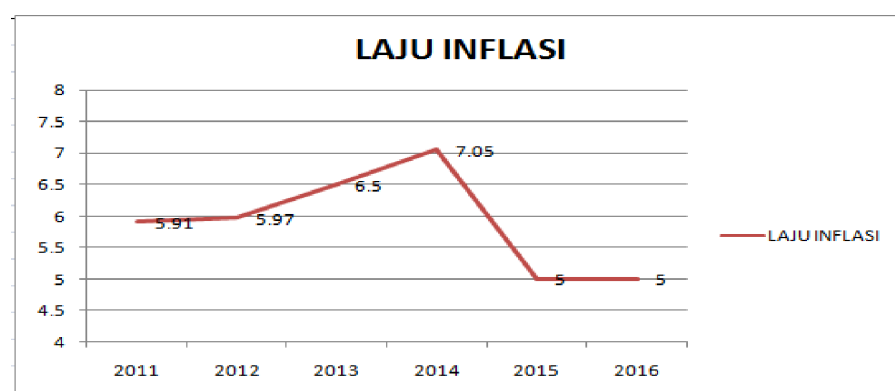


Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dan Provinsi Jatim Tahun 2014

(d) Laju Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 7,05% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,5%. Salah satu penyebab kenaikan inflasi pada tahun 2014 di Kabupaten Gresik yakni adanya kenaikan harga BBM secara nasional. Adapun secara rinci inflasi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar II.3
Laju Inflasi Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Gresik Tahun 2014

2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Gambaran kesejahteraan sosial masyarakat ditelaah pada pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, dan ketenagakerjaan sebagaimana berikut;

(a) Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, di Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Gambaran umum pelayanan dasar di bidang pendidikan digambarkan pada 14 indikator utama yang menjadi standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana tabel berikut;

**Tabel II.4.
Pelayanan Dasar Pendidikan Tahun 2011 -2014**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah siswa pada jenjang					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/Penitipan Anak) Penduduk yang berusia >15	Siswa	21,209	39,212	39,220	40.398
2	Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)	%	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,90	98,02	98,55	98,68
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,06	85,59	85,6	85,63
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	56,40	65,03	65,06	74,01
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,07	0,05	0,06	0,02
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,38	0,17	0,13	0,08
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,44	0,43	0,32	0,25
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93,39	94,17	95,37	96,81
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	87,00	90,70	89,68	99,49

14	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	guru	15,922	18,779	15,509	19.351
-----------	--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, 2014

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Peningkatan derajat kesehatan penduduk di upayakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat.

Pada pelayanan dasar kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Puskesmas dan Puskesmas pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat hingga saat ini jumlahnya masih kurang memadai terutama apabila dikaitkan dengan standart pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu setiap puskesmas akan melayani sekitar 30 ribu penduduk. Keterbatasan jumlah puskesmas tersebut dapat ditunjang dengan adanya Poliklinik maupun Pustu. Adapun jumlah Fasilitas Kesehatan dan tenaga Dokter di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel II.5
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011-2014
Kabupaten Gresik

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Puskesmas	32	32	32	32
2.	Jumlah Poliklinik	60	63	64	79
3.	Jumlah Pustu	77	77	77	76
4.	Jumlah Penduduk	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

Tabel. II.6
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik
Tahun 2011 – 2014

NO	Tenaga Kesehatan	2011	2012	2013	2014
1.	Dokter Umum	131	125	123	176
2.	Dokter Spesialis	73	54	54	54
3.	Dokter Gigi	63	58	54	61
	Jumlah Dokter	267	237	231	291

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

(b) Ketenagakerjaan,

Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk. Manusia sebagai salah faktor pembangunan harus dimaksimalkan potensinya agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk berperan serta dalam pembangunan disegala bidang. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pada masa mendatang diharapkan kondisi pengangguran semakin berkurang karena Pemerintahan Kabupaten Gresik masih melakukan perbaikan infrastruktur, memperbaiki iklim industri yang lebih kondusif serta mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor lainnya yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

Tabel II.7
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	612.07 3	557.62 3	612.32 1	592.56 9
2	Jumlah yang bekerja (jiwa)	874.44 6	878.21 8	901.60 2	930.85 1
3	Jumlah Penganggur (jiwa)	26.664	37.473	27.599	30.010
4	Tingkat Partisipasi Angk.Kerja/TPAK(%)	66,04	63,49	67,91	63,66

5	Tingkat Kesempatan Kerja/TKK (jiwa)	95,64	93,28	95,49	94,94
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,36	6,72	4,51	5,06

Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 2014

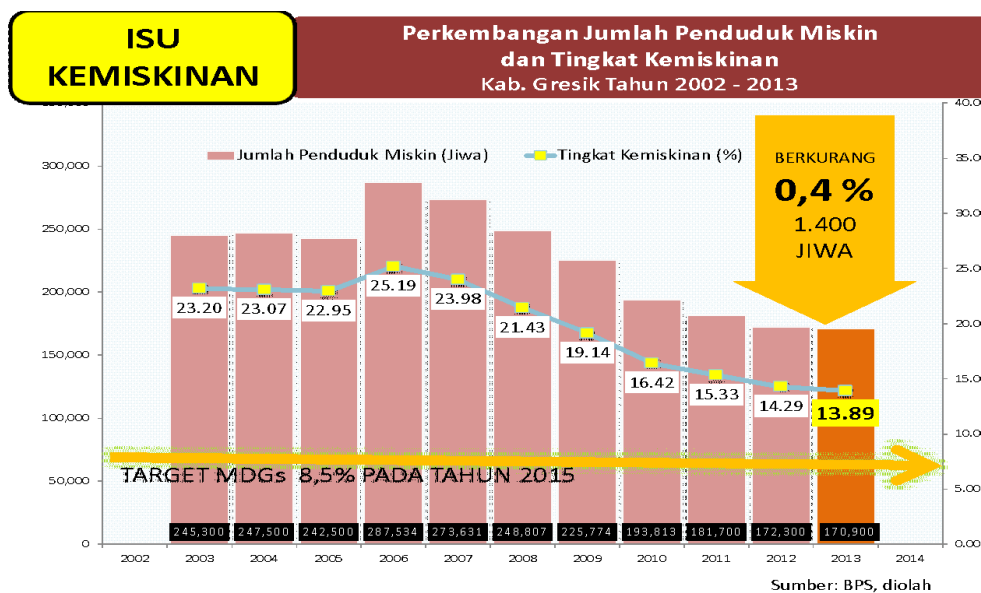
Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi karena semakin sedikit penduduk Kabupaten Gresik yang mendapat pekerjaan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan pegawai untuk efisiensi biaya produksi yang dilakukan di Kabupaten Gresik terutama di bidang Industri.

(c) Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2013, Garis Kemiskinan untuk Kabupaten Gresik adalah Rp.331.296,- per kapita per bulan, merupakan nilai tertinggi ke-6 dari 38 Kabupaten / Kota se-Jawa Timur. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik juga lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah Rp.303.843,- sedangkan Nasional sebesar Rp. 292.951,-

Pada Tahun 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mencapai 13.89% atau lebih tinggi dari Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% dan Tingkat Kemiskinan Nasional sebesar 11.47%. Pada perkembangan antar waktu, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 4 Tahun, yaitu Tahun 2009 – 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik telah berkurang sebanyak 5.25 poin persen, sedang jumlah penduduk miskin berkurang 54.874 jiwa sebagaimana digambarkan pada grafik berikut;

Gambar II.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014

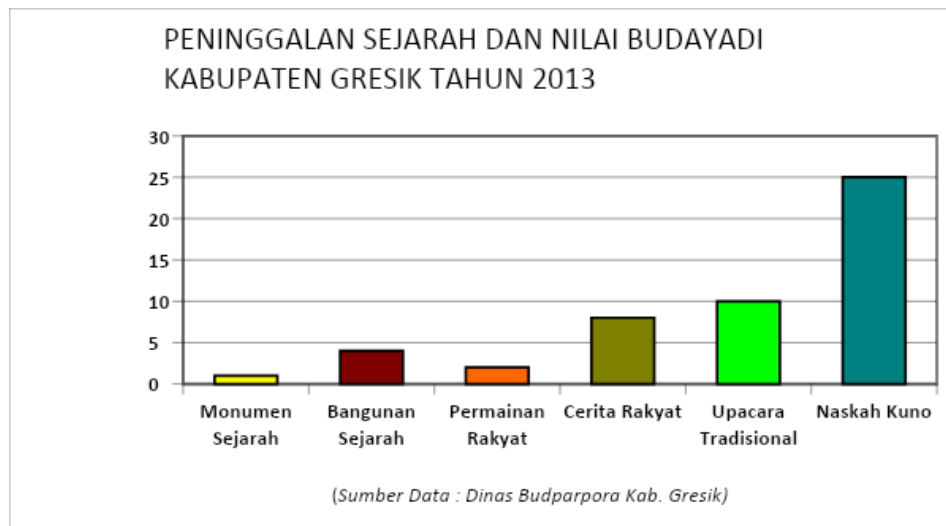


2.1.2.3 FOKUS SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA

Kabupaten Gresik memiliki khasanah kesenian daerah, tradisional dan modern yang cukup kaya serta variatif. Jenis kesenian yang ada sebagian bersifat modern, seperti Band (6 group) dan terbanyak Orkes melayu (sebanyak 177 group). Sedangkan jenis kesenian yang bercorak tradisional juga sangat banyak dan variatif, seperti: karawitan (11), ludruk (4), Kuda Kencak (2), reog (2), wayang kulit (14), Mocapat (1), sandur madura (1) dan pelandang (1).

Secara endemik juga terdapat unit kesenian yang berkarakteristik keagamaan seperti: samroh (5), hadrah dan qosidah (11). Kekayaan kesenian daerah yang banyak dan variatif ini merupakan produk kebudayaan dan peradaban masyarakat yang heterogen dan kreatif. Di masa depan potensi ini perlu dilestarikan, didukung bahkan dikembangkan dengan kebijakan serta program-program pemerintah daerah yang tepat. Ditinjau dari sejarah dan nilai budaya yang ada di kabupaten Gresik, ditemukan peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya sebagai berikut:

Gambar II.5
Peninggalan Sejarah dan Nilai Budaya Di Kabupaten Gresik Tahun 2013



Berdasarkan grafik tersebut diatas, hasil inventarisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2012 bahwa terdapat tidak kurang dari 25 naskah kuno, 10 jenis upacara tradisional, 8 cerita rakyat, 4 bangunan sejarah, 2 jenis permainan rakyat dan 1 buah monumen sejarah. Data temuan bersejarah dan nilai budaya ini berkonsekuensi bahwa di masa depan perlu dilakukan upaya atau program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

a. Pendidikan

Pelayanan umum untuk urusan pendidikan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah pelayanan kepada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Pelayanan pendidikan ini meliputi aspek kualitas pendidikan, akseptabilitas pendidikan dan manajemen pendidikan. Beberapa indikator yang telah dicapai selama tahun 2014 adalah:

Tabel II.8
Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2011 -2014

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Siswa	21,209	39,212	39,220	40.398
	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Siswa	38,563	62,170	56,531	47.291
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)					
	Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis	Orang	661,927	846,674	976,448	1,014,458
	Penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	661,927	846,674	976,448	1,014,458
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A					
	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	114,980	115,801	116,224	116.585
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Siswa	117,444	118,138	117,938	118.146
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B					
	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	50,461	50,458	48,859	50.164
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Siswa	63,027	58,954	57,081	58.580
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C					
	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Siswa	34,031	35,708	36,380	39,452
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Siswa	60,335	54,914	55,914	53,309
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI					

	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI	Siswa	93	59	82	27
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI	Siswa	126,615	127,990	127,292	127.637
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs					
	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Siswa	135	94	71	47
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs	Siswa	35,071	54,247	56,217	58.580
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA					
	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	188	195	150	119
	Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	42,992	45,360	46,429	47.332
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Siswa	19,307	18,950	20,819	20.356
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	19,307	18,950	20,819	20.356
		Siswa	19,307	18,950	20,819	20.356
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	19,307	18,950	20,819	20.356
		Siswa	19,307	18,950	20,819	20.356
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	16,587	17,531	17,548	16.007
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	16,587	17,531	17,548	16.007
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	14,015	11,997	12,898	13.633
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	14,015	11,997	12,898	13.633

12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs					
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	17,791	17,940	19,855	19.707
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	Siswa	19,050	19,050	20,819	20.356
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA					
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	15,031	15,687	15,509	15.925
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	Siswa	17,278	17,295	17,293	16.007
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Guru	15,922	18,779	15,509	19.351
	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	19,580	22,392	12,803	19.774

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2014

b. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak perlu diperluas cakupannya mengingat aspek kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang relevan dengan target Milenium Development Goals (MDGs) yang harus dipenuhi pada Tahun 2015. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu dan bayi antara lain dengan Rivetalisasi dan pengembangan Posyandu. Dalam Tahun 2014 terdapat penambahan jumlah Posyandu dari 1.466 unit menjadi 1.474 unit atau terdapat penambahan 11 unit. Peningkatan jumlah posyandu ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan bayi sebagaimana tabel 2.7.

Tabel II.9
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011-2014
Kabupaten Gresik

NO.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah posyandu	1.457	1.463	1.466	1.474
2.	Jumlah balita	80.623	95.521	105,620	83,415
3.	Rasio	1,81	1,53	1,39	1,77

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Puskesmas dan Puskesmas pembantu (PUSTU) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat hingga saat ini jumlahnya masih kurang memadai terutama apabila dikaitkan dengan standart pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu setiap puskesmas akan melayani sekitar 30 ribu penduduk. Namun demikian keterbatasan jumlah puskesmas dapat di tunjang dengan adanya Poliklinik maupun Pustu.

Adapun jumlah Fasilitas Kesehatan dan tenaga Dokter di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel II.10
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011-2014
Kabupaten Gresik

NO.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Puskesmas	32	32	32	32
2.	Jumlah Poliklinik	60	63	64	79
3.	Jumlah Pustu	77	77	77	76
4.	Jumlah Penduduk	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314
5.	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,025	0,024	0,024	0,024
6.	Rasio Poliklinik per 1000 penduduk	0,047	0,048	0,048	0,059
7.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,058	0,059	0,058	0,057

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

Tabel II.11
Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit Tahun 2011-2014
Kabupaten Gresik

NO.	Uraian	2011	2012	2013	2014
-----	--------	------	------	------	------

1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AL/AU/POLRI	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	6	8	8	13
5.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	7	9	9	14
6.	Jumlah Penduduk	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314
7.	Rasio	0,006	0,007	0,007	0,010

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

Tabel II.12
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik
Tahun 2011 - 2014

NO	Tenaga Kesehatan	2011	2012	2013	2014
1.	Dokter Umum	131	125	123	176
2.	Dokter Spesialis	73	54	54	54
3.	Dokter Gigi	63	58	54	61
	Jumlah Dokter	267	237	231	291
4	Jumlah Penduduk	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314
5	Rasio Dokter per1000 penduduk	0,21	0,18	0,17	0,22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2014 yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah terpenuhi sebagai berikut:

Tabel II.13
Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

NO.	SARANA PELAYANAN	JUMLAH			
		2011	2012	2013	2014
1	RUMAH SAKIT UMUM	7	8	8	13
2	RUMAH SAKIT KHUSUSLAINNYA	1	1	1	1

3	PUSKESMAS	32	32	32	32
4	PUSKESMAS PEMBANTU	77	77	77	76
5	PUSKESMAS KELILING	32	32	32	42
6	PONKESDES	222	289	289	225
7	RUMAH BERSALIN	-	-	9	8
8	BALAI PENGOBATAN/KLINIK	60	63	64	79
9	PRAKTEK DOKTER PERORANGAN	539	620	873	337
10	PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL	33	35	54	119
11	POSYANDU	1457	1457	1466	1474
12	APOTIK	102	125	123	147
13	TOKO OBAT	14	16	18	22
14	Industri Rumah Tangga Makanan/Minuman (PM-IRT)	766	882	970	1040
15	GFK	1	1	1	1
16	Industri Obat	6	6	6	6
17	Industri Obat Tradisional (IOT)	2	2	1	1
18	Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	7	6	7	7
19	Idustri Perbekalan Kesehatan rumah Tangga (PKRT)	9	9	10	10
20	Industri Kosmetika	5	5	5	5
21	Pedagang Besar Farmasi	1	1	1	1
22	Penyalur Alat Kesehatan	4	4	4	1

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan ibu hamil selama tahun 2011-2014 adalah:

Tabel II.14
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2011-2014

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	87,58%	82,52%	82,56%	85,31%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes	98,45%	88,97%	89,39%	89,86%

3	Cakupan Pelayanan Nifas	97,13%	87,33%	87,74%	89,31%
---	-------------------------	--------	--------	--------	--------

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan bayi selama tahun 2011-2014 adalah:

Tabel II.15
Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2011-2014

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1.	Cakupan kunjungan neonatus	41,38%	58,60%	60,53%	57,74%
2.	Cakupan kunjungan bayi	94,10%	94,13%	95,52%	98,07

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014

Capaian SPM untuk pelayanan Keluarga Berencana selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel II.16
Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1.	Peserta Program KB aktif	78,69%	78,00 %	78,68 %	78,77

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Gresik, 2014

c. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pelayanan pada urusan Pekerjaan Umum yang ingin dicapai adalah menyiapkan infrastruktur daerah dengan indikator kinerja utama: jalan kabupaten dalam kondisi baik, Jembatan kabupaten dalam kondisi baik, pelayanan jaringan irigasi, dan saluran drainase perkotaan.

Tabel II.17
Pelayanan Prasarana Umum Tahun 2011- 2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN
-----	-------------------	--------	---------------------------------

			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik					
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	m	363.94	363.94	381.06	401.46
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	m	512.16	512.16	512.16	512.16
2.	Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik					
	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Buah	198	216	277.8	267
	Jumlah jembatan kabupaten di daerah tersebut	Buah	221	221	297	292

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gresik, 2014

Tabel II.18
Gambaran Umum Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2011-2014

NO .	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rumah Tangga pengguna air bersih					
	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	RT	174.465	183.077	193.177	195.750
	Jumlah seluruh rumah tangga	RT	260.945	260.945	260.945	260.945
2.	Lingkungan permukiman kumuh					
	Luas lingkungan permukiman kumuh	m ²	1.029,12	1.026,92	1023,92	836,04
	Luas wilayah	m ²	6.014	6.014	6.014	6.014
3	Rumah Layak Huni					
	Jumlah rumah layak huni	Buah	227.049	230.000	231.000	237.000
	Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	Buah	260.945	260.945	260.945	260.945

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, 2014

d. Tata Ruang

Penataan ruang di Kabupaten Gresik merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga lainnya dalam mengalokasikan dan mengendalikan ruang sebagai tempat kegiatan baik bersifat ekonomis, sosial maupun budaya. Kabupaten Gresik telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 melalui Perda Nomor 8 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 15 Juli 2011. Dengan adanya dinamika pembangunan maka pada tahun 2015 RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030 akan direview kembali.

Guna mengantisipasi kawasan – kawasan cepat tumbuh pada Tahun 2013 telah disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Duduk Sampeyan – Cerme dan BWP Gresik Selatan. Pada Tahun 2014 dilanjutkan dengan menyusun RDTR BWP Perkotaan dan BWP Gresik Utara.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan menerbitkan ijin pemanfaatan ruang, ijin mendirikan bangunan, dan ijin lokasi. Pada Tahun 2013 ijin yang telah dikeluarkan adalah : 206 ijin prinsip, 40 ijin lokasi, dan 739 ijin mendirikan bangunan. Bila dibandingkan Tahun 2012 terdapat kenaikan pada ijin prinsip 190 dan ijin mendirikan bangunan 404. Untuk Tahun 2014 ijin yang dikeluarkan adalah : 212 Ijin Prinsip, 62 Ijin Lokasi, dan 421 Ijin Mendirikan bangunan

Tabel II.19.
Jumlah Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, dan Ijin Mendirikan Bangunan
Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014

NO.	Jenis Ijin	2011	2012	2013	2014
1.	Ijin Prinsip	100	190	206	212
2.	Ijin Lokasi	34	54	40	62
3.	Ijin Mendirikan Bangunan	494	404	739	421

Sumber Data : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik, 2014

e. Perencanaan Pembangunan

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik dijabarkan ke dalam RKPD dan juga merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Gresik.

Sampai dengan Tahun 2014 dokumen perencanaan Kabupaten Gresik yang telah diselesaikan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 sesuai Perda Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2011. Dengan ditetapkannya dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum.

Program – program pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RKPD merupakan dasar pengalokasian anggaran didalam KUA-PPAS maupun RAPBD Kabupaten Gresik. Kesesuaian program RKPD yang diakomodasi didalam APBD Tahun 2011- 2013 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2011 sebesar 80%, Tahun 2012 sebesar 80% pada Tahun 2013 sebesar 94% dan pada tahun 2014 sebesar 110%.

f. Perhubungan

Sasaran urusan perhubungan adalah meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau dengan indikator kinerja utama: Persentase ketersediaan angkutan darat, Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan, dan Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan).

Tabel II.20.
Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas					
	Jumlah rambu lalu lintas	Buah	850	945	1,040	1,302
	Jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan	Buah	2,500	2,500	2,500	2,500

2.	Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan					-
	Jumlah angkutan umum dalam kondisi layak jalan	Buah	1,212	1,131	1,050	1,025
	Jumlah angkutan umum	Buah	1,414	1,414	1,414	1,414
3.	Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan)					-
	Jumlah daya tampung kapal	Orang	109.44	109.44	127.870	211,496
	Jumlah penumpang angkutan laut (penyeberangan)	Orang	94.851	86.89	107.762	108,401

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Gresik, 2014

Rambu – rambu lalu lintas di Kabupaten Gresik yang dibutuhkan sebanyak 2.500 unit namun pada Tahun 2013 baru tersedia 1.040 unit atau sebesar 41,6%, sehingga perlu di tingkatkan pengadaan rambu – rambu dimaksud terutama pada daerah yang rawan kecelakaan.

Ketersediaan angkutan laut penyeberangan ke Pulau Bawean sudah cukup memadai sebesar 118,66%, namun masih terdapat kendala cuaca/gelombang besar sehingga pemerintah daerah berupaya menyediakan kapal bantuan. Disamping itu , untuk meningkatkan transportasi ke Pulau Bawean Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya untuk mewujudkan lapangan terbang perintis bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat yang sampai saat ini pembangunan lapangan terbang dimaksud sudah terealisasi 95%, namun masih terkendala untuk operasionalnya.

g. Lingkungan Hidup

Sasaran urusan lingkungan hidup adalah meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indikator utama: Luas Lahan Kritis, Rasio Luas Kawasan lindung, Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, dan Luas RTH Perkotaan. Selain itu, urusan lingkungan hidup adalah meningkatkan penanganan persampahan dengan indikator kinerja utama:

Penanganan sampah, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan Pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu.

Data terkait kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup, dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel II.21.
Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2014

No.	FOKUS PELAYANAN	2012	2013	2014
1	Luas lahan kritis	17.239 Ha	11,492 Ha	5.746 Ha
2	Rasio luas kawasan lindung	18.19%	$14.004,64/119.125 \times 100 = 11,75\%$	18,19%
3	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Jml total IPLC 55 (17 perpanjangan, 6 Baru)	Jml total IPLC 58 (17 perpanjangan, 3 Baru)	Jml total IPLC 60 (21 perpanjangan, 3 Baru)
4	Jumlah perusahaan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	104 Perusahaan	153 Perusahaan	199 Perusahaan
5	Luas ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan	715,35 Ha	716,35 Ha	717,75 Ha
6	Penanganan sampah	$(727 / 780) \times 100\% = 93,21\%$	$(740 / 796,6) \times 100\% = 92,89\%$	$(752 / 799) \times 100\% = 94,12\%$
7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$(578 / 1.307.995) = 0,044$	$664 / 1.322.710 = 0,050$	$(745 / 1.319.314) \times 100 = 0,056$

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik, 2014

Tabel II.22.
Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2011-2014

No.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	7	15	25	18
2.	Penegakan hukum lingkungan	-	17	13	9
3.	Rumah tangga pengguna air bersih	66,86%	70,16%	74,03%	75,02%
4.	Lingkungan pemukiman kumuh	17,11%	17,08%	17,03%	13,90%
5.	Rumah layak huni	87,61%	88,152%	88,52%	90,82%

Sumber Data : B L H dan Dinas P U. Kab. Gresik, 2014

h. Pertanahan

Sasaran urusan pertanahan adalah meningkatkan penanganan pertanahan dengan indikator utama Penyelesaian Kasus Tanah Negara, penyelesaian TKD, pembebasan lahan untuk kepentingan umum meliputi : penetapan lokasi, sosialisasi, pematokan, pengukuran, appraisal, negoisasi harga, pendataan tanah, tanaman, bangunan, pemberkasan dan pembayaran.

Tabel II.22.
Gambaran Umum Urusan Pertanahan Tahun 2011-2014

BAG ADM PEMERINTAHAN UMUM						
NO .	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					
	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	Perkara			2	0
	Jumlah Kasus Yang Terdaftar	Perkara			2	0

Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Kabupaten Gresik, 2014

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk mendapat perbaikan. Database kependudukan yang baik merupakan sumber data yang sangat diperlukan untuk segala keperluan. Pemerintah melalui program nasional telah membangun data kependudukan secara nasional melalui KTP nasional berbasis NIK. Selain itu pelayanan akta kependudukan juga menjadi prioritas pelayanan untuk masyarakat, adapun dalam rangka urusan ktp, lama pelayanan yang berjangka 1 hari.

Tabel II.23.

Pelayanan Urusan Kependudukan Tahun 2011-2014

NO .	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kepemilikan KTP					
	Prenstase Jumlah Penduduk yang Mempunyai KTP	%	85,90	86,90	96,17	97,48
2.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran					
	Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di Tahun Bersangkutan	Orang	141,321	15,235	15,235	21,276
	Jumlah Penduduk wajib KTP	Orang	12,600	12,600	12,600	12,600

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Gresik, 2014

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk memberikan peluang yang sama kepada perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu peran serta perempuan dalam pembangunan harus selalu ditingkatkan.

Anak sebagai unsur masyarakat harus dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya. Pemerintah kabupaten harus dapat memastikan tidak terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Karena beberapa alasan masih sering

dijumpai orang tua yang mempekerjakan anak-anak untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.

Tabel II.24.
Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A					
	Jml pengaduan/laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	kasus		224	208	158
	Jml laporan/pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu	kasus		224	208	158
2	Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan					
	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Orang		224	137	84
	Jumlah anak korban kekerasan	Orang		224	137	89
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum					
	Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum	Orang		148	159	98
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang		148	159	98
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit					
	Jumlah Korban yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang				60
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan kesehatan	Orang				60

5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi					
	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi	Orang		7	5	4
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan rehabilitasi	Orang		7	5	4
6	Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi					
	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi	Unit		2	4	4
	Jumlah lembaga perempuan dan anak	Unit		7	7	7

k. Keluarga Berencana

Hasil pelaksanaan urusan keluarga berencana difokuskan pada pelayanan kepada kepesertaan program Keluarga Berencana. Program ini oleh masyarakat sangat dirasakan manfaatnya karena mampu membantu mereka dalam merencanakan kehidupan keluarganya. Selain pelayanan program KB, yang dilaksanakan adalah melakukan pembinaan keluarga agar kualitas kehidupan dalam keluarga semakin baik. Masih tingginya keluarga miskin yang ada di masyarakat mendorong upaya yang lebih baik dari pemerintah untuk menguranginya.

Tabel II.25.
Pelayanan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Prevalensi peserta KB Aktif					
	Jumlah peserta program KB aktif	Orang		180,279	183,152	185,122
	Jumlah pasangan usia subur	Orang		231,583	232,768	235,028
2	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun					

	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Orang		2,752	2,250	2,294
	Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang		228,831	232,768	235,028
3	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)					
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Orang		27,624	43,040	28,534
	Jumlah PUS	Orang		228,831	232,768	235,028
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)					
	Anggota BKB ber KB			12,693	5,458	11,743
	Seluruh PUS Anggota BKB			15,568	16,045	12,562
5	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan					
	Rekap Data Mikro Kelurga Desa/Kelurahan			356	356	356
	Jumlah Desa Kelurahan			356	356	356

Sumber Data : Badan KB dan PP Kab. Gresik, 2014

I. Sosial

Tabel II.26
Gambaran Urusan Sosial Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	buah	17	17	17	17
2.	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	PMKS	415	421	1.258	1.281
3	Jumlah PMKS	Jiwa	71.411	41.526	40.268	38.987

m. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Pemerintah kabupaten harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan baik melalui fasilitasi maupun pembangunan di daerah. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan *JOB FAIR* yang bekerjasama dengan perusahaan - perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik dalam upaya untuk memberikan kesempatan peluang kerja.

Tabel II.27.
Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja					
	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	orang	612,073	862,073	692,750	592.569
	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	orang	1,270,351	1,270,351	1,030,702	930.851
2	Penempatan para pencari kerja					
	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	887	1,105	2,152	2.297
	jumlah pencari kerja yang mendaftar	orang	2,906	3,301	7,482	2.762
3	Jumlah pengangguran penduduk usia 15 keatas yang termasuk angkatan kerja					
	jumlah pengangguran usia 15 tahun keatas	orang	26,664	37,473	27,599	19,507
	jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	orang	612,073	557,623	612,321	592,569
4	Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja					

	jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3	Buah	593	747	681	846
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1,010	1,060	1,134	1.232
5	Kepatuhan terhadap norma kerja					
	Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja	Buah	585	928	849	1.193
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1,010	1,060	1,134	1.232
6	Kepatuhan terhadap norma jaminan social tenaga kerja					
	Jumlah perusahaan yang memenuhi norma jamsostek	Buah	1,005	1,010	1,065	1.205
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1,010	1,060	1,134	1.232
7	Angka nihil kecelakaan kerja					
	Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja	Buah	9	30	39	64
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1,010	1,060	1,134	1,232
8	Penuntasan / penyelesaian perselisihan hubungan industrial					
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P	Kasus	70	79	79	83
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans	Kasus	80	91	95	94
9	Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama					

	Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Buah	87	117	92	99
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1,010	1,060	1,134	1,232
10	Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama Bipartit					
	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit	Buah			101	119
	Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit	Buah			485	505

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, 2014

n. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Hasil dari pelaksanaan urusan koperasi dan UMKM adalah kemampuan daerah untuk menggerakkan usaha yang berbasis kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil. Keberpihakan pemerintah kepada sektor ini akan mampu meningkatkan jumlah dan kemampuan usahanya. Pada tahun 2014 jumlah koperasi dan koperasi aktif serta jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan.

Tabel II.28.
Pelayanan Urusan Koperasi Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koperasi aktif					
	Jumlah Koperasi aktif		856	965	974	991
	Jumlah seluruh koperasi		1050	1059	1070	1088
2.	Usaha mikro dan kecil					
	Jumlah usaha mikro dan kecil		26,162	35,010	36,361	165,616

	Jumlah seluruh UKM		36,525	36,650	36,774	171,316
3.	Koperasi yang mendapatkan penilaian baik					
	Jumlah koperasi yang mendapat penilaian baik tahun ini		139	152	192	229
	Jumlah seluruh koperasi		184	197	242	279

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik, 2014

o. Penanaman Modal

Hasil dari pelaksanaan urusan penanaman modal adalah meningkatnya nilai penanaman modal di daerah. Penanaman modal di daerah terdiri dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal setempat/lokal. Ketiga jenis penanaman modal ini akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kabupaten secara keseluruhan.

Tabel II.29.
Pelayanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN					
2.	Ijin Lokasi					
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	34	54	40	62
	Jumlah permohonan ijin	Buah	36	60	62	60
3.	Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)					
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	12	13	15	18
	Jumlah permohonan ijin	Buah	18	13	20	23
4.	Ijin Gangguan (HO)					

	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	146	170	123	83
	Jumlah permohonan ijin	Buah	185	218	162	120
5.	Ijin Mendirikan Bangunan					
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	494	404	739	421
	Jumlah permohonan ijin	Buah	547	536	700	630
6.	Ijin Prinsip					
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	100	190	206	212
	Jumlah permohonan ijin	Buah	120	210	263	267
7.	Ijin Usaha					
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	34	244	58	52
	Jumlah permohonan ijin	Buah	36	253	62	52

p. Budaya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan budaya adalah terpeliharanya seni dan budaya daerah sebagai kekayaan budaya daerah. Oleh karena itu festival seni yang secara rutin dilaksanakan serta sarana budaya yang mencukupi menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah kabupaten. Selain itu benda-benda cagar budaya yang ada juga harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.

Tabel II.30.
Pelayanan Urusan Budaya Tahun 2012-2014

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12 kali	9 kali	49
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 buah	4 buah	5
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			
	- Benda Cagar Budaya	372	372	372
	- Situs	26	26	26
	- Kawasan Cagar Budaya	4	4	4

Sumber Data Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2014

q. Pemuda dan Olah Raga

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan pemuda dan olah raga adalah meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda di daerah. Peningkatan prestasi olahraga harus didukung dengan pembinaan dan penyediaan sarana olahraga yang memadai. Sedangkan untuk pembinaan pemuda diharapkan pemerintah kabupaten dapat menyediakan aktivitas yang positif bagi pemuda yang ada.

Tabel II.31.
Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012-2014

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014
1.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	3	4
2.	Lapangan olahraga	127	127	127

Sumber Data : Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2014

r. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel II.32.
Gambaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012-2014

KANTOR SATPOL PP

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Konflik yang dapat diselesaikan					
	Jumlah konflik yang diselesaikan	Perkara		48	51	142
	Jumlah konflik yang ada	Perkara		50	51	142
2	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik					

3	Demo / protes terhadap Perda/Perbup					
	Jumlah demo yang tertib	kali			12	8
	Jumlah demo	kali			12	8
4	Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum					
5	Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras					Ada
	a. Target	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
	b. Realisasi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
	Capaian (b:a) x 100	ada/tidak	100	100	100	100
6	Rasio Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 penduduk)					
	Jumlah personil Satpol PP	Orang			154	692
	Jumlah penduduk	Orang			1.324.777	1.319.314

Sumber Data : Lkpj Amj Gresik, 2014

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel II.33.
Gambaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Perda yang ditetapkan					
	Jumlah Perda yang yg ditetapkan dalam 1 tahun	Perda	32	70	89	92
2	Jumlah Perda Yang dibatalkan					
	Jumlah Perda yang dibatalkan dalam 1 tahun	Perda	0	0	0	0
3	Keputusan Bupati					

	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan		38	1299	969
	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan		30	1299	969
4	Kasus hukum yang diselesaikan					
	Jumlah kasus hukum dalam 1 tahun	Kasus	6	5	20	5
	kasus Hukum yang diselesaikan	Kasus	6	5	20	5
5	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti					
	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan		38	57	38
	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan		38	57	38
6	Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti					
	Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Kasus	408	417	435	435
	Jumlah temuan	Kasus	408	417	435	435
7	Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi					
	Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	Buah	53	56	56	56
	jumlah LAKIP keseluruhan	Buah	53	56	56	56
8	Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti					
	Jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Buah	44	79	77	80
	Jumlah informasi masyarakat yang masuk	Buah	50	50	77	82
9	Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku wakil Pemerintah					
	Jumlah Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah selama 1 Tahun	Kali	34	34	34	34
10	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (IKK LPPD)	Baik / Cukup / Kurang	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
11	Opini laporan keuangan					
	opini yang diberikan atas LKPD oleh BPK	WTP/WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

12	Laporan keuangan tersusun tepat waktu	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
13	APBD ditetapkan tepat waktu	tepat/tidak	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
14	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA
15	Peningkatan PAD					
	PAD Tahun Ini	Rupiah	273,975,9 92,140.13	427,580 ,866,65 7.55	502,767, 029,947. 17	700,587 ,792,87 7.47
16	Keberadaan kemandirian daerah					
	Jumlah PAD				502,796 ,031,99 6.17	700,587 ,792,87 7.47
	Jumlah APBD				1,840,5 85,216, 921.17	2,206,3 85,836, 981.47
17	Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan)					
	Aset bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan	Buah			1,305	1,305
	Jumlah seluruh aset bangunan	Buah			1,323	1,323
18	Perusahaan daerah dalam kondisi sehat	Buah	3	3	3	3
19	Voting yang dilakukan dalam sidang Paripurna					
	Jumlah pengambilan keputusan melalui voting	Kali		2	1	0
	Jumlah sidang paripurna dalam tahun ini	Kali		4	17	35
20	Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Ranperda					
	Jumlah Ranperda yang melibatkan masyarakat	Perda	5	10	9	6
	Total Ranperda	Perda	15	10	9	6
21	Perda inisiatif DPRD					
	Jumlah Perda yang telah disahkan atas usul inisiatif DPRD	Perda	10	20	28	33
22	Rasio Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya					

	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	Orang	516	636	748	744
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934
23	Rasio Jabatan yang terisi					
	Jabatan yang terisi	Orang	809	864	886	936
	Jumlah jabatan	Orang	893	931	1,038	1,050
24	Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal					
	Jumlah pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formalnya	Orang	809	864	886	934
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934
25	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan					
	Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Orang	809	864	886	934
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934
26	Kesesuaian STOK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang STOK	%	100	100	100	100
27	Persen-tase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan	%	0.00	40.00	100.00	100.00
28	Jumlah MOU Kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga	Buah	0	16	18	22
29	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30	Keberadaan Unit pelayanan pengadaan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
31	Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Orang	-	78	94	44

Sumber Data : Lkpj Amj Gresik, 2014

u. Ketahanan Pangan

Tabel II.34
Gambaran Urusan Ketahanan Pangan
Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Regulasi Ketahanan Pangan	ada/tidak	tidak ada	ada	ada	ada
2	Rata-rata konsumsi bahan pangan utama	Kg/Kapita /Tahun	94.35	95.40	94.80	91.32
3	Ketersediaan pangan utama	Kg/Kapita /Tahun	193.93	201.3	191	176.36

Sumber Data : LKPJ AMJ Kab. Gresik, 2014

t. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa, masyarakat di Kabupaten Gresik telah dilibatkan secara penuh pada kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti dan Driyorejo yang tersebar pada 103 Desa/Kelurahan serta PNPM Mandiri Pedesaan di 13 Kecamatan.

Tabel II.35.
Gambaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	PKK aktif					
	Jumlah PKK aktif	Orang	43,762	43,762	43,762	43,762
	Jumlah PKK	Orang	43,762	43,762	43,762	43,762
2.	Posyandu					
	Jumlah Posyandu Aktif	Buah	1,444	1,444	1,444	1,444
	Total Posyandu	Buah	1,444	1,444	1,444	1,444
3.	Persentase keluarga miskin					
	Jumlah keluarga miskin	Orang	181,700	173,800	170,900	179,192
	Jumlah seluruh keluarga	Orang	1,270,351	1,307,995	1,324,777	1,319,314

Sumber Data : Bapemas Kab. Gresik, 2014

u. Statistik

Tabel II.36
Gambaran Urusan Statistik
Tahun 2012-2014

NO .	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Keberadaan Dokumen "Gresik Dalam Angka"	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Keberadaan Dokumen PDRB	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Keberadaan Dokumen IPM	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2014

v. Kearsipan dan Perpustakaan

Hasil pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan diukur melalui pelayanan terhadap ketersediaan bahan bacaan pada perpustakaan umum maupun keberadaan perpustakaan sekolah dan desa. Keberadaan perpustakaan ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sedangkan urusan kearsipan ditujukan untuk membangun sistem kearsipan yang aman dan handal sehingga seluruh arsip pemerintah dapat terjamin keamanan dan keandalannya.

Tabel II.37.
Gambaran Urusan Perpustakaan
Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	buku	98,312	105,712	124,355	139,555
2	Pengunjung Perpustakaan	Orang	1,125,000	1,307,995	1,371,507	1,074,695
3	Jumlah Anggota Perpustakaan	Orang	21,466	22,592	23,287	24,266
4	jumlah instansi yang telah menerapkan arsip secara baku	413	413	413	413	413

Sumber Data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Gresik, 2014

w. Komunikasi dan Informatika

Fokus pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah menyediakan media informasi dan komunikasi oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sarana komunikasi dan informatika diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat diminalisasikan kesenjangan informasi.

Tabel II.38.
Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2012-2014

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014
1.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada
2.	Pameran/expo	7 kali	30 kali	30 kali
3.	Jumlah Pengunjung Website	665,113 netter	716.907 netter	716.907 netter
4.	Sistem Informasi Manajemen	27 SIM	30 SIM	30 SIM

Sumber Data : Bagian PDTI Setda Kab. Gresik, 2014

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

Analisis kinerja layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola dan mengeksploitasi laut bagi kemakmuran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan budidaya, perairan umum maupun kelautan akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Meningkatnya produksi perikanan ini akan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan gizi masyarakat.

b. Pertanian dan Kehutanan

Urusan pertanian dan kehutanan dikelola untuk meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan

masyarakat. Sedangkan untuk kehutanan selain meningkatkan produksi hasil hutan, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah melakukan konservasi dan memelihara fungsi hutan sebagaimana mestinya.

Tabel II.39.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian (juta Rp.)	3.962.924,99	4.455.821,43	5.010.794,57	1.605.677,02
2.	Jumlah PDRB (juta Rp.)	44.082.564,57	50.185.435,99	57.209.069,73	65.609.306,73
3.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	8,98%	8,88%	8,76%	2,4%

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik, 2014

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari sektor pertanian pada Tahun 2011-2013 menempati urutan ke 3 setelah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Tabel II.40.
Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

No	Uraian	Satuan	2013	2014
1	Padi	Ton	376.535	395.594
2	Jagung	Ton	135.287	131.767
3	Kedelai	Ton	1.368	1.952
4	Kacang Tanah	Ton	5.029	3.451
5	Kacang Hijau	Ton	2.792	2.911
6	Ubi kayu	Ton	13.526	14.854
7	Ubi Jalar	Ton	3.193	3.104
	JUMLAH	Ton	537.730	553.633

*Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik
Tahun 2015*

c. Perindustrian dan Perdagangan

Urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan melalui regulasi dan stimulasi terhadap kegiatan ekonomi khususnya dari perindustrian dan perdagangan. Pembinaan terhadap industri kecil dan menengah menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten. Sedangkan penyediaan sarana perdagangan dan pasar komoditas akan mampu meningkatkan volume perdagangan.

Tabel II.41.
Pelayanan Urusan Industri Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan industri					
	Jumlah Industri tahun ini- Jumlah Industri tahun lalu	Buah	68	76	82	74
	Jumlah Industri s.d. tahun lalu	Buah	6,225	6,293	6,369	6,451
2.	Pertumbuhan nilai produksi					
	Jumlah Nilai produksi th ini - jumlah nilai produksi th lalu	Buah	435	554	682	819
	jumlah nilai produksi th lalu	Buah	21,752	22,187	22,741	23,423

Tabel II.42.
Pelayanan Urusan Perdagangan Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan Penerbitan SIUP					
	Jumlah Penerbitan SIUP Tahun ini	Buah	973	1,041	1,166	1,348
	Jumlah penerbitan SIUP pada th. ini – jmlh Penerbitan SIUP th. Lalu	Buah		68	125	182
	Jumlah Penerbitan SIUP s.d. th. lalu	Buah		973	1,041	1,166
2.	Pertumbuhan penerbitan TDP					
	Jumlah Ijin Tahun ini	Buah	1,054	1,315	1,704	1,750
	Jumlah penerbitan TDP pada th. ini – jmlh Penerbitan TDP th. Lalu	Buah		261	650	696

	Jumlah Penerbitan TDP s.d. th. lalu	Buah		1,054	1,315	1,704
3.	Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Gudang TDG					
	TDG Tahun ini	Buah	29	47	49	58
	Jumlah penerbitan TDG pada th. ini – jmlh Penerbitan TDG th. Lalu	Buah		18	2	9
	Jumlah Penerbitan TDG s.d. th. lalu	Buah		29	47	49
4.	Pertumbuhan nilai investasi perdagangan					
	Jumlah Nilai Investasi Tahun ini	Rp.	367,421,000	907,559,000	2,318,129,600	6,936,522,000
	Jumlah nilai Investasi pd Th ini - Jumlah investasi pd tahun lalu	Rp.		540,138,000	1,410,570,600	4,618,392,400
	Jumlah nilai investasi pd tahun lalu	Rp.		367,421,000	907,559,000	2,318,129,600
5.	Jumlah Pameran /Ekspo Per Tahun	Buah	4	4	30	40

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindag dan UKM Kab. Gresik, 2014

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 pertumbuhan Industri sebesar 1,2% sedangkan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 4%. Untuk pertumbuhan nilai produksi juga mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2012 sebesar 2,5% meningkat menjadi 3% pada Tahun 2013.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kemampuan ekonomi daerah dianalisa melalui pendapatan daerah yang dianggarkan dan direalisasikan setiap tahun anggaran untuk digunakan guna membiayai program-program pembangunan. Berdasarkan rekapitulasi target pendapatan daerah selama Tahun 2011 s.d. 2014 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah sangat baik sebagaimana digambarkan pada tabel berikut;

Tabel II.43.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang (Rp)
2011	1.294.448.080.704,48	1.329.150.833.376,13	102,68	34.702.752.671,65
2012	1.556.273.473.722,33	1.650.595.497.662,55	106,06	94.322.023.940,22
2013	1.855.532.965.319,56	1.840.556.214.829,17	99,19	-14.976.750.490,39
2014	2.230.155.528.034,68	2.206.389.315.225,47	98,93	-23.766.212.810,21
Jumlah	6.936.410.047.781,05	7.026.691.861.093,32	101,30	90.281.813.311,27

Sumber : DPPKAD Kab. Gresik Tahun 2015

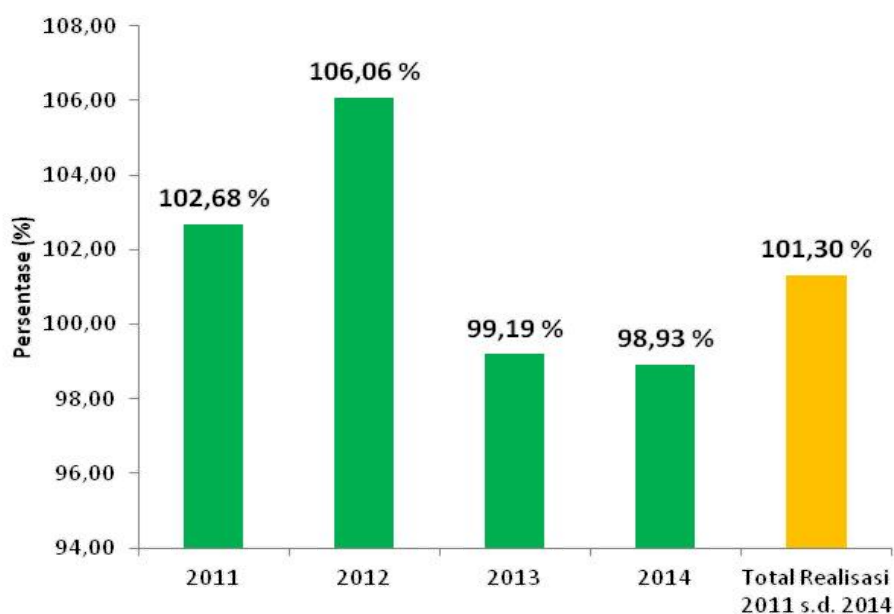
Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan daerah dari Tahun 2011 s.d. 2014 meningkat sebesar Rp877.238.481.849,34 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) atau meningkat 66%. Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah per tahun mencapai 18,52%.

Sedangkan target pendapatan daerah Tahun 2015 sebesar Rp2.484.678.421.337,00 (dua trilyun empat ratus delapan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), realisasinya sampai dengan 28 Pebruari 2015

sebesar Rp307.367.304.927,89 (tiga ratus tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sembilan sen) atau 12,37%.

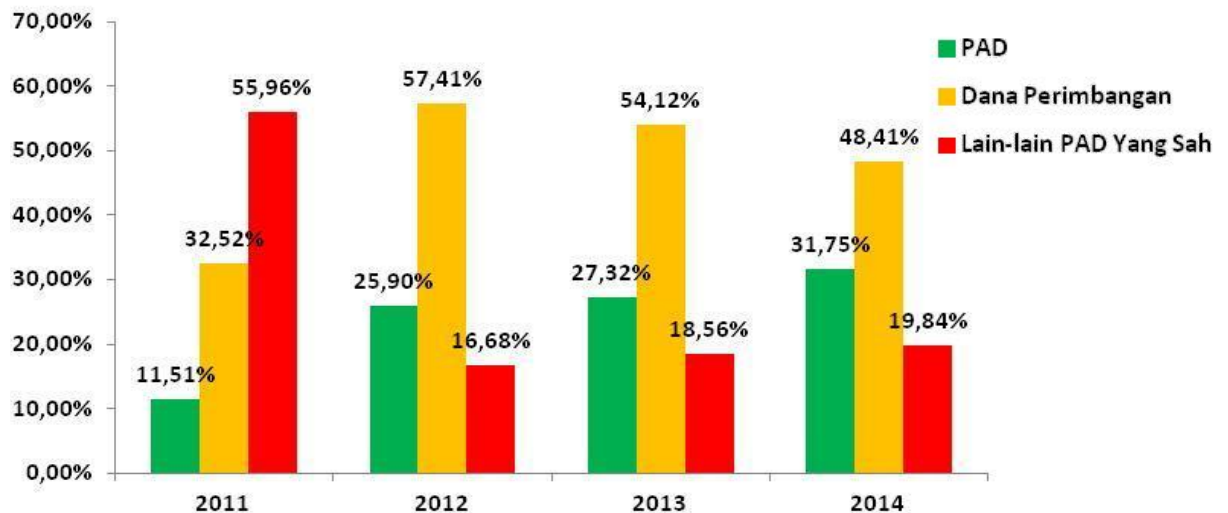
Sementara itu, total realisasi pendapatan Tahun 2011 s.d. 2014 dibandingkan dengan target pendapatan daerah Tahun 2011 s.d. 2014 mencapai 101,30%. Capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2014 digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Gambar II.6
Grafik Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014



Adapun proporsi dan komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun 2011 s.d. 2014, dapat dilihat pada Grafik berikut:

Gambar II.7
Grafik Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014



Tabel II.44.
Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten
Gresik Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun (Rp.)			
	2011	2012	2013	2014
PAD	273.975.992.140,13	427.580.866.657,55	502.767.029.904,17	700.587.792.877,47
Dana Perimbangan	772.487.164.476,00	947.619.650.810,00	996.197.113.935,00	1.065.300.023.150,00
Lain-lain PAD yang Sah	282.687.676.760,00	275.394.980.195,00	341.592.070.990,00	440.501.499.198,00
Total	1.329.150.833.376,13	1.650.595.497.662,55	1.840.556.214.829,17	2.206.389.315.225,47

Sumber : DPPKAD Kab. Gresik Tahun 2015

2.1.4.2 FOKUS INFRASTRUKTUR

Ketersediaan infrastruktur Kabupaten Gresik sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menarik investor, meningkatkan produksi dan memperlancar distribusi, hingga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, Ketersediaan infrastruktur merupakan modal yang penting terutama dalam menghadapi persaingan di tingkat regional dalam Perdagangan bebas dengan persaingan yang kompetitif di tingkat Asia Tenggara yang dibingkai dalam koridor Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Gresik yang mendukung daya saing Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Jalan Lingkar dan Lapangan Terbang Perintis Pulau Bawean.
- b. Jalan Tol Surabaya – Gresik .
- c. Jalan Tol Surabaya – Mojokerto melewati wilayah Gresik.
- d. Jalan Nasional sebagai jalan Arteri primer (Surabaya – Gresik – Lamongan)
- e. Jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer (Gresik – Sadang lewat Pantura / Jl. Daendels).
- f. Jalan Propinsi sebagai jalan Kolektor Primer (Legundi – Bunder, Lakarsantri – Bringkang, Wringinanom – Driyorejo – Surabaya).
- g. Tersedianya Air Bersih PDAM.
- h. Tersedianya Energi Listrik dan gas.
- i. Tersedianya 1 Pelabuhan Umum dan 7 Pelabuhan khusus.
- j. Bendung Gerak Sembayat.

Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresik, antara lain:

- a. Jalan Tol Surabaya- Mojokerto.
- b. Jalan Tol Gresik – Tuban.
- c. Jalan Tol Bunder – Legundi.
- d. Jalan Lingkar Barat Surabaya.
- e. Pengembangan Air Bersih Untuk Kecamatan Kota dari sumber air Umbulan, untuk Wilayah Gresik Utara kebutuhan air baku/bersih dari Bendung Gerak Sembayat.
- f. Pengembangan penyediaan gas untuk wilayah perkotaan, Gresik Utara dan Gresik Selatan.
- g. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan.
- h. Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Kali Mireng.
- i. Rencana pembangunan TPA di wilayah Gresik Selatan dan Utara.
- j. Pengembangan Kawasan Perumahan Terpadu di Gresik Selatan.
- k. Penataan Kawasan Pesisir Terpadu.
- l. Stadion Bukit Lengis bertaraf Internasional.

Selain daya saing di bidang infrastruktur, Kabupaten Gresik juga memiliki keunggulan daya saing di bidang sosial budaya di Kabupaten Gresik, antara lain :

1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Gresik relatif tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Potensi pariwisata yang khas seperti Pulau Bawean dan wisata Religi Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim ditunjang kondusifitas keamanan dan ketertiban sosial.
3. Tersedianya RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang termasuk Rumah Sakit Tipe B dengan seluruh instalasinya berstandar ISO, yang menjadi rujukan pasien di wilayah Pantura, ditunjang dengan 5 Rumah Sakit Swasta, 32 Puskesmas dan 77 Puskesmas Pembantu.

2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Kabupaten Gresik memberikan kontribusi investasi bagi investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan program strategis. Perkembangan investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2010 sampai dengan 2014 terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Gresik cukup kondusif dengan di dukung pelayanan perijinan yang baik, jaminan keamanan dan ketersediaan sarana prasarana infrastruktur yang memadai.

Tabel II. 45.
Perkembangan Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
Jumlah Investasi PMDN				
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016				II- 54

2010	15		16	675.208.000.000
		1.796.671.600.000		
2011	98	3.132.892.000.000	34	1.285.625.500.00
				0
2012	162		96	3.292.566.000.00
		18.987.306.900.00		0
		0		
2013	198	15.445.440.600.00	127	4.794.719.000.00
		0		0
2014	191		65	8.998.738.400.00
		10.145.624.300.00		0
		0		

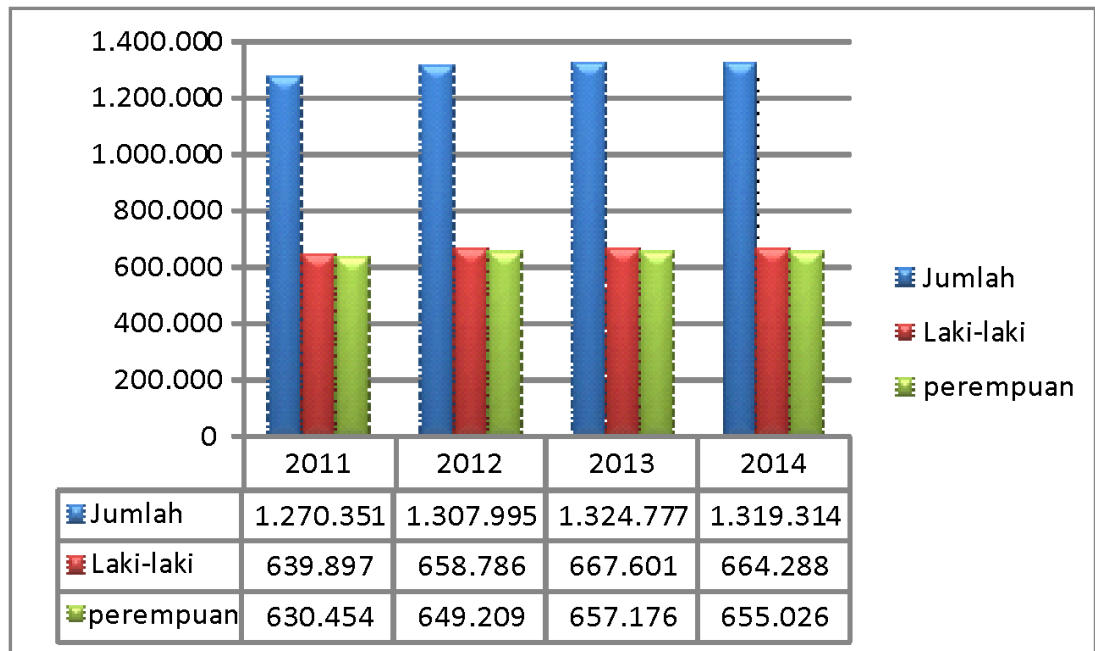
Jumlah Investasi PMA

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	JumlahProyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)
2010	11	296.145,3	19	436.818,5
2011	44	1.449.511,2	38	138.956,5
2012	17	321.557,1	108	715.790,7
2013	14	93.116,3	102	842.750,3
2014	17	165.741,3	63	171.921,6

2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir Tahun 2014 sebanyak 1.319.314 jiwa yang terdiri dari 664.288 laki-laki dan 655.026 perempuan, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 1.270.351. Dengan demikian, kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 48.963 jiwa atau dengan laju pertumbuhan 1,28% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada tabel gambar berikut ini:

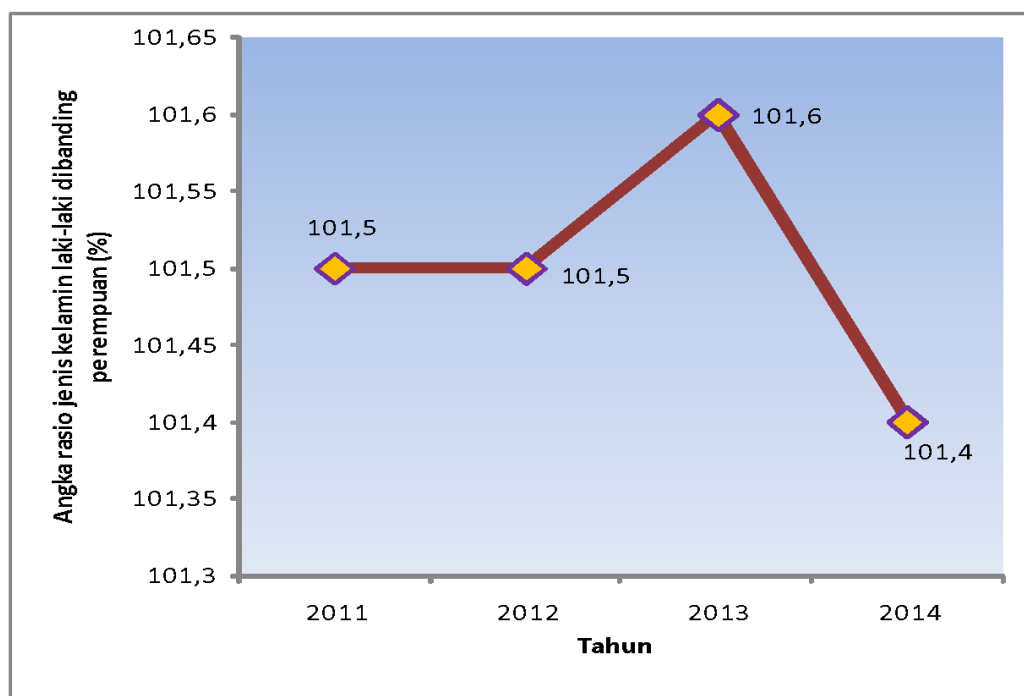
Gambar II.8
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014 (Jiwa)



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun 2011-2014 menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir berimbang, terbesar pada tahun 2013 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102, ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki sedangkan terendah pada tahun 2014 dengan rasio jenis kelamin sebesar 101 ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

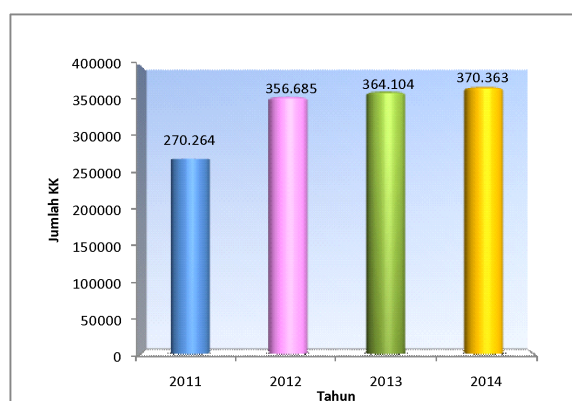
Gambar II.9
Grafik Perkembangan Angka Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki dibanding
Perempuan (%) Tahun 2011-2014



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015

Pada tahun 2011 jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebanyak 270.264 keluarga sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 370.363 keluarga, sehingga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 100.009 keluarga atau naik 12,33% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.10
Grafik Perkembangan Jumlah KK di Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65

tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Gresik dari Tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel II.46
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

No	Uraian	Satuan	TAHUN			
			2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk	orang	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314
2	Jumlah Penduduk usia muda (0-14) tahun dan diatas 65 tahun	orang	395.905	429.777	423.175	388.463
3	Jumlah penduduk usia kerja (15-64) tahun	orang	874.446	878.218	901.602	930.851
4	Rasio Ketergantungan	%	45,27	48,94	46,94	41,73

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD

Penilaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2014 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa capaian kinerja dikategorikan sebagai berikut :

Tabel II.47.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berupa urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik 2011-2015 sebagai berikut :

Misi pertama

"Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri".

Penyelenggaraan Misi Pertama diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis yang diindikasikan dengan menurunnya angka kriminalitas serta gangguan ketentraman dan ketertiban. Misi ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan. Penilaian indikator kinerja sasaran untuk misi kesatu, diketahui bahwa dari 19 indikator, 18 indikator bernilai "Sangat Tinggi" dan 1 indikator bernilai "Sedang"

Misi kedua

"Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik".

Implementasi dari misi kedua ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Perumahan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Statistik, dan Transmigrasi. Penilaian kinerja untuk misi kedua bahwa dari 61 indikator kinerja, 58 indikator bernilai Sangat Tinggi dan 3 indikator bernilai Tinggi

Misi ketiga

"Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan".

Dalam rangka pelaksanaan misi ketiga ini, diselenggarakan urusan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, perhubungan, ketenagakerjaan, pariwisata, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral. Penilaian kinerja untuk Misi ketiga, bahwa dari 77 indikator kinerja, 65 indikator bernilai Sangat tinggi, 4 indikator bernilai Tinggi, 7 indikator bernilai Sedang, dan 1 indikator bernilai Sangat Rendah.

Misi Keempat

"Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya".

Pelaksanaan misi keempat ini didukung oleh penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, serta Pemuda dan Olah Raga. Penilaian kinerja untuk Misi keempat, bahwa dari 55 indikator kinerja, 45 indikator bernilai Sangat Tinggi, 6 indikator bernilai Tinggi, dan 4 indikator bernilai Sedang.

Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.48.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun
2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Siswa	21.209	39.212	39.220	40.398		
	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Siswa	38.563	62.170	56.531	47.291		
	a. Target	%	55,00	64,00	73,00	84,50	93,50	
	b. Realisasi	%	55,00	63,07	69,38	85,42		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	98,55	95,04	101,09		
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)							
	Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis	Orang	661.927	846.674	976.448	1,014,458		
	Penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	661.927	846.674	976.448	1,014,458		
	a. Target	%	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian (b : a) X 100%	%	142,86	125,00	111,11	105,26		
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A							
	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	114.980	115.801	116.224	116.585		
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Siswa	117.444	118.138	117.938	118.146		
	a. Target	%	92,50	94,20	95,30	95,70	100,00	
	b. Realisasi	%	97,90	98,02	98,55	98,68		
	Capaian (b : a) X 100%	%	105,84	104,06	103,41	103,11		
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B							
	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	50.461	50.458	48.859	50.164		
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Siswa	63.027	58.954	57.081	58.580		
	a. Target	%	73,00	74,30	74,70	75,40	77,60	
	b. Realisasi	%	80,06	85,59	85,6	85,63		
	Capaian (b : a) X 100%	%	109,67	115,20	114,59	113,57		
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C							
	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Siswa	34.031	35.708	36.380	39.452		
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Siswa	60.335	54.914	55.914	53.309		
	a. Target	%	63,70	71,00	78,30	85,60	92,50	
	b. Realisasi	%	56,40	65,03	65,06	74,01		
	Capaian (b : a) X 100%	%	88,55	91,58	83,10	86,46		

6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI							
	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI	Siswa	93	59	82	27		
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI	Siswa	126.615	127.990	127.292	127,637		
	a. Target	%	0,03	0,028	0,026	0,025	0,02	
	b. Realisasi	%	0,07	0,05	0,06	0,02		
	Capaian: $a - (b - a) \times 100\%$	%	233,33	178,57	230,77	120,00		
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs							
	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Siswa	135	94	71	47		
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs	Siswa	35.071	54.247	56.217	58,580		
	a. Target	%	0,25	0,2	0,15	0,1	0,03	
	b. Realisasi	%	0,38	0,17	0,13	0,08		
	Capaian: $a - (b - a) \times 100\%$	%	153,97	85,00	86,67	120,00		
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA							
	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	188	195	150	119		Ketika ada peluang bekerja siswa lebih memilih bekerja
	Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	42.992	45.360	46.429	47,332		
	a. Target	%	0,49	0,40	0,30	0,200	0,1	
	b. Realisasi	%	0,44	0,43	0,32	0,25		
	Capaian: $a - (b - a) \times 100\%$	%	89,80	107,50	106,67	75,00		
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI							
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	19.307	18.950	20.819	20,356		
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	19.307	18.950	20.819	20,356		
	a. Target	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian ($b : a$) X 100%	%	100,01	100,00	100,00	100,00		
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs							
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	16.587	17.531	17.548	16,007		
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	16.587	17.531	17.548	16,007		
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian ($b : a$) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA							
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	14.015	11.997	12.898	13,633		
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	14.015	11.997	12.898	13,633		
	a. Target	%	92,00	94,00	96,00	98,00	99,90	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian ($b : a$) X 100%	%	108,70	106,38	104,17	102,04		

12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs							
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	17.791	17.940	19.855	19,707		
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	Siswa	19.050	19.050	20.819	20,356		
	a. Target	%	93,39	94,79	96,79	97,39	99,90	
	b. Realisasi	%	93,39	94,17	95,37	96,81		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	99,35	98,53	99,40		
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA							
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	15.031	15.687	15.509	15,925		
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	Siswa	17.278	17.295	17.293	16,007		
	a. Target	%	86,00	90,00	93,00	97,00	99,90	
	b. Realisasi	%	87,00	90,70	89,68	99,49		
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,16	100,78	96,43	102,57		
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Guru	15.922	18.779	15.509	19,351		
	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	19.580	22.392	12.803	19,774		
	a. Target	%	86,00	90,00	93,00	97,00	100,00	
	b. Realisasi	%	81,32	83,65	88,62	97,86		
	Capaian (b : a) X 100%	%	94,56	92,94	95,29	100,89		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	1.377,28	1.370,08	1.354,32	1.356,74		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	98,38	97,86	96,74	96,91		

Tabel II.49.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJE LASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4							
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuai standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Ibu Hamil		18.911	18.803	19.305		
	Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Ibu Hamil		22.918	22.774	22.630		
	a. Target	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
	b. Realisasi	%	87,58	82,52	82,56	85,31		
	Capaian (b : a) X 100%	%	96,24	89,69	88,78	90,75		

2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani							
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Komplikasi		5.758	4.467	4.572		
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Komplikasi		4.584	4.555	4.526		
	a. Target	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	b. Realisasi	%	68,16	125,61	98,07	101,02		
	Capaian (b : a) X 100%	%	85,20	157,01	122,59	126,27		
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan							
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang		19.462	19.432	19.411		
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang		21.876	21.739	21.601		
	a. Target	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
	b. Realisasi	%	98,45	88,97	89,39	89,86		
	Capaian (b : a) X 100%	%	108,19	96,70	96,12	95,60		
4.	Cakupan pelayanan nifas							
	Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang		19.104	19.074	19.291		
	Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang		21.876	21.739	21.601		
	a. Target	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
	b. Realisasi	%	97,13	87,33	87,74	89,31		
	Capaian (b : a) X 100%	%	106,74	94,92	94,35	95,01		
5.	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani							
	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Neonatus		1.795	1.845	1.754		1. Kurang nya kompetensi petugas
	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Neonatus		3.063	3.048	3.038		2. Sarana prasara na di fasilitas keseha tan kurang lengkap
	a. Target	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	b. Realisasi	%	33,10	58,60	60,53	57,74		
	Capaian (b : a) X 100%	%	41,38	73,25	75,66	72,17		
	Cakupan pelayanan anak balita							

	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bayi		56.756	58.571	61.848	
	Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Bayi		86.595	85.300	83.415	
	a. Target	%	61,00	69,00	77,00	85,00	90,00
	b. Realisasi	%	59,52	65,54	68,66	74,14	
	Capaian (b : a) X 100%	%	97,57	94,99	89,17	87,23	
7	Cakupan kunjungan bayi						
	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bayi		19.218	19.409	19.862	
	Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Bayi		20.417	20.320	20.252	
	a. Target	%	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
	b. Realisasi	%	94,10	94,13	95,52	98,07	
	Capaian (b : a) X 100%	%	112,02	109,45	108,54	108,97	
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)						
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa		329	302	330	
	Jumlah seluruh Desa / Kelurahan	Desa		356	356	356	
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	%	71,91	92,42	84,83	92,70	
	Capaian (b : a) X 100%	%	71,91	92,42	84,83	92,70	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+)						
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang		775	738	736	
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang		1.213	1.317	1.335	
	a. Target	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	b. Realisasi	%	56,68	63,89	56,04	55,13	
	Capaian: a - (b - a)/a x 100 %	%	129,15	120,14	129,95	131,09	
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD						
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang		357	618	262	
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang		357	618	262	
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	

11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin						
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1	Orang		153.096	242.840	239.184	
	Jumlah seluruh maskin di Kabupaten	Orang		271.108	441.851	441.851	
	a. Target	%	70,00	65,00	60,00	55,00	50,00
	b. Realisasi	%	56,84	56,47	54,96	54,13	
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	118,80	113,12	108,40	101,58	
12	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan						
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita		261	214	194	
	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Balita		261	214	194	
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capaian $(b : a) \times 100\%$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Cakupan balita yang mendapat vitamin A						
	Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita		81.694	97.174	98.140	
	Jumlah seluruh balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita		95.521	105.620	103.668	
	a. Target	%	90,00	90,0	90,00	90,00	90,00
	b. Realisasi	%	92,56	85,52	92,00	94,67	
	Capaian $(b : a) \times 100\%$	%	102,84	95,03	102,23	105,19	
14	Persentase Rumah Sehat						
	Rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Buah		158.407	209.286	226.952	
	Jumlah rumah yang ada	Buah		224.787	266.337	272.024	
	a. Target	%	78,00	81,00	83,00	85,00	86,00
	b. Realisasi	%	67,85	70,47	78,58	83,43	
	Capaian $(b : a) \times 100\%$	%	86,99	87,00	94,67	98,15	
15	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan						
	Jumlah item obat yang ketersediaannya $\geq 100\%$	Buah		259	258	275,00	
	Jumlah total item obat yang ada	Buah		269	264	296,00	
	a. Target	%	97,69	98,08	98,08	98,46	98,46
	b. Realisasi	%	96,95	96,28	97,73	92,91	
	Capaian $(b : a) \times 100\%$	%	99,24	98,17	99,64	94,36	
	Pengadaan obat esensial						

	Jumlah item obat esensial yang dapat disediakan	Buah		240	249	268	
	Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan	Buah		250	255	288	
	a. Target	%	99,19	99,19	99,19	99,19	99,19
	b. Realisasi	%	97,17	96,00	97,65	93,06	
	Capaian (b : a) X 100%	%	97,96	96,78	98,44	93,82	
17	Pengadaan obat generik						
	Jumlah item obat generik yang dapat disediakan	Buah		218	191	208	
	Jumlah item obat generik yang dibutuhkan	Buah		219	195	221	
	a. Target	%	99,55	99,55	99,55	99,55	99,55
	b. Realisasi	%	97,75	99,54	97,95	94,12	
	Capaian (b : a) X 100%	%	98,19	99,99	98,39	94,54	
18	Cakupan rawat jalan						
	Jumlah kunjungan pasien baru dan lama dilayani kesehatan	Orang	1.216.621	941.595	974.612	909.455	
	Jumlah penduduk Kabupaten	Orang	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314	
	a. Target	%	72,00	62,00	57,00	52,00	40,00
	b. Realisasi	%	95,77	71,99	73,57	68,93	
	Capaian: a - (b - a)/a x100%	%	66,99	83,89	70,93	67,43	
19	Cakupan rawat inap						
	Jumlah pasien rawat inap	Orang	1.006	5.603	9.861	5.494	
	Jumlah penduduk Kabupaten	Orang	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314	
	a. Target	%	3,50	3,70	1,50	1,50	1,50
	b. Realisasi	%	0,08	0,43	0,74	0,42	
	Capaian: a - (b - a)/a x100%	%	197,74	188,42	150,38	172,24	
20	Cakupan Rumah Tangga Sehat						
	Jumlah rumah tangga sehat	RT		42.544	37.197	31.793,00	
	Jumlah rumah tangga yang dikaji	RT		77.517	55.900	46.893,00	
	a. Target	%	65,00	67,00	70,00	73,00	75,00
	b. Realisasi	%	58,95	54,88	66,54	67,80	
	Capaian (b : a) X 100%	%	90,69	81,92	95,06	92,88	
21	Posyandu Purnama						
	Jumlah Posyandu Purnama	Unit		1.132	1.106	1.269	
	Jumlah Posyandu yang ada	Unit		1.455	1.468	1.474	
	a. Target	%	65,00	68,00	74,00	77,00	80,00
	b. Realisasi	%	73,24	77,80	75,34	86,09	
	Capaian (b : a) X 100%	%	112,68	114,41	101,81	111,81	
22	Pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesmasda						

	Jumlah Pasien yang dilayani melalui Jamkesmas dan Jamkesda	Orang	49.350	44.327	58.691	34.724		
	Jumlah seluruh peserta Jamkesmas dan Jamkesda	Orang	271.108	271.108	441.851	441.851		
	a. Target	%	20,00	16,00	13,00	10,00	10,00	
	b. Realisasi	%	18,20	16,35	13,28	7,86		
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	108,98	97,81	97,82	121,41		
23	Bed Occupancy Rate							
	Jumlah hari perawatan	Hari	56.019	62.330	69.350	62.441		
	Jumlah TT x hari perawatan	Hari	76.650	84.912	86.140	87.235		
	a. Target	%	65,23	67,65	68,77	69,90	71,03	
	b. Realisasi	%	73,08	73,41	80,51	71,58		
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	87,96	91,49	82,93	97,60		
24	Average Length Of Stay							
	Jumlah lama dirawat	Hari	57.395	62.593	69.944	63.211		
	Jumlah pasien keluar hidup + mati	Hari	14.532	16.160	17.567	15.900		
	a. Target	%	5,00	4,75	4,50	4,25	4	
	b. Realisasi	%	3,95	3,87	3,98	3,98		
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	121,01	118,46	111,52	106,46		
25	Turn Over Internal							
	(Jumlah TT x 365) - hari perawatan	Hari	20.631	22.582	16.790	24.794		
	Jumlah seluruh pasien keluar hidup + mati	Hari	14.532	16.160	17.567	15.900		
	a. Target	%	2,10	2,29	1,90	1,50	1,1	
	b. Realisasi	%	1,42	1,40	0,96	1,56		
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	132,40	138,98	149,70	96,04		
26	Bed Turn Over							
	Jumlah pasien keluar hidup + mati	Kali	14.532	16.160	17.567	15.900		Jumlah Pasien Meningkat, dengan hari perawatan lebih pendek
	Tempat tidur	Kali	210	232	236	239		
	a. Target	%	59,00	58,57	51,44	49,79	49,38	
	b. Realisasi	%	69,20	69,66	74,44	66,53		
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	82,71	81,07	55,29	66,38		
	Jumlah Total Capaian Kinerja		2.441,17	2.475,26	2.464,51	2.487,16		
	Rata-Rata Capaian Kinerja		93,89	95,20	94,79	95,66		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kesehatan diketahui bahwa dari 26 indikator kinerja terdapat 21 indikator yang bernilai sangat tinggi, 2 indikator bernilai tinggi, dan 3 indikator bernilai sedang.

Tabel II.50.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik							
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	M	363,94	363,94	381,06	401,46		
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	M	512,16	512,16	512,16	512,16		
	a. Target	%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	
	b. Realisasi	%	71,06	71,06	74,40	78,39		
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,51	100,08	103,34	107,38		
2.	Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik							
	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Buah	198	216	277,8	267		
	Jumlah jembatan kabupaten di daerah tersebut	Buah	221	221	297	292		
	a. Target	%	94,42	94,88	95,35	95,81	95,28	
	b. Realisasi	%	89,59	97,74	93,54	91,44		
	Capaian (b : a) X 100%	%	94,89	103,01	98,10	95,44		
3.	Luas Irigasi Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik							
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	m²	8.305,86	8.509,40	8.678,24	8.799,36		
	Luas irigasi kabupaten	m²	16.286	16.286	16.286	16.286		
	a. Target	%	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	
	b. Realisasi	%	51,00	52,25	53,29	54,03		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,48	100,54	100,06		
4.	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik							
	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	M	79.640	81.738	85.938	88.138		
	Jumlah panjang saluran drainase perkotaan seluruhnya	M	139.939	140	139.939	139.939		
	a. Target	%	56,91	63,17	71,39	82,09	95,23	
	b. Realisasi	%	56,91	58,41	61,41	62,98		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	92,46	86,02	76,72		
5.	Panjang jalan Poros Desa yang Terbangun							
	a. Target	%	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	

	b. Realisasi	%	67,25	74,55	88,04	99,47	
	Capaian (b : a) X 100%	%	96,07	93,19	97,82	99,47	
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	490,96	485,65	481,94	471,63	
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	98,19	97,13	96,39	94,33	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pekerjaan Umum diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja terdapat 4 indikator yang bernilai sangat tinggi, 1 indikator bernilai tinggi.

Tabel II.51.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO .	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJE LASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rumah Tangga pengguna air bersih							
	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	RT	174.465	183.077	193.177	195.750		
	Jumlah seluruh rumah tangga	RT	260.945	260.945	260.945	260.945		
	a. Target	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
	b. Realisasi	%	66,86	70,16	74,03	75,02		
	Capaian (b : a) X 100%	%	111,43	107,94	105,76	100,02		
2.	Lingkungan permukiman kumuh							
	Luas lingkungan permukiman kumuh	m ²	1.029,12	1.026,92	1023,92	836,04		
	Luas wilayah	m ²	6.014	6.014	6.014	6.014		
	a. Target	%	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	
	b. Realisasi	%	17,11	17,08	17,03	13,90		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,66	106,72	113,50	99,30		
3	Rumah Layak Huni							

Jumlah rumah layak huni	Buah	227.049	230.000	231.000	237.000		
Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	Buah	260.945	260.945	260.945	260.945		
a. Target	%	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	
b. Realisasi	%	87,01	88,14	88,52	90,82		
Capaian (b : a) X 100%	%	98,88	99,04	98,36	99,81		
Jumlah Total Capaian Kinerja	%	298,88	299,04	298,36	299,10		
Rata-Rata Capaian Kinerja	%	99,63	99,68	99,45	99,70		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perumahan Rakyat diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.52.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Penataan Ruang Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Keberadaan Perda RTRW							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		
2.	Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan RTRW							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		

	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		
	Jumlah Total Capaian Kinerja		200,00	200,00	200,00	200,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja		100,00	100,00	100,00	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Penataan Ruang diketahui bahwa dari 2 indikator bernilai sangat tinggi.

Tabel II.53.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ketersediaan RPJPD							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		
2.	ketersediaan RPJMD							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		
3	Ketersediaan RKPD							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		
4	Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD							
	Jumlah program RKPD tahun berkenaan yang diakomodasi dalam APBD	Buah			502	577		
	Jumlah seluruh program RKPD tahun berkenaan	Buah			534	520		
	a. Target	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95%	
	b. Realisasi	%	80,00	80,00	94,01	110,96		

	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	400,00	400,00	400,00	400,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perencanaan Pembangunan diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.54.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJE LASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase ketersediaan angkutan darat					-		-
	Jumlah angkutan darat	Buah						
	Jumlah penumpang angkutan darat	Buah						
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.	Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas							
	Jumlah rambu lalu lintas	Buah	850	945	1.040	1.302		
	Jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan	Buah	2.500	2.500	2.500	2.500		
	a. Target	%	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	
	b. Realisasi	%	34,00	37,80	41,60	52,08		
	Capaian (b : a) X 100%	%	97,14	94,50	92,44	104,16		
3.	Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan					-		-
	Jumlah angkutan umum dalam kondisi layak jalan	Buah	1.212	1.131	1.050	1.025		
	Jumlah angkutan umum	Buah	1.414	1.414	1.414	1.414		
	a. Target	%	47,00	56,00	62,00	72,00	75,00	
	b. Realisasi	%	85,71	79,99	74,26	72,49		
	Capaian (b : a) X 100%	%	182,37	142,83	119,77	100,68		
4.	Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan)					-		-
	Jumlah daya tampung kapal	Orang	109,44	109,44	127,87 0	211.496		
	Jumlah penumpang angkutan laut (penyeberangan)	Orang	94,851	86,89	107,76 2	108.401		
	a. Target	%	115,38	125,95	138,66	154,21	173,695	
	b. Realisasi	%	115,38	125,95	118,66	195,11		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	85,58	126,52		

5	Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean							
	a. Target	%	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	50,00	95,00	95,00	100,00		
	Capaian (b : a) X 100%	%	83,33	95,00	95,00	100,00		
6	Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan							
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	580,48	589,50	573,02	600,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	96,75	98,25	95,50	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perhubungan diketahui bahwa dari 6 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.55.
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJE LASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Luas Lahan Kritis							
	a. Target	Ha	24.421	17.239	11.492	5.746	2,873	
	b. Realisasi	Ha	24.691	16.691	10.961	7.643		
	Capaian: a - (b - a)/a x100%	%	98,89	103,18	104,62	66,99		
2	Rasio Luas kawasan lindung							
	luas kawasan yang dilindungi (ha)	m ²	21.670	21.670	21.670	21.670		
	luas seluruh wilayah (ha)	m ²	119.125	119.125	119.125	119.125		
	a. Target	%	6,60	8,00	9,00	10,00	11,00	
	b. Realisasi	%	18,19	18,19	18,19	18,19		
	Capaian (b : a) X 100%	%	275,62	227,39	202,12	181,91		
3	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air							
	a. Target	Unit	49	55	58	63	68,00	

	b. Realisasi	Unit	49	55	58	60		
	Capaian (b : a) X 100%	Unit	100	100	100	95		
4	Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara							
	a. Target	Unit	78	104	153	175	200	
	b. Realisasi	Unit	78	104	153	199		
	Capaian (b : a) X 100%	Unit	100	100	100	114		
5	Luas RTH Perkotaan							
	a. Target	Ha	712,36	715,35	716,35	717,35	718,35	
	b. Realisasi	Ha	712,36	715,35	716,35	717,75		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,06		
6	Penanganan sampah							
	Volume sampah yang ditangani (m3)	m ³	650	727	740	752		
	Volume produksi sampah (m3)	m ³	698	780	797	799		
	a. Target	%	86,00	88,00	90,00	92,00	92,00	
	b. Realisasi	%	93,12	93,21	92,89	94,12		
	Capaian (b : a) X 100%	%	108,28	105,91	103,22	102,30		
7	Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk							
	Jumlah daya tampung TPS (m3)	m3	523	578	664	745		
	Jumlah penduduk	Penduduk	1.207.882	1.307.995	132.271	1.319.314		
	a. Target	%	0,027	0,028	0,029	0,030	0,030	
	b. Realisasi	%	0,043	0,044	0,502	0,056		
	Capaian (b : a) X 100%	%	157,89	157,82	1.731,03	188,23		
8	Jumlah tempat Pengolahan sampah (TPS)							
	a. Target	Unit	63	68	84	100	115,00	
	b. Realisasi	Unit	63	68	84	103		
	Capaian (b : a) X 100%	Unit	100	100	100	103,00		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	798,89	803,18	804,62	751,59		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	99,86	100,40	100,58	93,95		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Lingkungan Hidup diketahui bahwa dari 8 indikator kinerja, 7 indikator bernilai sangat tinggi. Sedangkan 1 indikator bernilai sedang.

Tabel II.56.
Urusan Pertahanan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
-----	-------------------	--------	---------------------------	--------	------------

			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara							
	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	Perkara			2	0		
	Jumlah Kasus Yang Terdaftar	Perkara			2	0		
	a. Target	%	100	0	100	0	0,1	
	b. Realisasi	%	100	100	100	100		
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	100	100	100	100		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	100,00	100	100,00	100,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	100	100,00	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pertanahan diketahui bahwa dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan bernilai sangat tinggi.

Tabel II.57.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kepemilikan KTP							
	Jumlah penduduk usia>17 yang ber KTP	Orang						
	Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah	Orang						
	a. Target	%	85,90	86,90	88,90	92,00	96,00	
	b. Realisasi	%	85,90	86,90	96,17	97,48		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	108,18	105,96		
2.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran							
	Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di Tahun Bersangkutan	Orang	141.321	15.235	15.235	21.276		
	Jumlah Penduduk wajib KTP	Orang	12.600	12.600	12.600	12.600		
	a. Target	%	93,46	93,90	94,34	95,24	96,62	
	b. Realisasi	%	1,12	306,50	120,91	168,86		

	c. Capaian (b : a) X 100%	%	1,20	326,4 1	128,16	177,3 0		
3	Pengurusan KTP							
	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	Hari						
	a. Target	%	1	1	1	1	1	
	b. Realisasi	%	1	1	1	1		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	100	100		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	300,00	300,0 0	300,00	300,0 0		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	100,0 0	100,00	100,0 0		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.58.
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A							
	Jml pengaduan/laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	kasus		224	208	158		
	Jml laporan/pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu	kasus		224	208	158		
	a. Target	%	100	100	100	100	100	
	b. Realisasi	%	100	100	100	100		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,0 0	100,0 0	100,00		

2	Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan						
	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Orang		224	137	84	
	Jumlah anak korban kekerasan	Orang		224	137	89	
	a. Target	%	88	90	92	94	95
	b. Realisasi	%	89,50	100,00	100,00	94,38	
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,70	111,11	108,70	100,41	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum						
	Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum	Orang		148	159	98	
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang		148	159	98	
	a. Target	%	100	100	100	100	100
	b. Realisasi	%	100	100	100	100	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	100	100	
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit						
	Jumlah Korban yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang				60	
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan kesehatan	Orang				60	
	a. Target	%	100	100	100	100	100
	b. Realisasi	%	100	100	100	100	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	100	100	
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi						
	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi	Orang		7	5	4	
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan rehabilitasi	Orang		7	5	4	
	a. Target	%	82,00	85,00	87,00	89,00	90,00
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	121,95	117,65	114,94	112,36	
6	Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi						
	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi	Unit		2	4	4	
	Jumlah lembaga perempuan dan anak	Unit		7	7	7	
	a. Target	%	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00
	b. Realisasi	%	28,57	28,57	57,14	57,14	
	Capaian (b : a) X 100%	%	190,47	142,86	190,48	142,86	
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	600	600	600	598,94	
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100	100	100	99,82	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik diketahui bahwa dari 6 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.59.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prevalensi peserta KB Aktif							
	Jumlah peserta program KB aktif	Orang		180.279	183.152	185.122		
	Jumlah pasangan usia subur	Orang		231.583	232.768	235.028		
	a. Target	%	78,25	78,35	78,40	78,45	78,55	
	b. Realisasi	%	78,69	78,00	78,68	78,77		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,56	99,55	100,36	100,40		
2	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun							
	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Orang		2.752	2.250	2.294		
	Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang		228.831	232.768	235.028		
	a. Target	%	1,20	1,15	1,14	1,12	1,10	
	b. Realisasi	%	0,64	1,20	0,90	0,98		
	Capaian: a - (b - a)/a x100%	%	53,33	104,35	78,95	112,85		
3	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)							
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Orang		27.624	43.040	28.534		
	Jumlah PUS	Orang		228.831	232.768	235.028		
	a. Target	%	21,75	21,60	21,45	21,35	21,15	
	b. Realisasi	%	12,07	12,07	18,50	12,14		
	Capaian: a - (b - a)/a x100%	%	55,49	55,88	86,25	143,13		
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)							
	Anggota BKB ber KB			12.693	5.458	11.743		
	Seluruh PUS Anggota BKB			15.568	16.045	12.562		
	a. Target	%	20,51	20,65	21,25	21,50	21,75	
	b. Realisasi	%	39,90	81,50	34,00	93,48		

	c. Capaian (b : a)	%	194,54	394,67	160,00	434,79		
5	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan							
	Rekap Data Mikro Kelurga Desa/Kelurahan			356	356	356		
	Jumlah Desa Kelurahan			356	356	356		
	a. Target	%	100	100	100	100	100	
	b. Realisasi	%	100	100	100	100		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	100	100		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	408,83	455,43	465,19	500,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	81,77	91,09	93,04	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.60.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi							Masih kurangnya kesadaran dalam mengurus ijin panti
	a. Target	Unit	18	18	19	19	20	
	b. Realisasi	Unit	17	17	17	17		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	94,44	94,44	89,47	89,47		
2.	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial							
	a. Target	PMKS	0	350	401	435	439	
	b. Realisasi	PMKS	415	421	1.258	1.281		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	0,00	120,29	313,72	294,48		
3	Jumlah PMKS							
	a. Target	Jiwa	76.745	73.871	70.184	67.352	64,12	
	b. Realisasi	Jiwa	71.411	41.526	40.268	38.987		
	Capaian: a - (b - a)/a x100%	%	106,95	143,79	142,63	142,11		
4	Jumlah hari besar agama yang dirayakan							
	a. Target	kali	5	5	5	5	5	
	b. Realisasi	kali	5	5	5	5		

	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	100	100,00		
5	Bantuan sarana ibadah							
	Jumlah sarana ibadah yang telah memperoleh bantuan	Buah		90	599	642		
	Jumlah permohonan bantuan sarana ibadah	Buah		90	698	642		
	a. Target	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	b. Realisasi	%	90,00	100,00	86,00	100,00		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	111,11	95,56	111,11		
6	Bantuan Santunan Kematian							
	Jumlah warga meninggal yang memperoleh santunan kematian	Orang		100	3945	7980		
	Jumlah warga miskin yang meninggal dunia	Orang		100	3945	7980		
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	Penyaluran Raskin							
	a. Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	594,44	694,44	685,03	689,47		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	84,92	99,21	97,86	98,50		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Sosial diketahui bahwa dari 7 indikator kinerja, 6 indikator bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi.

Tabel II.61.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja							
	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	orang	612.073	557.623	612.321	592.569		
	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	orang	874.446	878.218	901.602	930.851		
	a. Target	%	66,53	66,83	67,25	67,51	67,84	
	b. Realisasi	%	66,04	63,49	67,91	63,66		
	Capaian (b:a)X100	%	99,26	95,00	100,98	94,30		

2	Penempatan para pencari kerja						
	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	887	1.105	2.152	2,297	
	jumlah pencari kerja yang mendaftar	orang	2.906	3.301	7.482	2,762	
	a. Target	%	30,75	31,03	32,40	32,33	31,43
	b. Realisasi	%	30,52	33,47	28,76	83,16	
	Capaian (b:a)X100	%	99,26	107,86	88,77	257,24	
3	Jumlah pengangguran terbuka						
	Jumlah pengangguran usia (15-64) tahun keatas	orang	26.664	37.473	27.599	30,010	
	Jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun	orang	612.073	557.623	612.321	592.569	
	a. Target	%	7,64	7,14	6,50	6,00	22,01
	b. Realisasi	%	4,36	6,72	4,51	5,06	
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	142,98	105,88	130,66	115,59	
4	Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja						
	jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3	Buah	593	747	681	846	
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1,232	
	a. Target	%	53,50	62,50	60,06	70,44	70,97
	b. Realisasi	%	58,71	70,47	60,05	68,67	
	Capaian (b:a)X100	%	109,75	112,75	99,98	97,48	
5	Kepatuhan terhadap norma kerja						
	Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja	Buah	585	928	849	1,193	
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1,232	
	a. Target	%	57,84	65,25	74,79	87,50	92,80
	b. Realisasi	%	57,92	87,55	74,87	96,83	
	Capaian (b:a)X100	%	100,14	134,16	100,11	110,66	
6	Kepatuhan terhadap norma jaminan social tenaga kerja						
	Jumlah perusahaan yang memenuhi norma jamsostek	Buah	1.005	1.010	1.065	1,205	
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1,232	
	a. Target	%	74,15	90,04	93,96	94,28	99,58
	b. Realisasi	%	99,50	95,28	93,92	97,81	
	Capaian (b:a)X100	%	134,19	105,82	99,95	103,74	
7	Angka nihil kecelakaan kerja						
	Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja	Buah	9	30	39	64	
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1,232	
	a. Target	%	2,82	4,32	4,57	5,15	2,17
	b. Realisasi	%	0,89	2,83	3,44	5,19	
	Capaian: $a - (b - a) / a \times 100\%$	%	31,60	65,51	75,25	100,87	
8	Penuntasan / penyelesaian						

	perselisihan hubungan industrial							
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P	Kasus	70	79	79	83		
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans	Kasus	80	91	95	94		
	a. Target	%	97,44	93,98	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	87,50	86,81	83,16	88,30		
	Capaian (b:a)X100	%	89,80	92,38	83,16	88,30		
9	Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama							
	Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Buah	87	117	92	99		
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232		
	a. Target	%	6,89	7,42	7,94	8,47	9,00	
	b. Realisasi	%	8,61	11,04	8,11	8,04		
	Capaian (b:a)X100	%	125,10	148,85	102,11	94,82		
10	Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama Bipartit							
	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit	Buah			101	119		
	Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit	Buah			485	505		
	a. Target	%	2,12	2,65	3,18	3,71	4,24	
	b. Realisasi	%	2,11	33,79	20,82	23,56		
	Capaian (b:a)X100	%	99,59	1.275,91	655,29	635,56		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	961,08	1000,24	971,91	944,27		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	96,11	100,02	97,19	94,43		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Ketenagakerjaan diketahui bahwa dari 10 indikator kinerja, 9 indikator bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi.

Tabel II.62.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koperasi aktif							
	Jumlah Koperasi aktif		856	965	974	991		
	Jumlah seluruh koperasi		1050	1059	1070	1088		
	a. Target	%	82	82	85	90	100	
	b. Realisasi	%	82	91	91	91		
	c. Capaian(b : a) X 100%	%	99	111	107	101		
2	Usaha mikro dan kecil							
	Jumlah usaha mikro dan kecil		26.162	35.010	36.361	165.616		
	Jumlah seluruh UKM		36.525	36.650	36.774	171.316		
	a. Target	%	59	60	62	63	63	
	b. Realisasi	%	72	96	99	97		
	c. Capaian(b : a) X 100%	%	121	159	159	153		
3	Koperasi yang mendapatkan penilaian baik							
	Jumlah koperasi yang mendapat penilaian baik tahun ini		139	152	192	229		
	Jumlah seluruh koperasi		184	197	242	279	279	
	a. Target	%	73	75	77	80		
	b. Realisasi	%	75,54	77,16	79,34	82,08		
	c. Capaian(b : a) X 100%	%	103	103	103	103		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	299,42	300,00	297,94	292,69		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	99,81	100,00	99,31	97,56		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.63.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN							
	a. Target	Milyar Rp.	735,00	772,30	810,90	851,50	894,00	
	b. Realisasi	Milyar Rp.	876,80	898,95	942,53	7.606,33		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	119,29	116,40	116,23	893,29		

2.	Ijin Lokasi							
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	34	54	40	62		
	Jumlah permohonan ijin	Buah	36	60	62	60		
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	94,44	90,00	64,52	103,33		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	94,44	90,00	64,52	103,33		
3.	Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)							Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tanggal 2 Oktober 2014 Pemerintah Daerah sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	12	13	15	18		
	Jumlah permohonan ijin	Buah	18	13	20	23		
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	66,67	100,0 0	75,00	78,26		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	66,67	100,0 0	75,00	78,26		
4.	Ijin Gangguan (HO)							1. Adanya bangunan tambahan yang diketahui pada saat pemeriksaan lokasi sehingga penerbitan HO menunggu proses penerbitan IMB tambahan
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	146	170	123	83		
	Jumlah permohonan ijin	Buah	185	218	162	120		
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	2. Perusahaan belum melengkapi persyaratan yang disyaratkan setelah dilakukan peninjauan lapangan
	b. Realisasi	%	78,92	77,00	75,93	69,17		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	78,92	77,00	75,93	69,17		
5.	Ijin Mendirikan Bangunan							
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	494	404	739	421		1. Keterbatasan personil
	Jumlah permohonan ijin	Buah	547	536	700	630		2. Sering terjadi ketidakcocokan masalah tanah
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	3. Berkas masuk akhir desember
	b. Realisasi	%	90,31	75,00	105,5 7	66,83		4. Setelah pemeriksaan lapangan terdapat revisi (gambar) atau menambah kelengkapan sesuai kondisi yang harus dipenuhi namun belum ditindaklanjuti oleh pemohon
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	90,31	75,00	105,5 7	66,83		
6.	Ijin Prinsip							
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	100	190	206	212		
	Jumlah permohonan ijin	Buah	120	210	263	267		
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	83,33	90,00	78,33	79,40		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	83,33	90,00	78,33	79,40		

7.	Ijin Usaha						
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	34	244	58	52	
	Jumlah permohonan ijin	Buah	36	253	62	52	
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00
	b. Realisasi	%	95,00	96,00	93,55	100,00	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	95,00	96,00	93,55	100,00	
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	608,6 7	628,0 0	587,3 3	593,65	
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	86,95	89,71	83,90	84,81	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Penanaman Modal diketahui bahwa dari 7 indikator kinerja, 3 indikator bernilai sangat tinggi; 2 indikator bernilai tinggi, dan 2 indikator bernilai sedang.

Tabel II.64.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya							
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kejadian						
	a. Target	kali	5	6	7	8	9	
	b. Realisasi	kali	5	12	9	18		
	Capaian (b:a)X100%	%	100,00	200,00	128,57	225,00		
2.	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya							
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya							
	a. Target	unit	5	6	7	8	9	
	b. Realisasi	unit	5	5	6	6		
	Capaian (b:a)X100%	%	100,00	83,33	85,71	75,00		
3.	Peninggalan/cagar budaya (situs) yang dilestarikan							
	Jumlah peninggalan / cagar budaya (situs) yang dilestarikan	Buah	38	38	38	38		
	Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah	Buah	38	38	38	38		
	a. Target	%	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	
	b. Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian (b:a)X100%	%	275,03	275,03	275,03	275,03		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	300,00	283,33	285,71	275,00		

	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	94,44	95,24	91,67		
--	---------------------------	---	--------	-------	-------	-------	--	--

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kebudayaan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja, 2 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai sedang.

Tabel II.65.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO .	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif							
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Orang		26	30	26		
	Jumlah seluruh organisasi kepemudaan	Orang		26	40	26		
	a. Target	%	100	100	100	100	100	
	b. Realisasi	%	100	100	75	100		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	75	100		
2	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)							
	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten							
	a. Target	unit	1	2	2	2	2	
	b. Realisasi	unit	1	2	3	4		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	150	200		
3	Lapangan Olahraga							
	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten							
	a. Target	unit	24	26	26	27	27	
	b. Realisasi	unit	24	24	24	24		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	92	92	89		
4	Persentase Cabang olahraga yang aktif							
	Jumlah cabang olahraga yang aktif	Buah		38	30	31		
	Jumlah seluruh cabang olahraga	Buah		38	47	31		
	a. Target	%	86,21	86,21	89,66	93,10	98,66	
	b. Realisasi	%	79,18	100,00	63,83	100,00		
	Capaian (b : a) X 100%	%	91,85	116,00	71,19	107,41		

	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	391,8 5	392,31	338,50	388,89		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	97,96	98,08	84,62	97,22		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemuda Dan Olahraga diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja, 3 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai tinggi.

Tabel II.66.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kab. Gresik
Tahun 2011 s.d. 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJE LASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Parpol yang dibina							
	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap Parpol	Parpol						
	a. Target	%	11	11	11	11	11	
	b. Realisasi	%	11	11	11	11		
	Capaian (b:a) x 100	%	100	100	100	100		
2	Jumlah LSM / Ormas /OKP/yang dibina							
	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	LSM/OKP						
	a. Target	LSM/OKP	164	164	164	164	164	
	b. Realisasi	LSM/OKP	171	177	164	167		
	Capaian (b:a) x 100	%	104	108	100	101,8293		
3	Konflik yang dapat diselesaikan							
	Jumlah konflik yang diselesaikan	Perkara		48	51	142		
	Jumlah konflik yang ada	Perkara		50	51	142		
	a. Target	%	100	100	100	100	100	
	b. Realisasi	%	100	96	100	100		
	Capaian (b:a) x 100	%	100	96	100	100		
4	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik							
	a. Target	%	50,00	55,00	60,00	70,00	100,00	
	b. Realisasi	%	68,00	75,00	100,00	100,00		
	Capaian (b:a) x 100	%	136	136	167	143		

5	Demo / protes terhadap Perda/Perbup						
	Jumlah demo yang tertib	kali			12	8	
	Jumlah demo	kali			12	8	
	a. Target	%	96	96	98	98	96
	b. Realisasi	%	98	96	100	100	
	Capaian (b:a) x 100	%	102	100	102	102	
6	Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum						
	a. Target	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Capaian (b:a) x 100	ada/tidak	100	100	100	100	
7	Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras						
	a. Target	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b. Realisasi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Capaian (b:a) x 100	ada/tidak	100	100	100	100	
8	Rasio Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk						
	Jumlah personil Satpol PP	Orang			154	692	
	Jumlah penduduk	Orang			1.324.777	1.319.314	
	a. Target	%	0,02	0,04	0,05	0,05	0,05
	b. Realisasi	%	0,01	0,02	0,012	0,05	
	Capaian (b:a) x 100	%	50,00	50,00	23,25	104,90	
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	750,00	746,00	712,25	789,00	
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	93,75	93,25	89,03	98,63	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Gresik diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja, 3 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai sangat rendah.

Tabel II.67.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tahun 2011 s.d. 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJE LASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perda yang ditetapkan							
	Jumlah Perda yang yg ditetapkan dalam 1 tahun	Perda						
	a. Target	%	10	20	30	40	50	
	b. Realisasi	%	32	70	89	92		
	Capaian (b:a)x100,00	%	320,00	350,00	269,67	230,00		

2	Jumlah Perda Yang dibatalkan						
	Jumlah Perda yang dibatalkan dalam 1 tahun	Perda					
	a. Target	%	0	0	0	0	0
	b. Realisasi	%	0	0	0	0	
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
3	Keputusan Bupati						
	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan		38	1299	969	
	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan		30	1299	969	
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	%	100,0 0	127	100,00	100,00	
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	127,0 0	100,00	100,00	
4	Kasus hukum yang diselesaikan						
	Jumlah kasus hukum dalam 1 tahun	Kasus	6	5	20	5	
	kasusu Hukum yang diselesaikan	Kasus	6	5	20	5	
	a. Target	%	80	80	80	80	80
	b. Realisasi	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
	Capaian (b: a)x100,00	%	125,0 0	125,0 0	125,00	125,00	
5	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti						
	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan		38	57	38	
	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan		38	57	38	
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
6	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti						
	Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Kasus	408	417	435	435	
	Jumlah temuan	Kasus	408	417	435	435	
	a. target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00
	b. realisasi	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	
7	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi						
	Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	buah	53	56	56	56	
	jumlah LAKIP keseluruhan	buah	53	56	56	56	
	a. target	%	0	25	25	25	100
	b. realisasi	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	

	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	400,0 0	400,00	400,00		
8	Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti							
	Jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Buah	44	79	77	80		
	Jumlah informasi masyarakat yang masuk	Buah	50	50	77	82		
	a. target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00	
	b. realisasi	%	88	158	100,00	98		
	Capaian (b: a)x100,00	%	88,00	158,0 0	100,00	98,00		
9	Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku wakil Pemerintah							
	Jumlah Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah selama 1 Tahun	Kali						
	a. Target	Kali	34	34	34	34	34	
	b. Realisasi	Kali	34	34	34	34		
	Capaian (b:a)x100,00	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
10	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (IKK LPPD)							
	a. Target	Baik / Cukup / Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	b. Realisasi	Baik / Cukup / Kurang	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik		
	Capaian (b:a)x100,00	Baik / Cukup / Kurang	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
11	Opini laporan keuangan							
	opini yang diberikan atas LKPD oleh BPK	WTP/WDP						
	a. Target	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	b. Realisasi	WTP/WDP	WDP	WDP	WDP	WDP		
	Capaian (b: a)x100,00	WTP/WDP	WDP	WDP	WDP	WDP		
12	Laporan keuangan tersusun tepat waktu							
	a. Target	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	b. Realisasi	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya		
	Capaian (b: a)x100,00	Ya / Tidak	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
13	APBD ditetapkan tepat waktu							
	a. Target	tepat/tidak	TEPA T	TEPA T	TEPAT	TEPAT	TEPAT	
	b. Realisasi	tepat/tidak	TEPA T	TEPA T	TEPAT	TEPAT		
	Capaian (b: a)x100,00	tepat/tidak	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
14	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005							
	a. Target	Ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
	b. Realisasi	Ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA		

	Capaian (b: a)x100,00	Ada/tidak	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
15	Peningkatan PAD							
	PAD Tahun ini (Rp Jt)		273.9 75,99	427.5 80,87	502.767 ,01	700.587, 79		
	PAD Tahun n- PAD (Tahun n-1) (Rp Jt)			153.6 04,87	75.215, 17	197.791, 76		
	PAD Tahun n – 1(Rp Jt)			273.9 75,99	427.580 ,87	502.767, 01		
	a. Target	%	43,92	5,27	5,51	27,49	6,68	
	b. Realisasi	%	63,34	56,07	17,58	39,35		
	Capaian (b: a)x100	%	144,2 2	1063, 95	319,13	143,13		
16	Keberadaan kemandirian daerah							
	Jumlah PAD (Rp Jt)				502.796 ,03	700.587, 79		
	Jumlah APBD (Rp Jt)				1.840.5 8,,22	2.206.38 5,84		
	a. Target	%	20,70	20,88	21,03	24,84	25,17	
	b. Realisasi	%	20,51	25,90	27,32	31,76		
	Capaian (b: a)x100,00	%	99,08	124,0 4	129,90	127,86		
17	Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan)							
	Aset bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan	Buah			1.305	1.305		
	Jumlah seluruh aset bangunan	Buah			1.323	1.323		
	a. Target	%	85,29	88,84	92,40	95,95	99,50	
	b. Realisasi	%	90,00	90,00	98,60	98,60		
	Capaian (b: a)x100,00	%	105,5 2	101,3 1	106,71	102,76		
18	Perusahaan daerah dalam kondisi sehat							
	a. Target	Buah	1	1	2	2	3	
	b. Realisasi	Buah	3	3	3	3		
	Capaian (b:a)x100,00	%	300,0 0	300,0 0	150,00	150,00		
19	Jumlah MOU Kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga							
	a. Target	Buah	13	16	20	24	28	
	b. Realisasi	Buah	0	16	18	22		
	Capaian (b:a)x100,00	%	0,00	100,0 0	90,00	91,67		
20	Voting yang dilakukan dalam sidang Paripurna							
	Jumlah pengambilan keputusan melalui voting	Kali		2	1	0		
	Jumlah sidang paripurna dalam tahun ini	Kali		4	17	35		
	a. Target	%	0	0	0	0	0	
	b. Realisasi	%	0	50,00	5,88	0		
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	50,00	80,00	100,00		
21	Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Ranperda							
	Jumlah Ranperda yang melibatkan masyarakat	Perda	5	10	9	6		
	Total Ranperda	Perda	15	10	9	6		

	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	33,33	100,0 0	100,00	100,00		
	Capaian (b: a)x100,00	%	33,33	100,0 0	100,00	100,00		
22	Perda inisiatif DPRD							
	Jumlah Perda yang telah disahkan atas usul inisiatif DPRD	Perda						
	a. Target	Perda	9	13	16	18	5	
	b. Realisasi	Perda	10	20	28	33		
	Capaian (b: a)x100,00	%	111,11	153,8 5	175,00	183,33		
23	Rasio Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya							
	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	Orang	516	636	748	744		
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934		
	a. Target	%	85,49	91,20	96,91	100,00	100	
	b. Realisasi	%	63,78	73,60	84,40	79,70		
	Capaian (b: a)x100,00	%	74,61	80,70	87,09	79,70		
24	Rasio Jabatan yang terisi							
	Jabatan yang terisi	Orang	809	864	886	936		
	Jumlah jabatan	Orang	893	931	1.038	1.050		
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100	
	b. Realisasi	%	91,00	92,80	85,40	88,95		
	Capaian (b: a)x100,00	%	91,00	92,80	85,40	88,95		
25	Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal							
	Jumlah pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formalnya	Orang	809	864	886	934		
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934		
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100	
	b. Realisasi	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
26	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan							
	Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Orang	809	864	886	934		
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934		
	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
27	Kesesuaian STOK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang STOK							

	a. Target	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00	
	b. Realisasi	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
	Capaian (b: a)x100,00	%	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
28	Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan							
	a. Target	%	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
	b. Realisasi	%	0,00	40,00	100,00	100,00		
	Capaian (b: a)x100,00	%	0,00	100,0 0	166,67	125,00		
29	Keberadaan E-procurement							
	a. Target	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b:a)x100,00	Ada/Tidak Ada	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
30	Keberadaan Unit pelayanan pengadaan							
	a. Target	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b:a)x100,00		100,0 0	100,0 0	100,00	100,00		
31	Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah							
	a. Target	Orang	11	25	25	25	25	
	b. Realisasi	Orang	-	78	94	44		
	Capaian (b:a)x100,00	%	-	312,0 0	376,00	176,00		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	2586, 94	2923, 50	2852,49	2958,32		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	86,23	97,45	95,08	98,61		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diketahui bahwa dari 31 indikator kinerja terdapat 29 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 2 indikator bernilai tinggi.

Tabel II.68.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Regulasi Ketahanan Pangan							
	a. Target	ada/tidak	ada	ada	ada	ada		
	b. Realisasi	ada/tidak	tidak ada	ada	ada	ada	Ada	
	Capaian (b:a)	ada/tidak	0	100	100	100		
2	Rata-rata konsumsi bahan pangan utama							
	a. Target	Kg/Kapita/Tahun	94,35	94,35	94,35	94,35	94,35	
	b. Realisasi	Kg/Kapita/Tahun	94,35	95,40	94,80	91,32		
	Capaian (b:a)	%	100,00	101,11	100,48	96,79		
3	Ketersediaan pangan utama							
	a. Target	Kg/Kapita/Tahun	193,40	197,23	199,18	197,21	200,17	Lahan sawah dijadikan pemukiman/ industri
	b. Realisasi	Kg/Kapita/Tahun	193,93	201,3	191	176,36		
	Capaian (b:a)	%	100,28	102,07	95,89	89,43		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	200,00	200,00	195,89	186,22		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	66,67	66,67	65,30	62,07		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Ketahanan Pangan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator yang bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi.

Tabel II.69.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PKK aktif							
	Jumlah PKK aktif	Unit	375	375	375	375		
	Jumlah PKK	Unit	375	375	375	375		
	a. target	%	81,27	83,23	84,04	84,41	85,61	
	b. realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian (b : a) X 100%	%	123,05	120,15	118,99	118,47		
2.	Posyandu							
	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	1.457	1.463	1.466	1.474		
	Total Posyandu	Unit	1.457	1.463	1.466	1.474		
	a. target	%	97,90	98,90	98,95	98,95	99,3	
	b. realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Capaian (b : a) X 100%	%	102,15	101,11	101,06	101,06		
3.	Persentase Penduduk Miskin							

	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	181.700	173.800	170.900	-		
	a. target	%	20,90	20,48	20,07	19,67	19,67	
	b. realisasi	%	15,33	14,30	13,89	-		
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{100} \times 100\%$	%	126,65	130,18	130,79	-		
	a							
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	267,49	266,89	267,50	300,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	89,16	88,96	89,17	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja yang bernilai sangat tinggi.

Tabel II.70.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Statistik Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Keberadaan Dokumen "Gresik Dalam Angka"							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a)	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		
2.	Keberadaan Dokumen PDRB							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a)	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		
3.	Keberadaan Dokumen IPM							
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a)	Ada / Tidak Ada	100	100	100	100		

	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	300,00	300,00	300,00	300,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMDD untuk Urusan Statistik diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja yang bernilai sangat tinggi.

Tabel II.71.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJE LASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara baku							
	jumlah instansi yang telah menerapkan arsip secara baku	Unit	93	168	334	412		
	jumlah SKPD dan Desa	Unit	413	413	413	413		
	a. Target	%	22,51	40,68	56,90	74,33	412	
	b. Realisasi	%	22,52	40,68	80,87	99,76		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,04	100,00	142,13	134,20		

Tabel II.72.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keberadaa n Website Pemerintah Daerah							
	a. Target	ada/Tidak	ada	ada	ada	ada		
	b. Realisasi	ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	
	Capaian (b : a) X 100%	ada/Tidak	100	100	100	100		
2	Pengunjung Website setiap tahun							
	Jumlah kunjungan ke website selama 1 tahun (netter)							

	a. Target	Netter	347.021	419.895	503.874	554.261	665,113	
	b. Realisasi	Netter	419.895	665.113	716.907	725.213		
	Capaian (b : a) X 100%	%	121,00	158,40	142,28	130,84		
3	Sistim informasi yang tersedia							
	Jumlah sistem informasi yang tersedia selama 1 tahun							
	a. Target	Buah	23	24	25	26	27	
	b. Realisasi	Buah	24	27	30	32		
	Capaian (b : a) X 100%	%	104,35	112,50	120,00	123,08		
4	Jumlah pemberitaan di media massa							
	Jumlah pemberitaan di media selama 1 tahun							
	a. Target	Kali	350	370	390	400	420	
	b. Realisasi	Kali	365	300	692	692		
	Capaian (b : a) X 100%	%	104	81	177	173		
5	Persuratan secara elektronik							
	a. Target	Ada / tidak	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / tidak	100	100	100	100		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	500,00	481,08	500,00	500,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	96,22	100,00	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja terdapat 5 indikator yang bernilai sangat tinggi.

Tabel II.73.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah							
	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	buku						
	a. Target	buku	79.142	104.142	129.142	154.142	179,142	
	b. Realisasi	buku	80.312	85.712	96.355	139.555		
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,48	82,30	74,61	90,54		

2	Pengunjung Perpustakaan							
	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan selama 1 Tahun							
	a. Target	Orang	457.500	529.458	603.827	680.759	759,805	
	b. Realisasi	Orang	1.125.000	1.307.995	1.371.507	1.074.695		
	Capaian (b : a) X 100%	%	245,90	247,04	227,14	157,87		
3	Jumlah Anggota Perpustakaan							
	Jumlah Anggota Perpustakaan							
	a. Target	Orang	24.673	26.830	28.987	31.143	33,30	
	b. Realisasi	Orang	21.466	22.592	23.287	24.266		
	Capaian (b : a) X 100%	%	87,00	84,20	80,34	77,92		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	287,00	266,51	254,95	247,05		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	95,67	88,84	84,98	82,35		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pendidikan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 2 indikator bernilai tinggi.

Tabel II.74.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pertanian
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Produksi Pertanian							
	a. Target	ton	516.785	531.695	542.043	549.485	554.979	
	b. Realisasi	ton	402.414	564.249	537.730	553.633		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	77,87	106,12	99,20	100,75		
2	Produksi Sayur :							
	a. Target	ton	17.165	17.499	17.765	17.972	18.121	
	b. Realisasi	ton	28.799	7.569	13.812	11.957		
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	167,77	43,25	77,75	66,53		
3	Produksi Buah :							
	a. Target	kuintal	508.316	513.786	519.540	524.205	528.073	

	b. Realisasi	kuintal	576.4 24	941. 301	752.8 43	657.771	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	113,4 0	183, 21	144,9 1	125,48	
4	Produksi Perkebunan						
	a. Target	ton	13.24 9	13.3 88	13.99 9	14.018	14.272
	b. Realisasi	ton	13.49 9	12.5 14	30.68 3	17.302	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	101,8 8	93,4 7	219,1 8	123,43	
5	Produksi Pternakan :						
	- Daging (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	10.02 0,10	10.8 21,7 1	12.01 2,10	13.453, 55	15.606,12
	b. Realisasi	ton	10.33 5,12	10.4 01,7 2	10.46 0,11	10.510, 16	
	Capaian (b : a)	%	103,1 4	96,1 2	87,08	78,12	
6	- Telur (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	2.377, 77	2.51 6,39	2.664, 10	2.822,6 1	2.991,97
	b. Realisasi	ton	2.646, 38	2.69 1,73	2.725, 26	2.754,9 6	
	Capaian (b : a)	%	111,30	106, 97	102,3 0	97,60	
7	- Susu (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	305,5 0	352, 69	407,0 7	470,16	543.36
	b. Realisasi	ton	299,6 7	304, 8	306,1 4	315,00	
	Capaian (b : a)	%	98,09	86,4 2	75,21	67,00	
8	Populasi Ternak :						
	Populasi Sapi :						
	a. Target	ekor	53.63 6	53.8 35	54.07 6	48.366	54.827
	b. Realisasi	ekor	53.52 6	58.6 83	44.70 3	47.697	
	Capaian (b : a) X 100%	%	99,79	109, 01	82,67	98,62	
9	- Kerbau (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	178	208	244	285	334
	b. Realisasi	ekor	176	297	198,0 0	198	
	Capaian (b : a) X 100%	%	98,88	142, 79	81,15	69,47	
10	- Kambing (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	52.31 7	52.6 00	52.95 7	53.355	53.355
	b. Realisasi	ekor	57.511	65.2 10	65.27 0,00	66.357	
	Capaian (b : a) X 100%	%	109,9 3	123, 97	123,2 5	124,37	

11	- Domba (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	29.90 9	30.0 67	30.27 2	30.499	30,749
	b. Realisasi	ekor	30.13 4	30.3 96	30.39 6,00	30.898	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,7 5	101, 09	100,4 1	101,31	
12	- Kuda (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	213	245	282	324	373
	b. Realisasi	ekor	236	236	236,0 0	215	
	Capaian (b : a) X 100%	%	110,8 0	96,3 3	83,69	66,36	
13	- Ayam Buras (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	643.4 96	649. 159	655.0 01	660.96 2	667.109
	b. Realisasi	ekor	640.8 40	645. 838	647.76 2,00	663.83 0	
	Capaian (b : a) X 100%	%	99,59	99,4 9	98,89	100,43	
14	- Ayam Ras Petelur (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	130.4 73	130. 878	131.3 62	131.00 0	132.441
	b. Realisasi	ekor	133.0 45	133. 045	134.70 0,00	140.00 0	
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,9 7	101, 66	102,5 4	106,87	
15	- Ayam Ras Pedaging						
	a. Target	ekor	2.557. 992	2.55 8.09 0	2.258. 192	2.258.2 86	2.258.400
	b. Realisasi	ekor	2.600. 000	2.60 0.00 0	2.603. 500,0 0	6.532.0 00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,6 4	101, 64	115,2 9	289,25	
16	- Itik (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	25.52 5	25.6 40	25.76 0	25.892	26.034
	b. Realisasi	ekor	26.45 0	27.99 0	28.12 0,00	27.920	
	Capaian (b : a) X 100%	%	103,6 2	109, 17	109,1 6	107,83	
17	- Entok (populasi binatang selama 1 tahun)						
	a. Target	ekor	13.14 6	13.2 82	13.42 1	13.564	13.710
	b. Realisasi	ekor	13.26 0	13.2 60	13.38 5,00	29.478	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,8 7	99,8 3	99,73	217,33	
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	1674, 22	161 4,91	1585, 37	1564,6 4	
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	98,48	94,9 9	93,26	92,04	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pertanian diketahui bahwa dari 17 indikator kinerja terdapat 12 indikator yang bernilai sangat tinggi, 1 indikator bernilai tinggi, dan 4 indikator bernilai sedang.

Tabel II.75.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kehutanan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi		3641,56	702,50	77,23	136,495		
	Luas total hutan dan lahan kritis		14853,63	22.619,44	5.897	10.036,43		
	a. Target	%	0,025	0,013	0,013	0,013	2,873	
	b. Realisasi	%	0,2452	0,0311	0,0131	0,0136		
	Capaian (b : a) X 100%	%	980,65	238,90	100,74	104,62		
2	Produksi hasil Hutan :							
	- Kayu Jati (Jumlah produksi kayu selama 1 tahun)							
	a. Target	m3	750	600	600	525	525	
	b. Realisasi	m3	490	121,86	966	535		
	Capaian (b : a) X 100%	%	65,33	20,31	161,00	101,90		
3	- Non Kayu Jati							
	a. Target	m3	49	50	46	58	58	
	b. Realisasi	m3	927	360,77	2,427	851		
	Capaian (b : a) X 100%	%	1.891,84	721,54	5,28	1.467,24		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	215,33	170,31	155,28	250,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	71,78	56,77	51,76	83,33		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kehutanan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.76.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase ABT berijin yang membayar pajak							
	Jumlah sumur yang berijin	Buah	139,00	160,00	164,00	195,00		
	Jumlah sumur seluruhnya	Buah	192,00	213,00	261,00	270,00		
	a. Target	%	70,61	71,47	72,91	74,06	75,20	
	b. Realisasi	%	72,40	75,12	62,84	72,22		
	Capaian (b:a)	%	102,53	105,11	86,19	97,52		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	100,00	100,00	86,19	97,52		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	100,00	86,19	97,52		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMDD untuk Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.77.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah kunjungan wisata							
	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	Orang						
	a. Target	%	1.250.000	1.325.000	1.400.000	1.460.000	1.530.000	
	b. Realisasi	%	1.250.000	1.500.000	3.714.635	3.620.974		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	113,21	265,33	248,01		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pariwisata diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.78.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Produksi Perikanan :							
a	Budi Daya :							
a.1	- Udang Windu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))							
	a. Target	ton	1.113,00	1.420,00	1.765,00	1.975,00	3.100	
	b. Realisasi	ton	2.093,34	3.027,66	4.005,80	3.375,70		
	Capaian (b : a) X 100%	%	188,08	213,22	226,96	170,92		
a.2	- Udang Vannamae (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))							
	a. Target	ton	3.529,00	3.874,00	3.970,00	4.100,00	4.250	
	b. Realisasi	ton	4.585,89	7.428,71	7.160,62	6.237,08		
	Capaian (b : a) X 100%	%	129,95	191,76	180,37	152,12		
a.3	- Bandeng (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))							
	a. Target	ton	28.400,00	29.400,00	32.370,00	36.840,00	39.000	
	b. Realisasi	ton	28.428,06	47.700,30	68.811,44	65.975,68		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,10	162,25	212,58	179,09		
a.4	- Kerapu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))							
	a. Target	ton	9,50	9,90	10,40	11,00	12	

	b. Realisasi	ton	15,41	9,9	12,00	66,71		
	Capaian (b : a) X 100%	%	162,21	100,00	115,38	606,45		
a.5	- Nila (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)							
	a. Target	ton	985,00	1.032,00	1.080,00	1.138,00	1.200	
	b. Realisasi	ton	1.526,70	1.737,18	3.424,59	2.354,89		
	Capaian (b : a) X 100%	%	154,99	168,33	317,09	206,93		
b	Penangkapan (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)							
	a. Target	ton	16.650,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00		
	b. Realisasi	ton	19.492,84	16.965,00	18.380,99	17.379,23		
	Capaian (b : a) X 100%	%	117,07	100,38	106,87	99,31		
c	Perairan Umum (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)							
	a. Target	ton	450,00	525,00	600,00	675,00		
	b. Realisasi	ton	350,43	420	862,27	916,75		
	Capaian (b : a) X 100%	%	77,87	80,00	143,71	135,81		
2	Produktivitas Lahan Tambak :							
	Payau		191,02	456,04	560,04	599,56		
a	a. Target	ton/Ha	88,07	92,49	96,11	101,11	106,91	
	b. Realisasi	ton/Ha	135,75	222,94	258,82	277,96		
	Capaian (b : a) X 100%	%	154,14	241,04	269,30	274,91		
b	Tawar							
	a. Target	ton/Ha	105,80	111,09	111,07	116,87	123,13	
	b. Realisasi	ton/Ha	55,27	233,10	301,22	321,60		
	Capaian (b : a) X 100%	%	52,24	209,83	271,20	275,18		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	830,11	880,00	900,00	899,31		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	92,23	97,78	100,00	99,92		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kelautan Dan Perikanan diketahui bahwa dari 9 indikator kinerja semuanya bernilai sangat tinggi.

Tabel II.79.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertumbuhan Penerbitan SIUP							
	Jumlah penerbitan SIUP pada th. ini – jmlh Penerbitan SIUP th. Lalu	Buah		68	125	182		
	Jumlah Penerbitan SIUP s.d. th. lalu	Buah		973	1.041	1.166		
	a. Target	%	9,80	10,80	11,00	11,50	11,80	
	b. Realisasi	%	9,80	6,99	12,01	15,61		
	Capaian (b : a)X100	%	100,00	64,71	109,16	135,73		
2.	Pertumbuhan penerbitan TDP							
	Jumlah Ijin Tahun ini	Buah	1.054	1.315	1.704	1.750		
	Jumlah penerbitan TDP pada th. ini – jmlh Penerbitan TDP th. Lalu	Buah		261	650	696		
	Jumlah Penerbitan TDP s.d. th. lalu	Buah		1.054	1.315	1.704		
	a. Target	%	9	9,6	10,2	10,3	10,7	
	b. Realisasi	%	-	24,8	49,4	40,8		
	Capaian (b : a)X100	%	-	257,95	484,60	396,55		
3.	Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Gudang TDG							
	Jumlah penerbitan TDG pada th. ini – jmlh Penerbitan TDG th. Lalu	Buah	29	47	49	58		
	Jumlah Penerbitan TDG s.d. th. lalu	Buah		18	2	9		
	a. Target	%	14,60	15,80	16,20	16,92	17,6	
	b. Realisasi	%	14,60	62,07	4,26	18,37		
	Capaian (b : a)X100	%	100,00	392,84	26,27	108,5		
4.	Pertumbuhan nilai investasi perdagangan							
	Jumlah nilai Investasi pd Th ini - Jumlah investasi pd tahun lalu	Rp.	367.421.000	907.559.000	1.410.570.600	4.618.392.400		
	Jumlah nilai investasi pd tahun lalu	Rp.		540.138.000	907.559.000	2.318.129.600		
	Jumlah nilai Investasi pd tahun lalu	Rp.		367.421.000	907.559.000	2.318.129.600		
	a. Target	%	1,30	1,40	1,50	1,60	1,1	
	b. Realisasi	%	1,10	1,47	1,55	1,99		
	Capaian (b : a)X100	%	84,62	105,01	103,62	124,52		
5.	Jumlah Pameran /Ekspo Per Tahun							
	Jumlah pameran/ event yang diikuti pada tahun ini	Buah						
	a. Target	kali	3	3	3	3	3	
	b. Realisasi	kali	4	4	30	40		
	Capaian (b : a)X100	%	133,33	133,33	1.000,00	1.333,33		

	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	384,62	464,71	426,23	426,21		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	96,15	92,94	85,25	85,24		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perdagangan diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja semua bernilai sangat tinggi.

Tabel II.80.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perindustrian Kabupaten Gresik
Tahun 2011 s.d. 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN				TARGET	PENJELASAN
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	3
1.	Pertumbuhan industri							
	Jumlah Industri tahun ini- Jumlah Industri tahun lalu	Buah	68	76	82	74		
	Jumlah Industri s.d. tahun lalu	Buah	6.225	6.293	6.369	6.451		
	a. Target	%	1	1	2	1	1	
	b. Realisasi	%	1,09	1,21	1,29	1,15		
	Capaian (b : a) X 100%	%	109,24	120,77	64,37	114,71		
2.	Pertumbuhan nilai produksi							
	Jumlah Nilai produksi th ini - jumlah nilai produksi th lalu	Buah	435	554	682	819		
	jumlah nilai produksi th lalu	Buah	21.752	22.187	22.741	23.423		
	a. Target	%	2	2,5	3	3,5	3,5	
	b. Realisasi	%	2	2,5	3	3,5		
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	100	100	100		
	Jumlah Total Capaian Kinerja	%	200,00	200,00	164,37	200,00		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%	100,00	100,00	82,19	100,00		

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perindustrian diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi.

2.3 PENELAAHAN POKOK POKOK PIKIRAN DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Adapun Hasil Pokok–Pokok Pikiran DPRD dialokasikan didalam belanja antara lain Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung SKPD.

Tabel II.81
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD

N O	Jenis Belanja	Kegiatan	Keterangan
1. <i>Belanja Tidak Langsung</i>			
a.	Hibah	- Pembangunan/rehab gedung sekolah swasta - Pembangunan/rehab tempat Ibadah - Bantuan Modal Kepada Koperasi/UKM	

b.	Bantuan Sosial	- Bantuan ternak - Pemugaran Rumah Gakin	
c.	Bantuan Keuangan	- Perbaikan Infrastruktur Desa - Pembangunan/rehab infrastruktur Pertanian	
2. Belanja Langsung			
		- Pembangunan/rehab sarana dan prasarana Sekolah Negeri - Pembangunan/rehab sarana dan prasarana Kesehatan - Sarana dan prasarana pertanian - Pembangunan/rehab infrastruktur Kelurahan	

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan uraian permasalahan pembangunan berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis yang menjadi landasan dalam penentuan prioritas pembangunan.

2.4.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Telaah permasalahan daerah dijabarkan berdasarkan isu-isu strategis di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Tabel II.82.
Isu-isu strategis Pembangunan Tahun 2016

Isu –Isu Strategis Pembangunan Tahun 2016		
Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Gresik
1. Pengarustamaan Pembangunan Berkelanjutan; 2. Tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Pengarustamaan Gender; 4. Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan; 5. Perubahan Iklim 6. Kependudukan dan Keluarga berencana; 7. Perkembangan Ekonomi Makro; 8. Stabilitas Moneter; 9. Re-Industrialisasi yang berkelanjutan dan akselerasi pertumbuhan industry; 10. Pembangunan Pariwisata; 11. Pengembangan Ekonomi Kreatif; 12. Peningkatan Investasi; 13. Perkembangan Iptek dan Teknologi; 14. Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Supremasi Hukum; 15. Pemanfaatan Ruang; 16. Penanggulangan Bencana; 17. Demokrasi Lokal; 18. Pembangunan Ifrastuktur Perekonomian;	1. Bidang Infrastruktur; antara lain: a. Mendukung Kedaulatan Pangan dan Penanggulangan Kekeringan b. Terpenuhinya penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) c. peningkatan pelayanan, sarana prasarana angkutan umum; d. penyediaan angkutan multimoda yang terintegrasi; e. peningkatan daya saing biaya distribusi logistik; 2. Bidang Ekonomi; antara lain a. Ketergantungan bahan pangan pokok beras b. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sempitnya luas	1. Kualitas dan akses keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. 2. Pertumbuhan kesempatan kerja; 3. Pengembangan skill dan kompetensi pekerja; 4. Perlambatan penanggulangan kemiskinan yang telah mencapai titik kronis; 5. Peningkatan kesejahteraan nasional 6. Pengarustamaan Gender; 7. Kedaulatan Pangan; 8. Pemerataan pemanfaatan pertumbuhan ekonomi; 9. Kesiapan daya saing daerah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN; 10. Pembangunan Infrastruktur berkelanjuta; 11. Pemanfaatan Energi alternatif; 12. Kelestarian Lingkungan hidup dan eksplorasi sumber daya alam berwawasan lingkungan; 13. Penanggulangan bencana;

19.Kemandirian Pangan dan Diversifikasi Konsumsi Pangan; 20.Konservasi dan Keaneragaman Hayati;	pemilikan lahan pertanian (rata-rata 0,3 ha); c. Kualitas hasil produk pertanian (segar dan olahan) belum memenuhi permintaan pasar d. Terbatasnya sarana prasarana Infrastruktur pelabuhan. 3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; antara lain: 1. Masih Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan 2. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 3. Kurang optimalnya pelayanan UPT dalam rangka memberikan pelayanan maksimal dalam penanganan PMKS 4. Terjadinya perlambatan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur, serta masih tingginya tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan	14.Pemanfaatan tata ruang; 15.Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik; 16.Kelestarian budaya Gresik; 17.Pengembangan Pariwisata; 18.Pengembangan peran pemuda dan olahraga; 19.Supremasi hukum dan hak asasi manusia; 20.Kondusifitas interaksi beragama dalam keberagaman.
---	---	--

2.4.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Identifikasi permasalahan meliputi permasalahan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan disertai faktor-faktor penentu keberhasilan.

Tabel II.83.
Identifikasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Urusan	Permasalahan	Faktor Penentu keberhasilan
1.	Pendidikan	Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran.	1. Validasi dan updating data pokok pendidikan; 2. Pemenuhan Guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan tertentu; 3. Keterjangkauan atau akses masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan; 4. Perumusan RAPBS yang akomodatif dan akuntabel; 5. Pelaksanaan monev secara berkala.
2.	Kesehatan	Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi, pelayanan pengobatan/perawatan, pelayanan kesehatan jiwa, pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan gizi, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan	1. Promosi kesehatan termasuk penanggulangan penyakit endemik, pencegahan AIDS, dan obatan-obatan terlarang. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan kesehatan di ponkesdes, puskesmas, hingga rumah sakit; 3. Optimalisasi Unit kesehatan sekolah; 4. Penegakan peraturan daerah secara konsisten di bidang kesehatan.

		kejadian luar biasa dan gizi buruk, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pengendalian vektor, pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum, penyuluhan perilaku sehat, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan penggunaan obat generik, penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS serta pelayanan dasar dan rujukan.	
3.	Pekerjaan Umum	Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Masih tingginya kondisi lingkungan pemukiman masyarakat yang belum layak	1. Updating dan data infrastruktur wilayah; 2. Regulasi dan standarisasi harga; 3. Optimalisasi pengentasan lingkungan kumuh;
4.	Tata Ruang	Dalam implementasi RTRW harus selalu dipantau, dikendalikan dan dievaluasi khususnya dalam hal	Konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran

		pemanfaatan suatu wilayah agar tidak terjadi konflik kepentingan dimasyarakat	
5.	Perencanaan	adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya menyiapkan dokumen perencanaan yang baik agar pembangunan daerah yang dapat sustainable berkelanjutan dan memberi manfaat kepada masyarakat	1. Disiplin perencanaan terkait timeline perencanaan, metodologi, hingga substansi; 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana;
6.	Perhubungan	Meningkatnya jumlah kendaraan menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan layanan transportasi cukup tinggi	Efektifitas Pengawasan Ijin kendaraan
7.	Lingkungan Hidup	pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat. Terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dampak dari berbagai kegiatan. Penanganan sampah masih sangat terbatas sehingga diperlukan upaya khusus agar persampahan dapat tertangani secara baik	1. Penegakan regulasi pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan; 2. Daur ulang sampah dan pengelolaan sampah di tingkat pemukiman.
8.	Pertanahan	Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat	Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan instansi terkait;

		diselesaikan untuk kepastian hukum di masyarakat.	
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat.	Pengembangan sistem informasi kependudukan dan catatan sipil
10.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (<i>human trafficking</i>) terhadap perempuan dan anak.	1. Dokumen perencanaan pembangunan berbasis gender; 2. Diseminasi konsep gender melalui bimbingan teknis, seminar, atau semiloka;
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan	Peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh KB

12.	Sosial	Masih tingginya PMKS yang memerlukan penanganan	1. Updating data PMKS; 2. Rumusan existing program setelah pembinaan PMKS
13.	Ketenagakerjaan	Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.	1. Validasi data pengangguran; 2. Pertumbuhan kesempatan kerja; 3. Optimalisasi perencanaan tenaga kerja daerah;
14.	Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan	Pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing industry kecil menghadapi MEA
15.	Penanaman Modal	Iklim investasi masih perlu mendapat perhatian utama mengingat kinerja belum maksimal	1. Promosi investasi 2. Ketersediaan infrastruktur 3. Kondusifitas keamanan
16.	Kebudayaan	Punahnya kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.	Diseminasi kebudayaan di tingkat pendidikan dasar
17.	Pemuda dan Olah Raga	prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi	Optimalisasi jenjang pembinaan pada atlit usia muda dan/atau di tingkat pelajar

		persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah.	
18.	Kesbangpoldagri	Masyarakat kurang memahami terhadap aturan dan produk hukum pemerintah daerah	Sosialisasi Produk hukum daerah
19.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	Pengawasan masih dirasakan kurang sehingga akan mempengaruhi Akuntabilitas kinerja dan pembangunan daerah Pengelolaan keuangan yang tertib dan akurasi belum sepenuhnya terwujud dan aset-aset daerah yang belum efektif penggunaannya Agar legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aparatur yang profesional harus diwujudkan secara terus-menerus agar kinerjanya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	1. Perbaikan tata kelola pemerintahan; 2. Harmonisasi kemitraan politis dan teknokratis 3. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan proporsional 4. Peningkatan Pelayanan Publik
20.	Ketahanan Pangan	dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat.	1. Infrastruktur pendukung kemandirian pangan; 2. Optimalisasi produksi pertanian
21.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Masih kurangnya aktivitas kelembagaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang mandiri	Peningkatan Kapasitas kelembagaan

22.	Statistik	Perlunya data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan	Updating datan dan pengembangan sistem informasi
23.	Kearsipan	Perlunya tertib arministrasi dalam mengelola arsip	Regulasi kearsipan
24.	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan.	Optimalisasi forum komunikasi publik
25.	Perpustakaan	meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat.	Jenis dan Ragam buku
26.	Pertanian	Perlunya secara terus-menerus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani agar dapat meningkatkan jumlah dan jenis produksi Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian.	Infrastuktur pendukung pertanian, alsintan, dan penerapan teknologi serta sumber daya alternative
27.	Kehutanan	Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan.	Distribusi hasil perkebunan dan infrastuktur pendukung

28.	Energi sumberdaya mineral	Eksplorasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat.	Penegakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya mineral
29.	Pariwisata	Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten.	Promosi pariwisata dan perbaikan infrastruktur pendukung
30.	Kelautan dan perikanan	Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup.	Optimalisasi budidaya lokal dan penerapan teknologi
31.	Perdagangan	Perlunya secara terus menerus menumbuh kembangkan perdagangan, pasar dan usaha lainnya agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara konsisten	Promosi investasi dan kemudahan perizinan
32.	Industri	Pertumbuhan sektor industri masih dirasakan belum optimal sehingga belum banyak menyerap tenaga kerja	Peningkatan Investasi padat karya

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

P

erumusan rancangan kerangka ekonomi daerah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro yang dimaknai sebagai kebijakan daerah untuk mencapai *full employment* atau pemanfaatan sumber daya yang ada dalam kegiatan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai distribusi pendapatan yang merata. Secara yuridis, pertimbangan kondisi ekonomi makro dalam perumusan rancangan ekonomi daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat (3) huruf e yaitu “memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 84 dijelaskan bahwa:

- (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara substansial, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah berlandaskan terhadap RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2010-2015 sebagai masa transisi, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Kesenambungan perencanaan ini dimaksudkan

untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah sebagai landasan dalam penyusunan program-program pembangunan daerah. Secara garis besar, kebijakan pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tertuang pada RPJPD Tahap III Tahun 2016-2020 adalah peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan sinergitas industri manufaktur, pertanian, kelautan, dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan dengan mendorong peningkatan efisiensi, produktifitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Berdasarkan telaah yuridis dan substantiasial sebagaimana dimaksud di atas, maka secara garis besar bahwa rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah sebagai instrument kebijakan daerah merupakan landasan dalam perumusan program-program pembangunan berdasarkan telaah kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik

Kerangka ekonomi daerah meliputi perumusan arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi ekonomi daerah Tahun 2014 dan perkiraan Tahun 2015, dan identifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2016 dan 2017 dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi sebagai berikut;

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengacu pada sasaran utama serta analisis dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi maka arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- (b) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan;
- (c) Mempercepat pembangunan infratraktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
- (d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
- (e) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;

(f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;

(g) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah;

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dirumuskan kebijakan ekonomi nasional yaitu;

“Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.”

Kemandirian ekonomi tersebut dicapai melalui peningkatan kedaulatan pangan; kedaulatan energi; pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; pengembangan ekonomi kemaritiman dan kelautan, serta penguatan sektor keuangan dan kapasitas fiskal negara.

Di tingkat provinsi, arah kebijakan ekonomi Tahun 2016 diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serangkaian kebijakan di bidang makro dan mikro. Pada tataran Kebijakan Makro Ekonomi, diarahkan untuk:

- (a) Mendorong otoritas moneter bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dalam rangka kondusivitas iklim berusaha.
- (b) Mendorong otoritas moneter untuk mengevaluasi suku bunga bank pelaksana agar lebih kompetitif dalam rangka mendukung pembiayaan sektor riil.
- (c) Ikut serta dalam menjaga stabilitas makro ekonomi di daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi melalui optimalisasi kinerja TPID maupun fasilitas bantuan ongkos angkut untuk komoditi tertentu yang pada waktu-waktu tertentu mengalami inflasi yang tinggi.

Pada tataran Mikro Ekonomi, dalam rangka menumbuhkan sektor riil diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dalam rangka peningkatan pencapaian swasembada pangan, khususnya padi, jagung, daging dan gula maupun peningkatan produksi signifikan komoditi kedelai. Selain itu, diselenggarakan peningkatan produksi dan daya saing sektor industri, termasuk industri kreatif dengan menciptakan penataan struktur industri yang mampu membangun jaringan/hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan telaah terhadap arah kebijakan ekonomi di tingkat nasional dan provinsi maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut;

a. **Kebijakan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**

Arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap pelbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik meliputi;

1. *Peningkatan Investasi* dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta penyempurnaan produk hukum daerah yang mendukung penanaman modal asing dan dalam negeri; peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan dasar; kemudahan pelayanan perizinan; serta peningkatan kegiatan promosi dan potensi daerah;
2. *Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto* dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Kabupaten Gresik yaitu industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, pertambangan dan penggalian, dan pertanian serta mendukung sektor-sektor usaha lainnya melalui peningkatan infrastruktur pendukung sektor unggulan, penyempurnaan produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan lapangan usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, dan penerapan teknologi serta pemanfaatan sumber daya energi alternatif;
3. *Peningkatan Daya Saing Daerah* dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia pelaku ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan infrastruktur pendukung di sektor industri kecil dan industri besar.
4. Upaya lain untuk mendorong perekonomian regional Kabupaten Gresik agar tumbuh secara stabil serta menghindari fluktuasi yang tajam adalah dengan mengefektifkan belanja daerah. Perumusan program-program pembangunan yang diarahkan untuk membangun perekonomian Kabupaten Gresik pada tataran pemanfaatan sumberdaya alam; pembangunan infrastruktur berkelanjutan; dan peningkatan kualitas.

b. **Kebijakan dalam Mengendalikan Laju Inflasi**

Angka Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak

langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain.

Di tingkat daerah, kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi pada kisaran 6-10% melalui pengawasan terhadap harga dan barang jasa, peningkatan produktivitas, dan memperlancar distribusi serta mengoptimalisasi kinerja tim pengendali inflasi daerah.

c. Kebijakan dalam Mengurangi Disparitas Ekonomi

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi berdampak sistemik terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerataan kebermanfaatan hasil pertumbuhan ekonomi secara merata merupakan arah kebijakan ekonomi daerah untuk mengentaskan kemiskinan yang telah mencapai taraf kronis dan menekan laju pengangguran.

Dalam upaya menekan laju pengangguran, kebijakan kenaikan upah minimal kabupaten ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan agar terjadi stabilitas upah riil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik ternyata cenderung lebih padat modal daripada padat karya yang terbukti dari signifikannya hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif, maka cara yang tepat untuk menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik adalah dengan tetap mendorong laju pertumbuhan ekonomi namun lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan investasi yang padat karya daripada padat modal.

Pada sektor kemiskinan, diperlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang khas atau sesuai dengan karakteristik desa mengingat tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik telah mencapai titik kronis yang sulit untuk diantisipasi dengan program pengentasan kemiskinan secara umum. Penguatan dan validasi data kemiskinan hingga di tingkat desa harus didukung komitmen pelaku pembangunan untuk memanfaatkan data tersebut sebagai sasaran

program-program pembangunan serta didukung penganggaran dan pengawasan yang *pro poor*.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi nasional selama Tahun 2010-2014 terjaga pada kisaran 6% dan telah mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga telah mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga tingkat penganggiran terbuka telah berhasil diturunkan dari 7.1% pada tahun 2010 menjadi 5.94% pada tahun 2014. Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang tetap terpelihara dengan laju inflasi dalam batas aman. Pergerakan nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi namun dalam pergerakan yang sedangkan defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3%.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan secara periodik pada 2015-2019 maka kinerja faktor ekonomi diproyeksikan terus meningkat dengan memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat melambat pada kuartal pertama Tahun 2015 hingga mencapai pada kisaran 4%. Sementara tingkat kemiskinan nasional diproyeksikan menurun hingga pada kisaran 9-10% pada tahun 2015 dibanding Tahun 2014 yang mencapai 11.25%. Adapun tingkat pengangguran terbuka nasional diproyeksikan menurun dari 5.9% pada Tahun 2014 menjadi kisaran 5,5-5,8% pada Tahun 2015.

Pada tingkat provinsi, Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 tumbuh 5,86%, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2014 ini masih mengindikasikan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2012 yang tumbuh 6,64% dan tahun 2013 tumbuh 6,08%. Dengan sistem perekonomian yang amat terbuka, faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, antara lain Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang, yang berdampak pada kinerja ekspor Nasional dan Jawa Timur. Disamping itu melemahnya kurs rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga acuan Bank Indonesia (SBI) yang terus meningkat di tahun 2014 sampai pada 7,75%, sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Lebih lanjut, pada sektor pertumbuhan PDRB terdapat tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur yaitu

industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014 masing-masing sebesar 28,90 persen, 17,24 persen dan 13,73 persen. Total kontribusi ketiganya sebesar 59,87 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian terkini maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diproyeksikan pada kisaran 6,00-6,55%. Sektor-sektor yang memberikan sumber pertumbuhan tinggi diharapkan mampu berakselerasi lebih cepat di tahun 2015. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur. Kebijakan di bidang perijinan yang lebih atraktif juga diharapkan mampu menarik investasi di Jawa Timur.

Berdasarkan telaah terhadap kerangka ekonomi nasional dan Provinsi Jawa timur maka Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Gresik dirumuskan sebagai analisa perkembangan ekonomi makro yang merupakan evaluasi pada tahun sebelumnya serta proyeksi pada tahun mendatang. Analisa perkembangan ekonomi makro yang digunakan dalam perumusan kerangka ekonomi daerah antara lain:

- (1) Pertumbuhan PDRB;
- (2) Pendapatan Perkapita;
- (3) Pertumbuhan Ekonomi;
- (4) Tingkat Investasi;
- (5) Laju inflasi;
- (6) Tingkat Pengangguran; dan
- (7) Tingkat Kemiskinan.

(1) **Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sebagai proxy pertumbuhan ekonomi karena PDRB merupakan *single variable* yang paling mendekati untuk mengukur *aggregate economic activity* karena PDRB merupakan penjumlahan dari output semua sektor dalam suatu perekonomian daerah, yaitu *consumption, investment, government expenditures, dan net export*. Dengan demikian, fluktuasi (pertumbuhan) dari PDRB juga

mencerminkan fluktuasi dari kegiatan suatu perekonomian di tingkat regional/daerah.

PDRB dibentuk dari sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Adapun jenis PDRB yang digunakan meliputi:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB);
- b. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (PDRB ADHK 2000);

Selama tahun 2011 s.d. 2014, PDRB Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel III.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

NO.	U R A I A N	2011	2012	2013	2014
1.	PDRB ADHB (Juta Rp)	44.082.264,57	50.185.435,99	46.666.268,22	52.753.459,98
2.	PDRB ADHK 2000 (Juta Rp)	18.081.043,89	19.424.161,63	20.811.653,46	22.274.018,91

Sumber data: BPS Kab. Gresik

Persentase rata-rata pertumbuhan PDRB (r) selama Tahun 2011-2014 diperoleh melalui pendekatan linier dengan data dasar Tahun 2011 sedangkan proyeksi Tahun 2015 menggunakan pendekatan ekonometri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

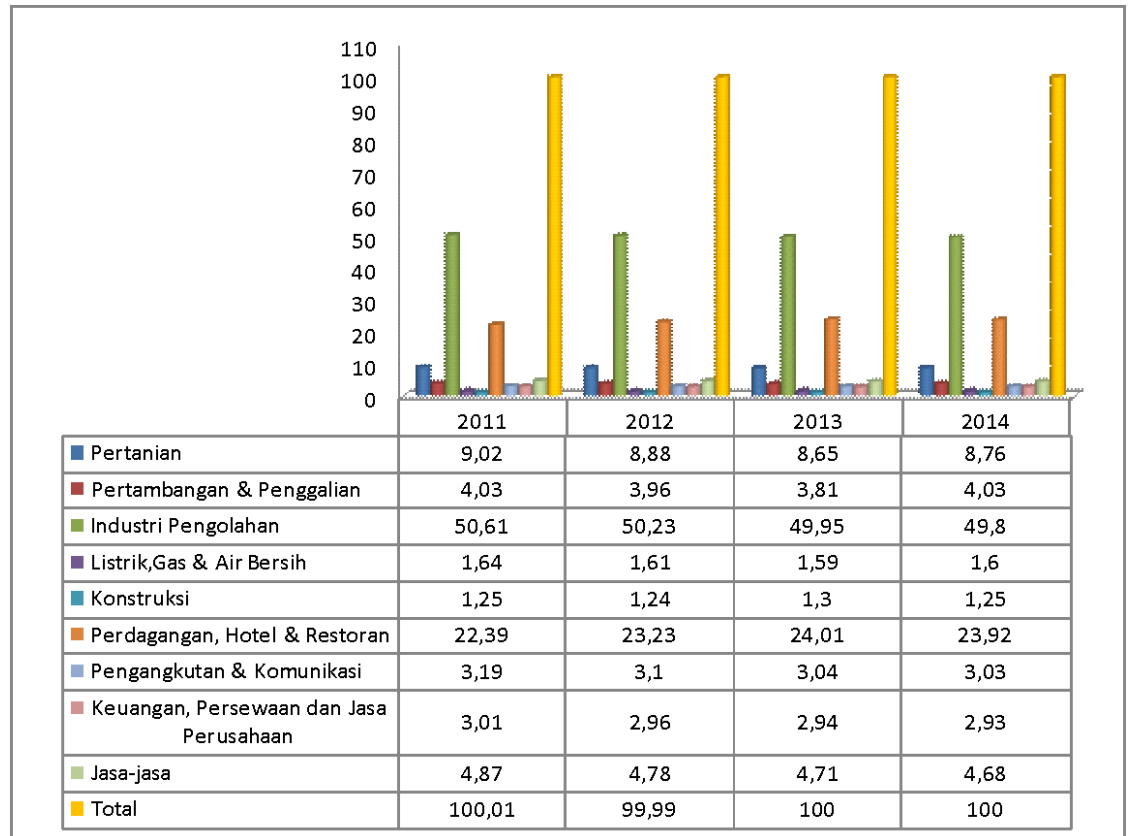
Tabel III.2
Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2015

NO.	Uraian	R	Proyeksi Tahun 2015 (Rp)
1.	PDRB ADHB (Juta Rp)	14.17%	57.222.223,99
2.	PDRB ADHK 2000 (Juta Rp)	7.20%	23,877,696.59

Struktur perekonomian Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2014 masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pertanian,

berdasarkan distribusi persen ADHB yang kontribusi ketiganya sebesar 82,02% tahun 2011 meningkat hingga mencapai 82,48% tahun 2014. Peningkatan kontribusi ketiga sektor tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.2
Grafik Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014



SSumber Data : LKPJ AMJ Tahun 2010-2015

(2) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Perkapita merupakan hasil pembagian PDRB terhadap jumlah penduduk. Semakin besar pendapatan per kapita maka tingkat kemakmuran masyarakat diestimasikan semakin tinggi. Adapun jenis pendapatan per kapita yang digunakan meliputi:

- Pendapatan Perkapita berdasarkan PDRB ADHB;
- Pendapatan Perkapita berdasarkan PDRB ADHK;

Selama tahun 2011 s.d. 2014, Pendapatan Perkapita Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel III.3
Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

NO.	U R A I A N	2011	2012	2013	2014
1.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp)	37.450.000,00	41.420.000,00	46.670.000,00	65.609.306,73
2.	PDRB ADHK Per Kapita (Rp)	15.270.000,00	16.030.000,00	16.960.000,00	22.274.018,91

Sumber data: BPS Kab. Gresik

Persentase rata-rata pertumbuhan Pendapatan Perkapita (r) selama Tahun 2011-2014 diperoleh melalui pendekatan linier dengan data dasar Tahun 2011 sedangkan proyeksi Tahun 2015 menggunakan pendekatan ekonometri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.4
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Gresik Tahun 2015

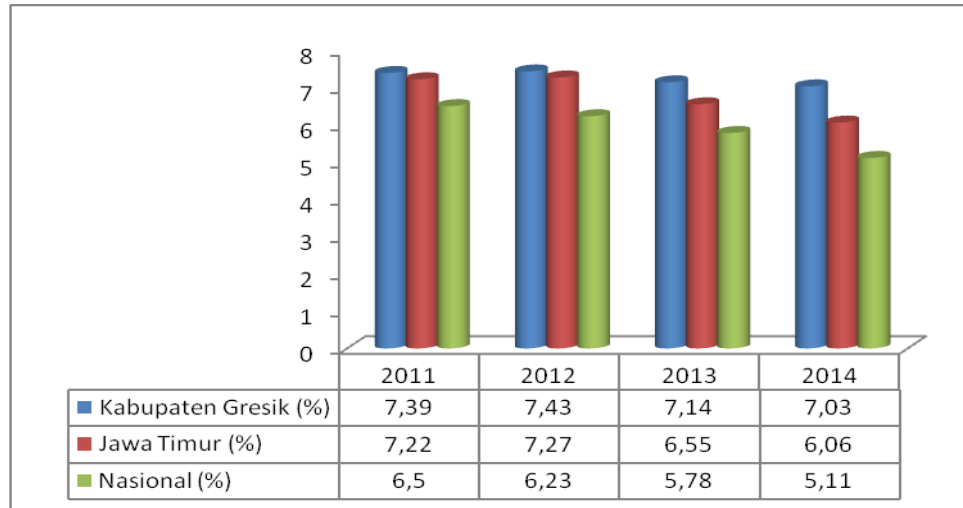
NO.	Uraian	r	Proyeksi Tahun 2015 (Rp)
1.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp)	21.29%	81,038,340.65
2.	PDRB ADHK Per Kapita (Rp)	14.04%	25,824,028.91

(3) Pertumbuhan Ekonomi

Pada kurun waktu 2011-2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuaktifr namun lebih tinggi atau di atas rata-rata

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar III.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2014



Sumber data: BPS Kab. Gresik Tahun 2014

Berdasarkan Metode artificial neural network (ANN) pada analisa Ekonomi Makro Regional dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah (2014: 128) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 7.84%. Trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung terus bergerak naik tersebut juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan laju inflasi daerah.

(4) **Tingkat Investasi**

Realisasi investasi penanaman modal Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten terutama di sektor penanaman modal dalam negeri sedangkan di sektor penanaman modal asing mengalami fluktuaktif dengan nilai investasi terbesar terjadi pada Tahun 2013 sedangkan investasi terendah terjadi pada tahun 2011.

Keberhasilan dalam peningkatan realisasi penanaman modal tersebut didukung oleh kemudahan dalam pelayanan perizinan di daerah serta kesiapan regulasi yang mendukung penanaman modal di daerah; ketersediaan infrastruktur dan penataan perwilayah untuk mendukung realisasi penanaman modal; peningkatan kegiatan promosi akan potensi daerah; dan dukungan Pemerintah Pusat untuk Pengembangan Penanaman

Modal yang progresif di wilayah Kabupaten Gresik antara lain pengembangan pelabuhan laut, prasarana transportasi dan kawasan industri, dll. Realisasi investasi dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Gresik
Tahun 2012 s.d. 2014

No.	Uraian	Satuan	2012	2013	2014
1.	Realisasi Investasi PMDN	Rp. Juta	3.292.566	4.794.719	8.998.738,4
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing	US \$ (000)	715.790,7	842.750,3	171.921,6

Sumber : LKPJ AMJ Kabupaten Gresik 2011-2015

Persentase rata-rata pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal (r) selama Tahun 2011-2014 diperoleh melalui pendekatan linier dengan data dasar Tahun 2012 sedangkan proyeksi Tahun 2015 menggunakan pendekatan ekonometri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

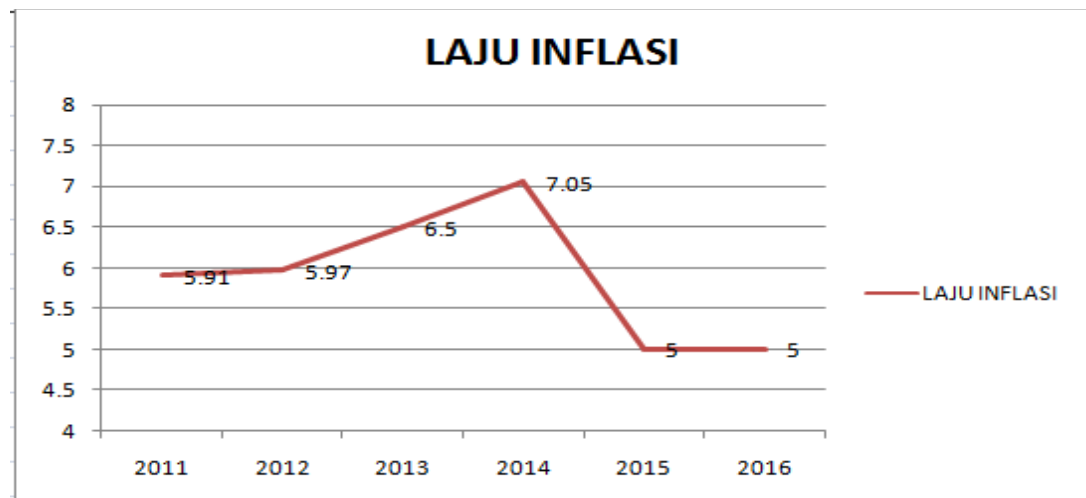
Tabel III.6
Proyeksi Realisasi Investasi Penanaman Modal
Kabupaten Gresik Tahun 2015

NO.	Uraian	r	Satuan	Proyeksi Tahun 2015 (Rp)
1.	Realisasi Investasi PMDN	66.65%	Rp. Juta	3,292,566.00
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing	-20.62%	US \$ (000)	715,790.70

(5) Laju Inflasi

Selama tahun 2011-2014, tingkat inflasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang tinggi yang disebabkan oleh pelbagai faktor baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional seperti kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, kenaikan harga BBM, kerusakan infrastruktur yang menghambat distribusi, hingga terjadinya force major seperti bencana alam. Pengendalian tingkat inflasi merupakan upaya dalam menciptakan ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah pengembangan ekonomi serta daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Gresik dengan proyeksi tingkat inflasi pada tahun 2015, yang diperkirakan turun pada titik 5 % digambarkan sebagai berikut;

Gambar III.4.
Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016

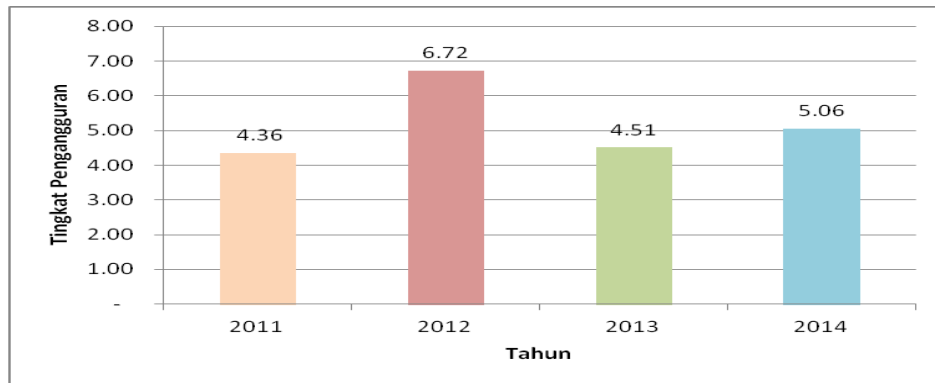


(6) Tingkat Pengangguran

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4.51% dari 6.72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0.15% atau mencapai 5,06% pada tahun 2014.

Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi yang cenderung padat modal. Adapun fluktuasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2014 sebagaimana gambar berikut:

Gambar III.5.
Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2014

Berdasarkan term references tingkat pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014, maka *trendline* pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2015 diproyeksikan 4.6175% .Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014-2019 diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata kesempatan kerja pada tahun 2009-2013 sebesar 0,16%. Dengan menggunakan angka pertumbuhan rata-rata tersebut maka proyeksi kesempatan kerja tahun 2015 mencapai 498.057 orang yang tersebar di sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. adapun proyeksi persentase pertumbuhan kesempatan kerja mencapai 1,07%.

(7) Tingkat Kemiskinan

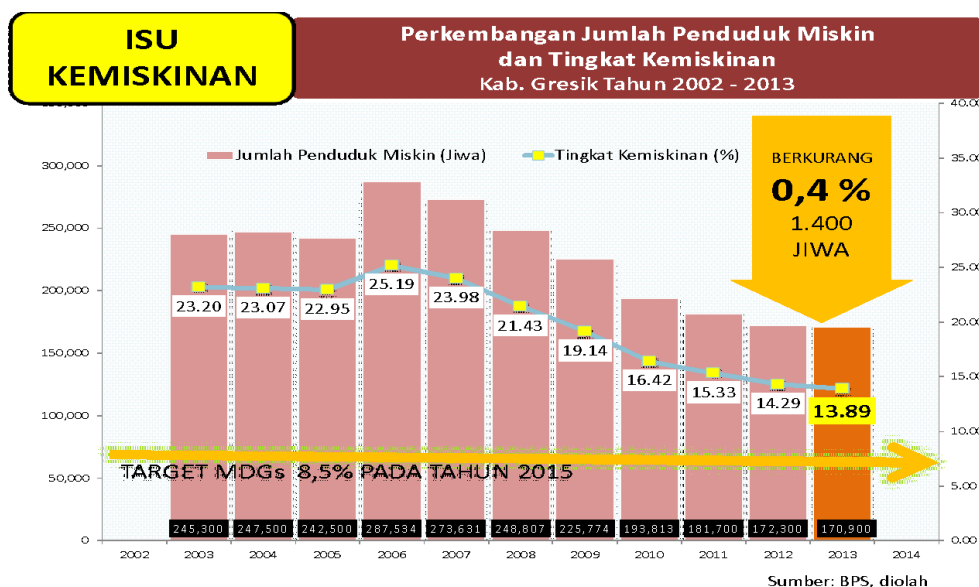
Garis Kemiskinan/Poverty Line adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK dihitung pada tingkat kabupaten / kota, dan berbeda-beda jumlahnya untuk masing-masing kabupaten. Pada Tahun 2013, Garis Kemiskinan untuk Kabupaten Gresik adalah Rp.331.296,- per kapita per bulan, merupakan nilai tertinggi ke-6 dari 38 Kabupaten / Kota se-Jawa Timur. GK Kabupaten Gresik juga lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah Rp.303.843,- sedangkan Nasional sebesar Rp. 292.951,-

Pada tahun yang sama, hasil Susenas menunjukkan kurang lebih 170.900 jiwa atau 13,89% jumlah penduduk di Kabupaten Gresik mempunyai

pendapatan kurang dari Rp. 331.296,- per kapita per bulan. Dibandingkan dengan kabupaten / kota lain se-Jawa Timur, jumlah ini cukup besar. Dari 38 Kabupaten / Kota, Kabupaten Gresik menduduki peringkat ke-25 dalam tingkat kemiskinan dan peringkat ke-26 dalam jumlah penduduk miskin.

Pada Tahun 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mencapai 13.89% atau lebih tinggi dari Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% dan Tingkat Kemiskinan Nasional sebesar 11.47%. Pada perkembangan antar waktu, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 4 Tahun, yaitu Tahun 2009 – 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik telah berkurang sebanyak 5.25 poin persen, sedang jumlah penduduk miskin berkurang 54.874 jiwa sebagaimana digambarkan pada grafik berikut;

Gambar III.6.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014



Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik di atas, maka *trendline* tingkat kemiskinan pada Tahun 2014 diproyeksikan

sebesar 12.025% sedangkan pada Tahun 2015 diperoyeksikan sebesar 10.762%. Secara garis besar, pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara konsisten namun mengalami perlambatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik adalah kemiskinan kronis yang membutuhkan program pengentasan khusus berbasis karakteristik desa.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Perumusan tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2016 dan 2017 memperhatikan arah kebijakan ekonomi pemerintah di tingkat pusat dan provinsi, kondisi perekonomian global dan lokal, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;

(a). Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, tantangan pokok yang harus dihadapi adalah ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi; penguatan struktur ekonomi di sektor primer, sekunder, dan tersier secara terpadu; reformasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah; keterbatasan dalam penerapan dan penguasaan teknologi; dan keterbatasan dalam membiayai pembangunan. Selain itu, masih sangat besar anggaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak produktif seperti konsumsi BBM.

Mengagacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2016 dijabarkan bahwa tantangan pokok perekonomian daerah di tingkat provinsi meliputi Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Jawa Timur; globalisasi perekonomian menuntut Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, daya saing serta meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui international trade friendship; pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur; dan Penanganan Bencana Alam

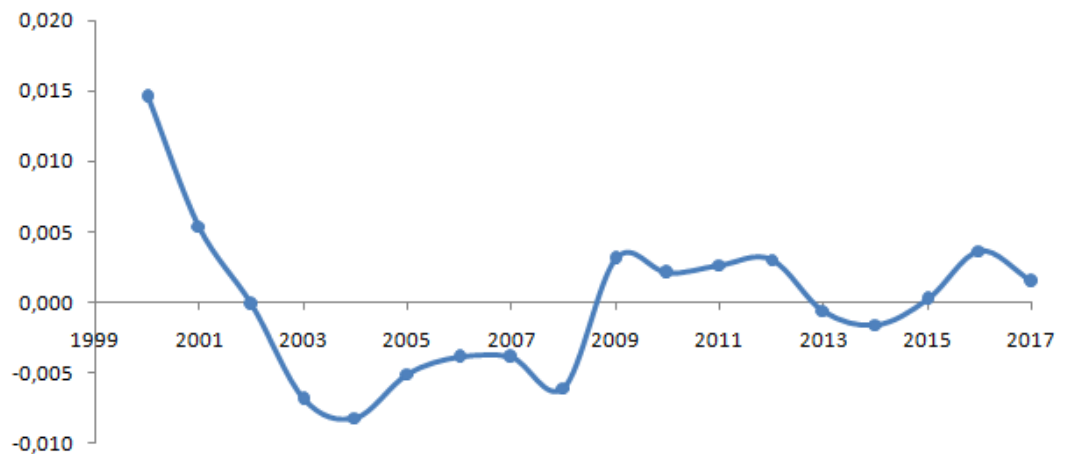
Berdasarkan tantangan pokok perekonomian daerah yang telah dirumuskan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur maka tantangan pokok yang dirumuskan oleh Kabupaten Gresik adalah;

- a. Perdagangan bebas dengan persaingan yang kompetitif di tingkat Asia Tenggara yang dibingkai dalam koridor Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut peningkatan daya saing daerah baik di sektor industri besar maupun industri kecil; peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan guna mendorong perekonomian daerah, serta optimalisasi penguasaan dan penerapan teknologi dan energy alternatif;
- b. Ketahanan dan kemandirian pangan;
- c. Inklusifitas pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada pemerataan pemanfaatan pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat;
- d. Kemiskinan yang telah mencapai titik kronis dengan artian membutuhkan penanganan secara khusus atau berdasarkan karakteristik kemiskinan seperti feminisme kemiskinan; kemiskinan di perkotaan, dsb;
- e. Fluktuatif tingkat pengangguran yang menunjukkan tingkat pengangguran berada pada kisaran yang cukup tinggi.

(b). Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Prospek perekonomian daerah pada Tahun 2016 dan 2017 diproyeksikan semakin membaik. Berdasarkan kajian ekonomi makro regional, siklus bisnis Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang lebih baik pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, juga diproyeksikan mengalami *peak* yang mendorong fase ekspansi bisnis di Kabupaten Gresik sebagaimana tergambar pada grafik berikut;

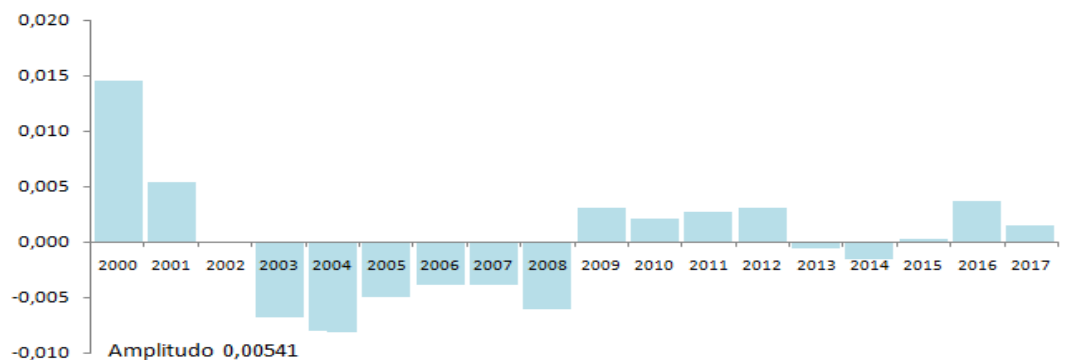
Gambar III.7
Proyeksi Siklus Bisnis Kabupaten Gresik



Sumber : Kajian Analisis Ekonomi Makro Regional Tahun 2014

Pada periode amplitudo siklus 2009-2017, diproyeksikan bahwa amplitudo siklus bisnis sebesar 0.001821 atau lebih kecil dibandingkan periode 2000-2008 yang mencapai 0.007305. Semakin kecil amplitudo yang ditunjukkan maka siklus bisnis sebagai fluktuasi dari *aggregate economic activity* mengalami stabilitas.

Gambar III.8
Amplitudo Siklus Kabupaten Gresik



Sumber : Kajian Analisis Ekonomi Makro Regional Tahun 2014

Ditinjau dari sektor lain, prospek perekonomian kabupaten Gresik semakin meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh pelbagai berikut sebagai berikut:

- Pertumbuhan PDRB yang terus meningkat secara konsisten dari Tahun 2011-2014 dengan persentase laju pertumbuhan PDRB sebesar 14.17% mengacu pada PDRB ADHB dan sebesar 7.20% mengacu pada PDRB ADHK;
- Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita yang terus meningkat secara konsisten dari Tahun 2011-2014 dengan persentase laju pertumbuhan Pendapatan Per Kapita sebesar 21.29% mengacu pada PDRB ADHB per kapita dan sebesar 14.04% mengacu pada PDRB ADHK per kapita;

- c. Ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang perekonomian seperti pembangunan Bendung Gerak Sembayat, stadion bertaraf internasional, dsb;
- d. Potensi pariwisata yang khas seperti Pulau Bawean dan wisata Religi Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim ditunjang kondusifitas keamanan dan ketertiban sosial.
- e. Kemudahan pelayanan perizinan, penyempurnaan produk hukum daerah, serta peningkatan promosi dalam penanaman modal baik berskala dalam negeri maupun asing.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), dan Lain-lain pendapatan yang sah (meliputi hibah, dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya).

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2016 PAD diproyeksikan sebesar Rp. 868.872.334.925,- yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 428.631.098.500,- Retribusi Daerah Rp. 235.446.833.725,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 28.626.500.000,- Dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 176.167.902.700,-.

b. Dana Perimbangan

Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2016 dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.131.468.607.462,- terdiri atas dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 214.230.768.462,- Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 873.265.959.000,- Sedangkan Dana alokasi Khusus sebesar Rp. 43.971.880.000,-.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2016 alokasi Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 511.013.077.450,- sebesar Rp. 190.020.686.972,- dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sebesar Rp. 301.623.952.478,- dari Dana penyesuaian dan otonomi khusus dan Dana Bantuan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 18.121.653.000,-.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Pencairan dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan penerimaan Piutang Daerah).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dengan berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli daerah dengan cara : membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi

- penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya ;
 - c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah ;
 - d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD Penghasil;
 - f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah ;
 - h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah dari APBN adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagiaan dalam Dana Perimbangan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan
 3. Meningkatkan koordinasi terhadap Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang merupakan penerimaan dari dana Bagi Hasil Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.446.755.182.417,22 dan Belanja Langsung sebesar

Rp.1.314.524.224.541 Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif, dengan mengarahkan pada prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja.
3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan.
5. Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana.
7. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah.
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.
10. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.

Selain diarahkan dalam pemenuhan 10 prioritas pembangunan daerah, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Gresik Tahun 2016;
2. Belanja Daerah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Gresik yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler diutamakan untuk memenuhi belanja pegawai, serta kegiatan non urusan dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

4. Stimulus pengalokasian anggaran ke desa melalui alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan;
5. Pelaksanaan kebijakan hibah dan bantuan sosial memnuhi pesyratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dipenuhi setelah urusan wajib tercukupi.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terbagi dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun 2016 arah kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) ; pencarian dana cadangan ; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ; penerimaan pinjaman daerah ; penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2016 adalah Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 adalah pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo

Tabel berikut menunjukkan arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan nilai nominal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, sebagai berikut:

Tabel III.7
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH	1,329,150,833,376.13	1,650,595,497,662.55	1,840,555,714,829.17	2,206,385,836,981.47	2,484,678,421,337.00	2,511,354,019,837.00	2,598,241,253,329.50
Pendapatan Asli Daerah	273,975,992,140.13	427,580,866,657.55	502,766,529,904.17	700,587,792,877.47	842,196,736,425.00	868,872,334,925.00	955,759,568,417.50
Pajak Daerah	135,091,751,487.11	252,405,752,927.50	287,204,002,798.08	386,741,657,665.39	410,455,500,000.00	428,631,098,500.00	471,494,208,350.00
Retribusi Daerah	37,969,820,988.52	63,099,218,949.16	68,748,761,969.35	111,030,586,229.39	228,946,833,725.00	235,446,833,725.00	258,991,517,097.50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,330,282,422.80	8,965,887,804.33	19,586,929,857.01	21,557,353,346.85	26,626,500,000.00	28,626,500,000.00	31,489,150,000.00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	98,584,137,241.70	103,110,006,976.56	127,226,835,279.73	181,258,195,635.84	176,167,902,700.00	176,167,902,700.00	193,784,692,970.00
Dana Perimbangan	772,487,164,476.00	947,619,650,810.00	996,197,113,935.00	1,065,300,023,150.00	1,131,468,607,462.00	1,131,468,607,462.00	1,131,468,607,462.00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	165,066,565,476.00	153,246,269,810.00	142,187,422,935.00	129,851,244,150.00	214,230,768,462.00	214,230,768,462.00	214,230,768,462.00
Dana Alokasi Umum	561,081,899,000.00	711,868,321,000.00	804,903,511,000.00	863,397,519,000.00	873,265,959,000.00	873,265,959,000.00	873,265,959,000.00
Dana Alokasi Khusus	46,338,700,000.00	82,505,060,000.00	49,106,180,000.00	72,051,260,000.00	43,971,880,000.00	43,971,880,000.00	43,971,880,000.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282,687,676,760.00	275,394,980,195.00	341,592,070,990.00	440,498,020,954.00	511,013,077,450.00	511,013,077,450.00	511,013,077,450.00
H i b a h	0.00		0	-	1,246,785,000.00	1,246,785,000.00	1,246,785,000.00
Dana Darurat	0.00		0	-	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil Pajak Dr Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105,787,559,676.00	104,040,169,195.00	124,619,733,990.00	185,113,366,954.00	190,020,686,972.00	190,020,686,972.00	190,020,686,972.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144,728,582,084.00	132,383,521,000.00	199,836,702,000.00	234,108,077,000.00	301,623,952,478.00	301,623,952,478.00	301,623,952,478.00

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32,171,535,000.00	38,971,290,000.00	17,135,635,000.00	21,276,577,000.00	18,121,653,000.00	18,121,653,000.00	18,121,653,000.00
BELANJA DAERAH	1,266,261,710,603.81	1,451,130,800,756.48	1,897,270,106,456.32	2,172,832,221,494.31	2,785,136,698,618.95	2,707,790,046,814.17	2,935,922,964,137.94
Belanja Tidak Langsung	838,208,701,520.03	924,092,279,008.48	992,715,498,549.11	1,124,406,247,047.25	1,364,149,448,657.95	1,446,755,182,417.17	1,548,784,613,301.24
Belanja Pegawai	586,914,334,219.00	692,857,652,655.95	706,915,344,010.00	800,421,027,329.00	895,248,398,899.50	963,197,752,375.97	1,036,304,461,781.31
Belanja Bunga	876,990,183.03	600,892,650.53	329,156,539.11	67,000,868.25	0	0	0
Belanja Subsidi	0.00		0		0	0	0
Belanja Hibah	56,779,203,000.00	104,850,456,000.00	107,818,513,200.00	103,401,483,000.00	148,428,248,108.00	139,598,926,850.00	139,598,926,850.00
Belanja Bantuan Sosial	101,130,470,048.00	17,500,125,345.00	16,870,050,000.00	27,024,005,000.00	21,854,700,000.00	28,180,800,000.00	28,180,800,000.00
Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	242,590,500.00		0	638,334,000.00	41,540,846,800.00	66,407,793,222.50	73,048,572,544.75
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota/Pem. Desa/ Partai Politik	90,082,754,550.00	107,062,942,300.00	160,020,833,800.00	192,277,210,950.00	255,077,254,850.45	246,869,909,968.70	246,869,909,968.70
Belanja Tidak Terduga	2,182,359,020.00	1,220,210,057.00	761,601,000.00	577,185,000.00	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,750,000,000.00
							0.00
Belanja Langsung	428,053,009,083.78	527,038,521,748.00	904,554,607,907.21	1,048,425,974,447.06	1,200,985,585,140.00	1,261,034,864,397	1,387,138,350,836.70
Belanja Pegawai	72,624,585,133.00	80,810,992,834.00	120,755,307,751.00	86,264,228,669.00	97,903,059,170.00	102,798,212,129	113,078,033,341.35
Belanja Barang dan Jasa	228,335,485,223.78	286,798,862,532.00	366,033,201,747.21	438,356,848,596.00	510,303,678,161.00	535,818,862,069	589,400,748,275.96
Belanja Modal	127,092,938,727.00	159,428,666,382.00	417,766,098,409.00	523,804,897,182.00	592,778,847,809.00	622,417,790,199	684,659,569,219.40
					0	0	
SURPLUS / (DEFISIT)	62,889,122,772.32	199,464,696,906.07	-56,714,391,627.15	33,557,093,731.16	(80,456,612,460.95)	-196,436,026,977.17	(337,681,710,808.44)
PEMBIAYAAN DAERAH	37,149,206,896.91	49,735,243,633.27	235,947,231,139.48	176,890,979,644.53		0	0

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Pembiayaan	45,148,340,066.35	100,754,096,368.23	249,200,440,539.44	179,282,766,311.33		0	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	42,667,901,317.35	100,038,329,669.23	249,200,440,539.44	179,232,839,512.33	80,456,612,460.95	0	0
Pencairan Dana Cadangan	0.00		0		0.00	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00		0		0.00	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00		0		0.00	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2,480,438,749.00	715,766,699.00	0	49,926,799.00	0.00	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0.00		0	-	0.00	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	7,999,133,169.44	51,018,852,734.96	13,253,209,399.96	2,391,786,666.80	0.00	0	0
Pembentukan Dana Cadangan	0.00		0		0.00	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,499,133,169.48	45,289,000,000.00	10,680,000,000.00	-	0.00	0	0
Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	2,499,999,999.96	5,729,852,734.96	2,573,209,399.96	2,391,786,667.00		0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00		0		0.00	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	100,038,329,669.23	249,199,940,539.34	179,232,839,512.33	210,448,073,375.89	0.00	0	0

BAB VI

PENUTUP

R

encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 yang menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, isu-isu strategis bertaraf lokal, regional, nasional hingga global. RKPD Tahun 2016 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sedangkan secara substansial dalam penyusunan RKPD ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 sebagai masa transisi serta mengintegrasikan kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD hingga Musrenbang Kabupaten yang berfungsi sebagai forum untuk menjaring aspirasi,

penyelarasan, dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Adapun Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan bagi masing-masing SKPD untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 menjadi Rencana Kerja SKPD Tahun 2015.
2. Dalam rangka konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran daerah maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun atau review RPJM Desa dan RKPDesa Tahun 2016.
4. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dengan sumber pendanaan meliputi APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten, partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang pada Rencana RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 memiliki akses secara terbuka dalam

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan progam/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016, Pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

R

rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dan/pagu indikatif,

catatan penting serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi capaian kerja dan kebutuhan pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD 2016 Kabupaten Gresik merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2014 dan proyeksi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan untuk dapat memecahkan permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

Rencana penganggaran belanja tahun 2016 sebesar Rp. 2.707.790.046.814,17 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.446.755.182.417,17 dan belanja langsung sebesar Rp 1.314.524.224.541,-. Adapun rincian Belanja Langsung Prioritas dari masing-masing SKPD sebagaimana pada Lampiran I.

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Rincian Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada Lampiran II.

Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Lampiran I dan II merupakan Belanja Prioritas, sedangkan Belanja yang belum Prioritas sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara MUSRENBANG KABUPATEN.

Tabel V.1
RINCIAN BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN TAHUN 2016
1	Dinas Pendidikan	111.771.403.525,0 0
2	Dinas Kesehatan	128.350.849.650,0 0
3	RSUD Ibnu Sina	139.265.278.100,0 0
4	Dinas Pekerjaan Umum	495.938.836.385,0 0
5	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.399.545.000,00
6	Dinas Perhubungan	16.718.149.100,00
7	Badan Lingkungan Hidup	29.787.095.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.408.940.800,00
9	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	6.412.148.000,00
10	Dinas Sosial	28.795.007.500,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.783.084.150,00
12	Dinas Tenaga Kerja	6.614.023.900,00
13	Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan	11.444.450.000,00
14	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	7.615.982.500,00
15	Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Pemuda dan Olahraga	12.472.155.000,00
16	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	7.004.705.600,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	6.251.377.850,00
18	Bagian Umum	34.516.988.282,00
19	Bagian Perlengkapan	17.488.499.800,00
20	Bagian Humas	4.858.763.958,00
21	Bagian Administrasi Pembangunan	2.400.000.000,00
22	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	29.490.375.000,00
23	Bagian Administrasi Perekonomian	3.225.000.000,00
24	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	4.300.000.000,00
25	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	7.997.280.975,00
26	Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi	3.025.000.000,00
27	Bagian Hukum	2.909.805.562,00
28	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	3.454.500.000,00
29	Sekretariat DPRD	38.489.765.654,00
30	Inspektorat	3.526.050.000,00
31	Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.961.384.400,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN TAHUN 2016
32	Badan Kepegawaian Daerah	21.488.108.300,00
33	Kecamatan Gresik	3.614.170.000,00
34	Kecamatan Kebomas	1.908.011.000,00
35	Kecamatan Manyar	814.240.000,00
36	Kecamatan Cerme	705.600.000,00
37	Kecamatan Benjeng	3.818.798.950,00
38	Kecamatan Balong Panggang	1.243.278.500,00
39	Kecamatan Duduk Sampeyan	716.425.000,00
40	Kecamatan Driyorejo	830.200.000,00
41	Kecamatan Wringinanom	1.696.590.000,00
42	Kecamatan Kedamean	713.500.000,00
43	Kecamatan Menganti	888.623.400,00
44	Kecamatan Sidayu	657.687.500,00
45	Kecamatan Ujung Pangkah	758.810.000,00
46	Kecamatan Panceng	770.000.000,00
47	Kecamatan Bungah	745.672.000,00
48	Kecamatan Dukun	833.000.000,00
49	Kecamatan Sangkapura	842.017.500,00
50	Kecamatan Tambak	770.000.000,00
51	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	1.322.700.000,00
52	Kantor Ketahanan Pangan	1.670.602.000,00
53	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.376.100.000,00
54	Kantor Perpustakaan dan Arsip	3.348.300.000,00
55	Kantor Pertanian. Perkebunan dan Kehutanan	12.620.534.000,00
56	Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Perikanan	5.489.756.000,00
57	Dinas Kelautan. Perikanan dan Peternakan	15.205.054.700, 00

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

T

tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas" dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi MEA Akhir 2015". Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan di tingkat nasional dan provinsi tersebut serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat lokal, nasional, maupun global maka tema Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut:

**"Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
dan Pemerataan Perekonomian Untuk Kesejahteraan Masyarakat "**

Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Gresik tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus dirumuskan secara terukur dan obyektif berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis di tingkat daerah maupun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 dirumuskan dengan memperhatikan substansi dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

**" GRESIK YANG AGAMIS, DINAMIS, DEMOKRATIS, ADIL, AMAN, DAN
SEJAHTERA".**

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan berahlaq mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparatur.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan terampil, professional, produktif, kreatif, responsive dan mandiri.
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

4. Mengembangkan sumber daya alam dan buatan yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Memantapkan demokrasi konstitusional dan etika politik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.
6. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam sistem perundangan daerah yang akomodatif dan aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional.
7. Meningkatkan kemampuan pemerintah , masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tenteram dan damai.
8. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan social ekonomi.
9. Meningkatkan kesadaran perilaku konstruktif masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 dikelompokkan berdasarkan misi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat melalui matrik sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matrik Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Gresik Tahun 2016

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Misi ke-1 : Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan berahlaq mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparatur.	Terwujudnya masyarakat yang beriman , bertaqwa, berilmu, berahlaq mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis serta meningkatnya kualitas moral aparatur.	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 2. Meningkatkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. 3. Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah. 4. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah. 5. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
Misi ke-2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan terampil, profesional, produktif, kreatif, responsive dan mandiri.	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, profesional, produktif, kreatif responsive dan mandiri.	1. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang merata dan bermutu. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi.

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
		4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Misi ke-3 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.	Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.	1. Pengembangan perekonomian daerah. 2. Pembangunan perindustrian. 3. Peningkatan dan pengembang produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di Kab. Gresik 4. Pengembangan jasa dan perdagangan. 5. Meningkatnya gairah iklim usaha. 6. Pengembangan UKM dan Koperasi menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif. 7. Pembangunan pariwisata menjadi sector unggulan
Misi ke-4 : Mengembangkan sumber daya alam dan buatan yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Berkembangnya sumber daya alam dan buatan yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global. 2. Pengembangan sumber daya buatan.. 3. Pengembangan jaringan infrastruktur perhubungan. 4. Pengembangan kelistrikan daerah. 5. Pengembangan telematika. 6. Pengembangan sumber daya air.
Misi ke-5: Memantapkan demokrasi konstitusional dan etika politik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.	Mantapnya demokrasi konstitusional dan etika politik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.	1. Pengembangan demokrasi konstitusional di daerah 2. Meningkatnya intensitas pemberdayaan masyarakat.
Misi ke-6: Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam sistem perundangan daerah yang akomodatif dan aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional.	Tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam sistem perundangan daerah yang akomodatif dan aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional.	1. Penerapan hukum dan hak asasi manusia. 2. Meningkatnya kesadaran aparaturnya hukum. 3. Meningkatnya kesejahteraan aparaturnya hukum. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum pemerintahan. 5. Meningkatnya penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah . 6. Pengembangan sistem pengelolaan pertanahan.

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
		7. Pembangunan perumahan. 8. Pembangunan bidang pekerjaan umum.
Misi ke-7 Meningkatkan kemampuan pemerintah , masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tenteram dan damai.	Meningkatnya kemampuan pemerintah , masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tenteram dan damai.	1. Pembangunan keamanan daerah 2. Pembangunan kebersamaan hidup bermasyarakat 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan keamanan.
Misi ke-8: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan social ekonomi.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan social ekonomi.	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Pemberdayaan peran perempuan 3. Pembnagunan pemuda dan olahraga. 4. Pembangunan kesejahteraan sosial
Misi ke-9: Meningkatkan kesadaran perilaku konstruktif masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Meningkatnya kesadaran perilaku konstruktif masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.	1. Penataan persebarab dan mobilitas penduduk secra seimbang sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan. 2. Meningkatnya keserasian pemanfaatan ruang daerah. 3. Pendayagunaan sumber daya alam daerah. 4. Pemberdayaan sumber daya alam. 5. Peningkatan pendidikan dan kampanye penyadaran fungsi lingkungan hidup.

4.2. Prioritas Pembangunan

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2010-2015, evaluasi terhadap RKPd tahun lalu, identifikasi isu strategis di tingkat daerah maupun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. Berdasarkan pelbagai pertimbangan tersebut maka Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja.
3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.

4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan.
5. Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana.
7. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah.
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.
10. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik dijabarkan dalam program pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.	PENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97.25%	%	Program Pendidikan Luar Biasa	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan anak usia dini (PAUD)	86%	%	Program Pendidikan Non Formal	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	100%	%	Program Pendidikan Menengah	
			Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	%	Program pengelolaan dana spesifik grand bidang pendidikan	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	97.50%	%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	91%	%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.02%	%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.08%	%		
			Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%	%		

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.70%	%		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76%	%		
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,79%	%		
			Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	91%	%		
		KESEHATAN	Presentase Desa siaga Aktif Berstrata PURI	10	%	Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	1 DINAS KESEHATAN
			Angka Kematian Ibu (AKI)	115	%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2 RSUD
			Angka Kematian Bayi (AKB)	4.15	%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
			Presentase Fasilitasi Kesehatan Dasar Sesuai Standar	20	%	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
			Prosentase Kasus Pemasungan	2.8	%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
			Prosentase Balita Gizi Buruk	2.1	%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
			Prosentase Penanggulangan KLB dalam < 24 Jam	80	%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
			Prosentase Screening PTM bagi penduduk beresiko usia > 15 Tahun	6	%	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
			Prosentase Akses Air Minum Berkualitas	81.5	%	Program pengelolaan dana spesifik grand bidang kesehatan	
			Prosentase Akses Sanitasi Dasar(Jamban Sehat)	73	%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang dinilai memenuhi syarat	90	%	Program Pengembangan Obat dan Makanan	
			Terpenuhinya rasio tenaga kesehatan strategis terhadap 100.000 penduduk	95	%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
			Bed Occupancy Rate			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
			Average Length Of Stay	4,00		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
			Turn Over Internal	1,56		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
			Bed Turn Over	69,20		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
						Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	
	2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja	KETENAGAKERJAAN	Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	72,74		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA
			Kepatuhan Terhadap Norma kerja	93,72		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70		Program Transmigrasi Regional	
			Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,96			

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Penempatan Para Pencari Kerja	45,00			
			Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja	99,60			
			Angka Nihil Kecelakaan Kerja	5,67			
			Besaran pemeriksaan perusahaan	65			
			Besaran pengujian peralatan yang telah diuji	100			
			Angka penuntasan/Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100			
			Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama	9,00			
			Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama bipartit	4,24			
	3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga kesmasyarakatan yang dibina	5,05 %	%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BAPPEMAS

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
	Pengarusutamaan Gender.						
			Jumlah teknologi tepat guna yang dibina	37.50%	%	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
			Jumlah lembaga Ekonomi Mikro yang dibina	16.40%	%	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
			Jumlah sumberdaya Alam Desa yang Diberdayakan	0,84 %	%	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	
			Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina	4.80%	%	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	
		SOSIAL	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	24	Unit	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL
			Jumlah PMKS	134.136	Jiwa	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	
						Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo	
						Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
						Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	
						Program Pengelolaan Areal Pemakaman	
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
		KELUARGA BERENCANA	Prevalensi peserta KB Aktif	70%	%	Program Keluarga Berencana	KBPP

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
		DAN KELUARGA SEJAHTERA					
			Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3%	%	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	
			cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	9%	%	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	
						Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	
						Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	
						Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	
						Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Keluarga Berencana	
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu	100%		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	KBPP
			Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
			Cakupan layanan rehabilitasi social yang	100 Orang		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu				
			Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan gender dalam Pembangunan	
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	70%			
			Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan	100%			
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80%			
	4.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju	PERTANIAN	Produksi Pertanian :			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
	Kedaulatan Pangan						
			1. Padi	396,978.7 5		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	2 BAPELUH
			2. Jagung	131.787,1 5		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DINAS KELAUTAN, 3 PERIKANAN DAN PETERNAKAN
			3. Kedelai	1.745,15		Program Pengembangan Sarana/ Prasarana Pembangunan Pertanian/ Perkebunan	
			4. Kacang Tanah	3.460,61		Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan	
			5. Kacang Hijau	2.925,76		program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	
			Produksi Sayur :			program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
			1. Cabai Merah	991,38		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	
			2. Cabai Rawit	1.988,32			
			3. Tomat	439,90			
			4. Kacang Panjang	900,95			
			5. Terong	632,73			
			Produksi Buah :				
			1. Mangga	431,643.4 2	Kw		
			2. Pepaya	9,605.70	Kw		
			3. Sawo	2,257.27	Kw		
			4. Pisang	217,417.2 3	Kw		
			5. Jambu Biji (Kw)	4,443.08	Kw		
			6. Belimbing (Kw)	36.66	Kg/Pohon		
			Produksi Perkebunan:				
			Tembakau	190	Ton		

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Tebu	175,030.20	Ton		
			Produksi Peternakan:			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
			Daging	17,403.13	Ton	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
			Telur	3,115.89	Ton	Program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil (WP3K)	
			Susu	543.36	Ton	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
			Populasi Ternak :			Program peningkatan produksi hasil peternakan	
			Sapi	54,652.00	Ekor	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
			Kerbau	200	Ekor		
			Kambing	67,500.00	Ekor		
			Domba	32,000	Ekor		
			Kuda	220	Ekor		
			Ayam Buras	675,320	Ekor		
			Ayam Ras Petelur	150,000.00	Ekor		
			Ayam Ras Pedaging	13,031,500	Ekor		
			Itik	28,500.00	Ekor		
			Entok	30,150.00	Ekor		
		KEHUTANAN	Presentase Rehabilitasi hutan dan lahan			Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	DINAS PERTANIAN, 1 PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
			- Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Telah direhabilitasi	131 Ha	Ha	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 BADAN PENYULUH

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			- Luas Hutan dan Lahan Kritis pada Tahun Dasar 2015	95.09	%	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	
		PERIKANAN DAN KELAUTAN	Produksi Perikanan :			Program pengembangan budidaya perikanan	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
			Budi Daya :			Program pengembangan perikanan tangkap	
			- Udang Windu	5.520,00 TON		Program optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan	
			- Udang Vannamae	9.430,00 TON		Program pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan	
			- Bandeng	82.500,00 TON			
			- Kerapu	20,0 TON			
			- Nila	4.536,00 TON			
			Penangkapan	19.221,00 TON			
			Perairan Umum	458,00 TON			
		KETAHANAN PANGAN	Keberadaan Regulasi ketahanan pangan	Ada		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	KANTOR KETAHANAN PANGAN
			Ketersediaan pangan	92		Program pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian	
			Rata-rata konsumsi bahan pangan utama	180			
	5.Pemerataan dan Pertumbuhan	PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	938,5		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BPMP

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
	Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.						
			Persentase Penyelesaian Permohonan :			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
			Ijin Lokasi	85		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
			Ijin Gangguan (HO)	80		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	
			Ijin Usaha	100			
		KOPERASI DAN UKM	Prosentase Koperasi aktif	20%		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DISKOPERINDAG
			Prosentase Jumlah SDM Koperasi yang dibina	0,34%		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
			Prosentase Koperasi yang diberikan modal usaha	8%		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
		PERDAGANGAN	Prosentase Pertumbuhan Penerbitan SIUP	3,7 %		Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	DISKOPERINDAG
			Prosentase Pertumbuhan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	9%		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	
			Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	19.690.36 .190,58		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
			Jumlah Pameran / Ekspo Per Tahun	10 Even		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	
		PERINDUSTRIAN	Prosentase Jumlah Pertumbuhan Industri			Program Pembinaan PKL dan Asongan	DISKOPERINDAG
			Prosentase jumlah IKM yang dibina	5%		Program Peningkatan Pasar	
			Prosentase jumlah sentra IKM	40%		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
			Prosentase pertumbuhan klaster	42%		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
						Program Penataan struktur Industri	
						Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	
	6.Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup,	PEKERJAAN UMUM	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	74%		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
	Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana						
			Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	96.28%		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2 BAG. ADM PEMBANGUNAN
			Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	55%		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			Rumah tangga pengguna air bersih	80%		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	
			Lingkungan pemukiman kumuh	13%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
			Rumah layak huni	92%		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
			Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	95.23%		Program penyediaan dan pengolahan air baku	
			Penunjang Jalan Poros Desa	10%		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
						Program pengendalian banjir	
						Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan/Kelurahan	
						Program Pengaturan Jasa Konstruksi	
						Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	
						Program Pengembangan dan Implementasi Kegiatan Ke-PU-an	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
						Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Ke PU an	
						Program Pengembangan Perumahan	
						Program Lingkungan Sehat Perumahan	
						Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
						Program Pengelolaan Areal Pemakaman	
						Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perumahan	
						Program Perencanaan Tata Ruang	
						Program Pemanfaatan Ruang	
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		PERHUBUNGAN	Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang Diselesaikan	100%		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	0,50 %		Program rehab Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
			Persentase ketersediaan angkutan darat	0,03 %		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
			Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan	0,40 %		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
			Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan)	106615 Kapasitas		Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas	
			Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean	100%		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	
						Program Peningkatan Komunikasi Informasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian	
		ENERGI SUMBERDAYA MINERAL	Persentase ABT berijin yang membayar pajak	75.20%		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1. BAG SDA

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelistrikan, Energi dan Mineral	
						Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi	
						Program Pengembangan potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi	
						Pengendalian dan Pengawasan Energi Sumberdaya Mineral	
						Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi Mineral dan MIGAS	
						Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2. Bagian Pemerintahan
						Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
						Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	
		LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan sampah	92%		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
			Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.03%		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
			Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	130.00%		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
			Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	80%		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	40%		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			Luas Lahan Kritis	2.873 H		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
			Luas RTH Perkotaan	66%		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	8.910,74 Ha			
			Rasio Luas Kawasan lindung	11%			
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Sistem Pengendalian dan penanggulangan bencana alam	ADA		Program Pemulihan Pasca Bencana	BPBD
						Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	
						Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat	
						Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana	
	7.Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta	PENATAAN RUANG	Keberadaan Perda RTRW	ADA/TIDAK		Program perencanaan sosial budaya	BAPPEDA

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
	Pengawasan Tata Ruang Wilayah.						
			Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW	ADA/TIDAK		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	
		STATISTIK	Keberadaan dokumen "Gresik Dalam Angka"	Ada		Program Perencanaan Tata Ruang	BAPPEDA
			Keberadaan dokumen "PDRB"	Ada		Program Pemanfaatan Ruang	
			Keberadaan dokumen "IPM"	Ada		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Ketersediaan RPJPD	ADA/TIDAK		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BAPPEDA
			Ketersediaan RPJMD	ADA/TIDAK		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Ketersediaan RKPD	ADA/TIDAK		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
						Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya	
						Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Pembangunan Daerah	
						Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
						Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
	8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	11/44	%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 BAG. ORTALA

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
		Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
			Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2 BAG. UMUM
			Rasio jabatan yang terisi	100%		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	3 BKD
			Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal	100%		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	4 DISPENDUKCAPIL
			Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	100%		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	5 DPPKAD
						Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	6 HUMAS, PDTI, BAG. UMUM
			Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	100%		Program Pendidikan Kedinasan	7 PDTI,
			Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8 BAG. UMUM
			Presentase indeks kedisiplinan aparat pemerintah	100%		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	9 HUMAS
			Presentase keakuratan data kepegawaian dalam sistem informasi kepegawaian	100%		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 INSPEKTORAT 0 DAERAH

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK	100%		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1 1 BAG. PEREKONOMIAN
			Presentase jumlah pegawai negeri sipil yang naik pangkat, naik gaji berkala ataupun pension tepat waktu	100	%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 2 BAG. PERLENGKAPAN
			Jumlah pelaksanaan diklat struktural teknis maupun fungsional yang berhasil diselenggaranya	100	%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	
			Kepemilikan Identitas Diri (KTP, KTP-el dan Surat Keterangan)	98.54%		Program Penataan Administrasi Kependudukan	
			Perekaman KTP-el	85.44%		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
			Kepemilikan KTP-el	84.56%		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
			Kepemilikan Akta Kelahiran	54.24%		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	
			Opini laporan keuangan	WTP		Program Kerjasama Informasi dan Massa Media	
			Laporan keuangan tersusun tepat waktu	YA		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
			APBD ditetapkan tepat waktu	TEPAT		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
			Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ADA		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	
			Peningkatan PAD	6.68		Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Keberadaan kemandirian daerah	26,17	%		
			Presentase program dan kegiatan yang bisa direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran	100	%		
			Presentase program dan kegiatan yang bisa direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran	100	%		
			Keberadaan Website Pemerintah Daerah	Ada			
			Pengunjung Website setiap tahun	665.113			
			Sistim informasi yang tersedia	27			
			Jumlah pemberitaan di media	420			
			Persuratan secara elektronik	Ada			
			Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	%		
			Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga	28	Buah		
			Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat	3	Buah		
			Keberadaan unit pelayanan pengadaan	Ada	Ada/Tidak		
			Keberadaan E-procurement	Ada	Ada/Tidak		

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah	25	Orang		
			Pengadaan Barang, Jasa dan Bangunan	20	%		
			Pemanfaatan kebutuhan dan penggunaan barang secretariat daerah	20	%		
	9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.	KEBUDAYAAN	Pengembangan kawasan Cagar budaya Daerah	100%	%	Program Pengembangan Nilai Budaya	DISBUDPARPORA
			Penyelenggaraan Seni dan Budaya	100%	%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
			Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs	100%	%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100%	%	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	
			Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan	40	Orang	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	
			Persentase cabang olah raga yang aktif	100%	%	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
			Lapangan Olah Raga	27	Unit	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	
			Pembinaan SDM Keolahragaan	100	Orang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Penjaringan dan Pembinaan Atlit Berprestasi	5	atlit	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	
			Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga	1	Cabang Olahraga		
			Peningkatan Pembinaan Minat bakat Pemuda	117	Orang		
			Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi di Masyarakat	4	Jenis		
		PARIWISATA	Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan	1,650,000	Orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DISBUDPARPORA
			Pembinaan Pelaku Wisata dan Duta Wisata	60	Kumulatif Pelaku Wisata yang dibina	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
			Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	Unit	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
	10.Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Konflik yang dapat diselesaikan	100%		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	KESBANGPOLINMAS
			Jumlah Parpol yang dibina	11	Parpol	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Jumlah LSM/ Ormas/ OKP yang dibina	164	Jumlah LSM/ Ormas/ OKP	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
			Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk	0.05%	%	Program pengembangan wawasan kebangsaan	
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik	80%	%	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan	
			Demo / protes terhadap PERDA/Perbup	100%	%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
			Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum	Ada	Ada/Tidak	Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
			Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras	Ada	Ada/Tidak	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
						Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
		SOSIAL	Jumlah hari besar yang dirayakan	5 Kali		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 KESRA
			Bantuan sarana ibadah	95%		Program peningkatan peran serta kepemudaan	2 DINSOS
			Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	6000 PMKS		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3 DISBUDPARPORA
						Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
						Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	
						Program Penataan Daerah otonomi Baru	
		PERTANAHAN	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	1/1 %		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEMERINTAHAN UMUM
			Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah	34	Kali	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	
			Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD)	BAIK	-	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	
						Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
		ARSIP	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	412/413 %		Program Penyelesaian dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		PERPUSTAKAAN	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	179.142 Buku		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Daerah	
			Pengunjung perpustakaan	759.805 Orang		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip	
			Jumlah anggota perpustakaan	33.3 Orang		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
						Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	
		Otonomi Daerah,	Perda yang ditetapkan	10%		Program Penataan Perundang-Undangan	1 BAGIAN HUKUM

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
		Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
			Jumlah Perda yang dibatalkan	0		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2 SEKRETARIAT DPRD
			Kasus hukum yang diselesaikan	100%		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
			Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	100%			
			Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti	100%			
			Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda	100%			

No	Prioritas Pembangunan	URUSAN	Kinerja			Program/ pembangunan	SKPD PELAKSANA
			Indikator	Target	SATUAN		
			Perda inisiatif DPRD	10 Perda			

Pengukuran keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tercermin dari capaian indikator makro yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Gresik dalam satu tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil – hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Disamping hal tersebut seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik diwilayah Kabupaten Gresik diupayakan mampu menjadi menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator makro dan target capaian selama satu tahun kedepan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV.3
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7.14	7.03	7.11	7.34
2	Pendapatan Perkapita	Rp	46.666.268,22	52.753.459.98	57.222.223,99	61.574.826,72
3	Angka Pengangguran	%	4.51	5.06	5.06	4.80
4	Tingkat Kemiskinan	%	13.89	13.49	13.09	12.59
5	Indeks Pembangunan Manusia	%	76.36	76.48	76.99	77.23
6	Pencegahan Pencemaran Air	%	80%	80%	80%	80%
7	Pencegahan Pencemaran Udara	%	70%	70%	70%	70%
8	Akses Air Minum/Bersih	%	70	75.02	80	80